

DENNY J.A.
Opini di Republika

P a r t a i
POLITIK
P u n B e r g u g u r a n

Editor:
Fransiskus Surdiasis

LKIS

Denny J.A

Opini di Republika

Partai Politikpun Berguguran

Denny J.A

© Denny J.A

X+ 146 Halaman : 14,5 X 21 cm

1. Ilmu Politik
2. ISBN : 979-25-5230-8

Editor : Fransisku surdiasi

Rancangan sampul : Imam syahirul Alim

Setting/Layout : Santo

Penerbit

LKIS Yogyakarta

Salakan Baru No.1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Tlp. (0274) 387194 / 7472110

Faks. (0274) 417762

Cetakan I : Agustus 2006

DENNY J.A
OPINI DI REPUBLIKA

**PARTAI POLITIK
PUN BERGUGURAN**

Editor :
Fransiskus Surdiasis

Sanksi Pelanggaran Pasal 44
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Limapuluh Juta Rupiah)

PENGANTAR

TAHUN 2003, setahun menjelang Pemilu 2004, suhu politik merangkak naik. Prilaku politik elit selalu dibingkai dan dikalkulasi dalam kerangka memenangkan kompetisi 2004. Dua arah sekaligus ditempuh: melakukan konsolidasi politik dan sekaligus manuver yang memperlemah lawan politik.

Pada tahun ini misalnya, kasus pembelian sejumlah pesawat Sukhoi dari Rusia coba digelindingkan sebagai skandal politik. Publik luas mengenalnya dengan istilah Sukhoi-gate, merujuk pada skandal yang populer sebelumnya, Buloggate. Tujuannya tentu saja memperlemah posisi politik Megawati dan partainya, PDI Perjuangan.

Tahun ini juga ditandai dengan konsolidasi internal partai menjelang pemilu. Golkar menempuh proses konvensi, guna menjangar kandidat presiden. Pada saat yang sama, PPP juga melakukan terobosan politik dengan membolehkan non kader menjadi Caleg partai berlambang Kaabah itu.

Pada saat yang sama, masalah Aceh tak kunjung selesai. Megawati tampaknya berharap problem Aceh dapat diselesaikan sebelum pemilu sehingga bisa menambah angka bagi kredit politiknya. Operasi Terpadu pun digelar guna menggulung kekuatan Gerakan Aceh Merdeka.

Masalah lain yang memberi resonansi politik yang luas adalah penanganan TKI ilegal yang dipulangkan Malaysia. Tidak sigapnya Megawati menyelesaikan masalah ini menggerus modal PDI Perjuangan ketika maju ke medan laga pemilu 2004. Partai ini dinilai telah meninggalkan wong cilik sebagai backbone-nya.

Pengamat politik dan penulis kolom Denny J.A, merekam, merefleksikan dan memberi perspektif pada aneka isu dan perkembangan politik tersebut dalam berbagai kolom yang secara rutin dimuat di sejumlah media, antara lain Republika.

Sebagian tulisan yang dipublikasikan di harian *Republika* dikumpulkan dalam buku ini. Aneka manuver dan wacana yang berkembang berkaitan dengan pemilu legislatif, presiden dan resolusi masalah Aceh menjadi perhatian utama artikel-artikel tersebut. Selain memberi perhatian pada tiga isu utama tersebut, penulis juga membahas kinerja kelembagaan, baik pemerintahan maupun DPR.

Ditengah seluruh hiruk-pikuk politik itu, sebuah pertanyaan penting tentang format kepartaian politik di Indonesia mengemuka: Sistem Kepartaian seperti apakah yang akan memperkokoh fondasi demokrasi Indonesia yang tengah tumbuh? Artikel Denny J. A di harian *Republika* 18 Oktober 2003 berjudul *Partai Politikpun Berguguran* mewakili pertanyaan penting ini.

Selain berbicara tentang format kepartaian, artikel ini sesungguhnya mewakili sebuah spirit untuk terus menata ruang demokrasi Indonesia. Inilah spirit yang menjadi concern dasar penulis, yang mengemuka melalui sejumlah artikel membahas aneka isu politik setahun menjelang pemilu 2004. Karena itulah judul artikel ini dipakai untuk mewakili kumpulan tulisan dalam buku ini.

Artikel sebanyak 33 dalam buku ini diorganisir ke dalam empat tema besar seperti diatas.

Bagian Pertama, *Dinamika Pemilu Legislatif*, menampung semua tulisan yang berkaitan dengan persiapan partai menjelang pemilu 2004. Bagian Kedua: *Dinamika Pemilu Presiden*, menampung semua tulisan yang menyoroti dan merekam isu dan perkembangan politik berkaitan dengan Pemilu Presiden.

Bagian Ketiga: *Ke Arah Resolusi Konflik Aceh*, menampung berbagai artikel penulis yang berisi proposal solusi Aceh maupun yang sekedar merekam dan merefleksikan apa yang tengah berlangsung di daerah konflik tersebut. Bagian Keempat: *Dinamika Politik Era Megawati*, menampung kinerja kelembagaan, baik yang berkaitan dengan pemerintahan maupun DPR.

Semoga pengelompokan ini mampu membantu pembaca mengidentifikasi tema sekaligus benang merah dari aneka isu yang dibahas.

Akhirnya selamat membaca!!!

Jakarta, Agustus 2006

Fransiskus Surdiasis

Editor

DENNY J.A

DAFTAR ISI

Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Bagian Pertama	
Dinamika Pemilu Legislatif	1
● Megawati vs Rachmawati	2
● Partai Paling Korup	6
● Inovasi Politik PPP	10
● Partai Politik pun Berguguran	14
● Forum Partai Politik	18
● Nasib Buruk Partai Politik	22
Bagian Kedua	
Dinamika Pemilu Presiden	26
● Debat Calon Presiden	27
● Nasib Politik Wiranto	31
● Pengusaha Menjadi Presiden?	35
● Gus Dur Calon Presiden?	39
● Pertaruhan Nurcholish Madjid	43
● Kompromi Soal Calon Presiden	47
● Fenomena Susilo Bambang Yudhoyono	51

- Pemilu 2004, Terancam? 55
- Perjalanan Nurcholish Madjid 59
- Pertarungan Tiga Soekarnoputri 63

Bagian Ketiga

Ke Arah Resolusi Konflik Aceh 67

- Nyanyian Sedih di Aceh 68
- Pro NKRI di Aceh 72
- Menimbang Pemimpin Aceh 76
- Menjangkau Hasan Tiro 80
- Sepuluh Hari Operasi Terpadu 84
- Sayembara Memburu Hasan Tiro 88
- Momok Gerakan Aceh Merdeka 92

Bagian Keempat

Dinamika Politik Era Megawati 96

- Reformasi dan Gerakan Mahasiswa 97
- Sukhoi-Gate Mencari Mangsa 101
- Panja Sukhoi Kebablasan 105
- DPR Melanggar Konstitusi? 109
- Academic Review buat DPR 114
- Upah Mengangkat Gubernur 118
- Rehabilitasi Massal Komunisme? 122

● Dua Tahun Tragedi 9/11	126
● "Pembangkangan " di Daerah	130
● Ekspor Buruh ala Indonesia	134
Sumber Naskah	138
Daftar Buku Denny J.A	140

**BAGIAN PERTAMA
DINAMIKA PEMILU LEGISLATIF**

Megawati Versus Rachmawati

Di Sragen, Jawa Tengah, puluhan warga berkumpul. Mereka tengah membakar kartu anggota PDIP. Mereka mengeluh selaku wong cilik sudah dilupakan oleh PDIP. Dulu ketika belum berkuasa, ujar salah satu dari mereka, "kami membela Megawati dan berjuang untuk PDIP. Setelah Megawati menjadi presiden, kehidupan kami sebagai wong cilik justru bertambah susah."

Di sela-sela ritual pembakaran kartu anggota PDIP, muncul pernyataan dan poster. "Ibu, kami meninggalkan partai Ibu dan ikut partai Tante." Yang dimaksud ibu dan partai adalah Megawati dan PDIP. Sedangkan yang disebut dengan partai tante tidak lain adalah Partai Pelopor yang dipimpin Rachmawati Soekarnoputri. Kelompok wong cilik di Sragen ini 'hijrah' dari Megawati ke Rachmawati.

Seminggusebelumnya, Megawati dan Rachmawati juga 'berhadapan' secara politik. Berbagai tokoh oposisi berkumpul. Tidak hanya Gus Dur, dan aneka tokoh islam seperti Habieb Rizieq, Emha Ainun Nadjib, ataupun Fuad Bawazier dari KAHMI yang hadir. Ada

pula tokoh senior ekonomi kerakyatan semacam Sarbini, pensiunan militer serta sejumlah tokoh mahasiswa yang masih aktif. Mereka membentuk front Ampera yang berposisi kepada Megawati.

Deklarasi kelompok ini dibacakan oleh Rachmawati Soekarnoputri. Rachmawati tidak hanya berada di pihak oposisi. Lebih dari itu, ia menjadi salah satu pimpinan oposisi atas Megawati yang juga sama-sama menggunakan nama Soekarnoputri.

Konflik antara Megawati dan Rachmawati membawa implikasi politik tidak hanya dalam kehidupan pribadi mereka berdua. Implikasi yang paling besar dan signifikan adalah terbelahnya segmen pendukung politik kebangsaan dan 'Islam abangan'.

Selama ini Megawati dan PDIP diuntungkan secara politik oleh solidnya komunitas wong cilik, nasionalis dan 'Islam abangan'. Memang banyak tokoh lain yang juga muncul di komunitas ini. Banyak pula partai yang berdiri dengan memakai jargon wong cilik, kebangsaan, Islam abangan, Soekarnoputri ataupun Marhaenisme. Namun, Megawati dan PDIP praktis mendominasi komunitas ini tanpa saingan berarti.

Tampilnya Rachmawati dan Partai Pelopor di barisan oposisi dapat mengubah konstelasi politik. Sebagaimana Megawati, Rachmawati juga menyandang nama besar Soekarnoputri. Bahkan, lebih dari Megawati, Rachmawati dapat meyakinkan publik luas bahwa ia tidak hanya anak biologis Soekarno, tetapi juga anak ideologisnya. Sedangkan Megawati dinilai Rachmawati sudah mengkhianati ideologi Soekarnoisme.

Lebih dari Megawati, Rachmawati juga sangat komunikatif dalam berpidato. Ia lebih menguasai jargon dan konsep besar. Ia pun lebih dahulu aktif memimpin organisasi dalam Yayasan Pendidikan Soekarno. Hadirnya Rachmawati niscaya dapat menggerogoti dukungan publik kepada Megawati secara serius. Kasus hijrah

puluhan wong cilik di Sragen sangat mungkin terulang di berbagai tempat lain.

Operator politik dari kalangan komunitas Islam akan menyambut baik kehadiran Rachmawati. Munculnya Rachmawati di kancah politik akan membagi suara kalangan politik nasionalis. Suara yang tadinya disalurkan ke PDIP, sangat mungkin sebagian hijrah ke Partai Pelopor. Jika ini terjadi, sangat mungkin PDIP tidak lagi menjadi partai besar.

Operator politik dari paham nasionalis tentu sadar konsekuensi pecahnya keluarga Bung Karno dalam politik praktis. Dalam upayanya memenangkan pertarungan menghadapi politik Islam, tentu ada upaya untuk kembali mengharmoniskan Megawati dan Rachmawati. Setidaknya, keduanya berada dalam barisan yang sama, yang selanjutnya diharapkan dapat berkoalisi, untuk sama-sama menghadapi politik Islam.

Persoalannya, perbedaan keduanya cukup lebar. Ada perbedaan persepsi yang tajam di kalangan lingkaran utamanya mengenai konsep politik dan ekonomi wong cilik. Perbedaan konsep ini sulit didamaikan.

Rachmawati masih dipengaruhi oleh paham populisme yang berkembang sejak tahun tiga puluhan. Fungsi negara, pemerintah, bahkan partai politik, menurut paham ini, untuk menjamin kesejahteraan rakyat banyak, terutama wong cilik. Negara tidak boleh hanya bersikap netral dan membiarkan kompetisi berjalan apa adanya. Harus ada pemihakan dari negara untuk lebih membela wong cilik mengingat mereka adalah mayoritas dan mereka adalah yang terlemah. Program kesejahteraan seperti subsidi diperkenalkan. Wong cilik mendapatkan kemudahan dalam soal perumahan, makanan dan obat-obatan, sampai dengan pendidikan. Subsidi ini ditanggung oleh pemerintah.

Dari mana uang diperoleh untuk subsidi? Uang diambil dari pajak yang tinggi kepada orang kaya. Semakin tinggi kekayaan seseorang, semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Lapisan paling atas, misalnya dikenakan pajak penghasilan 35%. Lapisan menengah hanya 15%. Tapi lapisan paling bawah, bukan saja dibebaskan dari pajak, bahkan diberikan subsidi.

Kebijakan ini di dunia Barat sendiri sudah mengalami revisi. Beban negara menjadi sangat berat. Di negara Amerika Latin bahkan sudah muncul revisi yang radikal atas politik ekonomi wong cilik, dengan mengenakan istilah New Populism. Dalam New Populism, justru subsidi harus dikurangi secara bertahap. Ekonomi secara gradual harus bersandar kepada kompetisi bebas. Peran negara semakin lama hanya semakin menjadi wasit.

Megawati semakin mengarah kepada New Populism. Kelompok ekonomi dalam kabinetnya umumnya teknokrat yang pro kepada ekonomi pasar. Rasionalitas dari ekonomi pasar memang sangat kuat. Sekarang ini, mazhab ekonomi pasar yang menguasai dunia, terlebih lagi sejak hancurnya aneka negara komunis. Jargon subsidi untuk wong cilik justru dianggap sebagai kanker yang ganas oleh mazhab ini.

Apa boleh buat, secara ideologis agaknya Megawati dan Rachmawati memang sudah berbeda. Sungguhpun sama-sama menyangand nama Soekarno, sama-sama anak biologis Bung Karno, namun lingkaran terdekat keduanya punya persepsi yang berbeda tentang apa yang harus diambil dan direvisi dari Bung Karno.

Tidak bisa tidak, keduanya akan berjumpa di Pemilu 2004. Pemilu yang kelak menentukan, siapa diantara keduanya yang lebih didukung publik luas? Ataukah keduanya justru tersingkir oleh pemain lain yang lebih disukai publik?

Partai Paling Korup?

PDIP selaku partai pemenang pemilu dan partai pihak yang tengah berkuasa diklaim sebagai partai paling korup. Pejabat di daerah dikabarkan, lebih takut didatangi oleh aktivis PDIP daripada Brimob. Soalnya, jika aktivis PDIP yang datang, pasti ia minta proyek.

Jika yang menuduh PDIP adalah tokoh dari partai lain, yang menjadi saingan PDIP, arahnya sudah dapat ditebak. Sang tokoh itu pasti sedang berpolitik untuk menjatuhkan PDIP dan menaikan partainya sendiri. Jika yang menyatakan hal itu adalah tokoh PDIP sendiri, tetapi publik mengenalnya sebagai tokoh yang oportunistis dan pembohong, publik juga dapat langsung paham. Sang tokoh mungkin sedang mencari sensasi dan berharap menjadi pahlawan.

Tetapi yang membuat pernyataan adalah Kwik Kian Gie. Ia adalah tokoh pimpinan PDIP sendiri dan duduk dalam kabinet pemerintahan Megawati saat ini. Kwik Kian Gie juga bukan tokoh oportunistis dan pembohong. Ia sudah ikut PDI ketika partai ini justru sedang direpresi oleh pemerintah Soeharto. Kwik bukan pula dikenal sebagai figur

pembohong. Ia justru dianggap terlalu jujur. Walau sudah menjadi menteri dan tokoh teras PDIP, namun kejujurannya membuatnya selalu tampil lebih sebagai pengamat yang ingin obyektif dan berani, ketimbang sosok politikus yang selalu mencari-cari kesempatan.

Akibatnya pernyataan Kwik Kian Gie segera menjadi santapan pers. Oleh pihak luar, ia dianggap berani mengemukakan borok dalam partainya sendiri demi pendidikan politik. Sementara oleh elit PDIP ia dianggap penghianat yang memburuk-burukan partainya sendiri. Bantahan atas pernyataan Kwik Kian Gie segera pula dipublikasikan. Apa yang sebenarnya terjadi?

Benarkah PDIP sudah berubah dari partai wong cilik dan partai perjuangan (ketika belum berkuasa) menjadi partai paling korup (ketika sudah berkuasa)? Korupsi di Indonesia adalah 'barang' yang paling susah dibuktikan. Korupsi dalam politik kita seperti garam yang sudah larut dalam air. Kita memang dapat merasakan asinnya air itu. Namun garamnya sulit dilihat dan dipegang.

Hal yang sama terjadi dengan korupsi. Pihak yang intens terlibat dalam politik praktis atau mengamati secara dekat, memang merasakan banyaknya praktek korupsi. Namun mereka akan selalu kesulitan jika diminta membuktikannya. Praktek korupsi sudah sedemikian canggih. Disatu sisi, korupsi itu mungkin dilakukan secara 'gotong royong'. Banyak pihak yang terlibat. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak pula pihak yang akan menutup-nutupinya. Satu terbongkar, jaringan 'gotong royong' akan pula terbongkar.

Di sisi lain, jalannya uang juga semakin sulit dilacak. Pada level tingkat tinggi, perjalanan uang tidak lagi tercatat melalui rekening bank. Seandainyaupun rekening bank masih dibutuhkan, nama yang menerima uang juga tidak harus tokoh yang langsung terlibat. Semua transaksi dilakukan secara lebih halus dan lihai. Pihak terdekat, yang

mengetahui praktek korupsi itu, bahkan ia sendiri terlibat, akan tetap kesulitan mencari bukti hukumnya.

Seandainya pun pernyataan Kwik Kian Gie benar, ia tentu akan kesulitan mencari bukti. Menyatakan PDIP partai yang paling korup mengandaikan bukti dan data perbandingan yang cukup. Kwik dituntut mempunyai data korupsi tidak hanya di PDIP, tetapi juga partai besar lainnya. Melalui cek silang, data itu akan berbicara bahwa memang korupsi di PDIP lebih tinggi daripada partai besar lain.

Data yang mesti dimiliki Kwik bisa saja dalam bentuk jumlah uang. Misalnya, jumlah uang yang dikorupsi PDIP lebih banyak daripada jumlah uang yang dikorupsi partai lain. Bisa juga data itu dalam bentuk jumlah aktivis partai yang korup. Misalnya, jumlah aktivis PDIP (dan pimpinannya) yang korup lebih banyak daripada jumlah aktivis (dan pimpinan) partai lain yang melakukan tindakan serupa.

Mustahil Kwik mempunyai data itu. Yang dapat kita miliki secara ilmiah hanyalah ukuran korupsi secara makro. Badan penelitian asing seperti Transparency International melakukan penelitian dengan metodologi yang konsisten. Badan ini memang melaporkan bahwa secara makro korupsi di Indonesia di tahun 2002, di era reformasi, memang lebih parah dibandingkan, misalnya, dengan tahun 1997 di akhir tahun pemerintahan Soeharto.

Namun, bagaimana distribusi korupsi tingkat makro itu ke aneka partai? Tidak ada datanya. Akibatnya pernyataan Kwik Kian Gie memang tidak harus dipahami sebagai pernyataan ilmiah, akademis dan bukti hukum. Pernyataan Kwik harus dilihat sebagai kritik moral saja dari tokoh partai kepada partainya sendiri. Pesan moral yang terkandung dalam pernyataan Kwik adalah agar semua pihak semakin waspada.

Partai oposisi, seperti PDIP pun, yang dulu gemar mengangkat tema moral, wong cilik, dan slogan perjuangan, dapat juga menjadi

'korup'. Namun, tentu saja sulit dibuktikan apakah PDIP paling korup, sama korupnya, atau tidak sekorup partai besar lain. Yang dapat dirasakan, di era maraknya korupsi dalam politik nasional, kita sulit mempercayai jika ada partai besar yang sama sekali bersih.

PDIP agaknya tengah terjangkit 'penyakit' yang dulu menimpa partai besar lain, konflik internal partai. Banyak persoalan dan pertentangan internal selama ini hanya bergoyang di bawah permukaan. Kharisma dan wibawa Megawati mampu menyatukan partai. Namun, kini kharisma dan wibawa Megawati mulai merosot. Ketidakpuasan publik atas leadership-nya sebagai presiden semakin tinggi. Bahkan muncul gerakan yang ingin menjatuhkannya di tahun ini juga. Sementara ketidakpuasan elit PDIP terhadap Megawati selaku pimpinan partai juga semakin terbuka.

Satu per satu tokoh PDIP mulai menyempal. Para sesepuh partai seperti Roeslan Abdul Gani mulai pula lantang bicara. Rachmawati Soekarnoputri, dengan Partai Pelopor, tampil pula sebagai harapan baru wong cilik dan para pencinta Bung Karno. Di dalam tubuh PDIP sendiri sudah mulai muncul gerakan PDIP "putih" yang membedakan diri dari PDIP "hitam" yang korup dan tidak peduli nasib bangsa.

Dalam konteks seperti ini, Kwik Kian Gie berbicara. Dengan segera suara moral yang dibawanya mendapat dukungan pihak yang menamakan diri PDIP "putih" itu. Sangatlah sayang jika partai terbesar hasil pemilu demokratis menjadi morat-marit karena kurang terurus.

Inovasi Politik PPP

PARTAI politik juga terkena hukum Coca Cola dan Pepsi Cola. Sebagaimana Coca Cola atau Pepsi Cola yang terus dikemas secara baru, bahkan dengan mengganti rasa dan aroma, partai politik juga terkena hukum 'marketing' yang sama. Untuk bertahan, atau jika ingin lebih besar, partai politik harus pula melakukan serentetan inovasi segar.

Demikianlah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah merencanakan sebuah inovasi penting. PPP akan membuka caleg (Calon Legislatif). Orang luar dapat menjadi calon anggota DPR, ataupun DPRD dengan menggunakan kendaraan PPP. Mereka yang berminat menjadi wakil rakyat, silahkan mendaftar ke PPP. Syaratnya sangat minimal. Mereka secara formal harus terlebih dahulu menjadi anggota PPP, walau hanya sehari sebelum pendaftaran. Dan tentu saja mereka harus sepakat dengan platform perjuangan PPP.

Di dunia kepartaian Indonesia pasca-reformasi, ini inovasi brilian yang kedua. Inovasi yang pertama, dilakukan Partai Golkar. Tidak

tanggung-tanggung Golkar membuka kemungkinan bagi siapa saja putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi calon presiden Golkar.

Kini PPP membuka pintu seluasnya bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi calon wakil rakyat PPP. Jika diterapkan secara sistematis dan konsisten, inovasi ini akan membawa PPP menjadi partai besar di DPR. Paling tidak PPP tetap dapat menjadi tiga besar. Bahkan, jika PPP tidak tanggung-tanggung dengan inovasinya, misalnya juga memperbaharui platform partai, tidak mustahil PPP dapat masuk menjadi dua besar, atau bahkan yang terbesar.

Ada tiga hal yang akan disumbangkan oleh inovasi itu bagi PPP sendiri. Pertama, inovasi itu mengisi kekurangan SDM (sumber daya manusia). Selama 32 tahun Orde Baru, praktis hampir semua kader terbaik bangsa diserap oleh partai Golkar. Setelah reformasi terjadi, tidak banyak SDM baru yang bergabung dengan PPP. Sebaliknya, PPP pecah. Sebagian hijrah ke PPP Reformasi.

Sistem pemilu kini sudah menjadi proporsional terbuka. Calon legislatif akan lebih menentukan daya tarik partai di mata pemilih. Namun, bagaimana cara menarik orang-orang yang populer dan berkualitas agar bergabung dengan PPP? Banyak kader terbaik di luar sana, yang selama ini masih pasif dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Dengan kemudahan caleg yang diterapkan oleh PPP, mereka akan mendapatkan insentif bergabung dan menjadi caleg PPP.

Hal yang sama terjadi pada the swing leaders. Banyak tokoh di masyarakat yang masih ragu-ragu menerjunkan diri ke dalam politik. Selama ini untuk menjadi caleg sebuah partai besar dibutuhkan waktu yang lama dan berjenjang. Mereka lebih tertarik bergabung dengan partai baru, yang masih belum hirarkis. Mereka dapat melompat cepat menjadi caleg melalui partai baru. Namun dengan inovasi PPP, lompatan mudah itu juga disediakan. Ketimbang menjadi calon bagi partai baru, dengan sendirinya menjadi calon PPP yang sudah mengakar jauh lebih menarik.

Kedua, inovasi ini juga dapat mengurangi sentimen antipartai. Buruknya kinerja pemerintahan sejak reformasi juga berimbas kepada partai. Apa yang dapat diharapkan dari partai mapan jika tidak ada perubahan berarti yang dibawa oleh DPR ataupun presiden? Partai mapan semakin pula menjadi oligarkis. Elit partai semakin berkuasa dan terlalu dominan. Semakin kecil peluang publik luas untuk turut berpengaruh di partai, semakin besar pula peluang sentimen antipartai.

Inovasi yang dibawa PPP memberikan nuansa lain. Publik dapat memakai kendaraan PPP. Tidak sulit menjadi caleg PPP. Walau yang bersangkutan belum pernah menjadi pengurus, bahkan belum menjadi anggota, cukup dengan keanggotaan formal sehari, ia sudah dapat bersaing dengan calon lain untuk menjadi caleg PPP. Jika PPP dapat menjadi medium mobilitas vertikal secara mudah, sentimen antipartai akan pula berkurang. Publik atau tokoh yang tadinya golput mendapat insentif menjadi calon bagi caleg PPP.

Ketiga, inovasi ini menjadi cara yang paling efisien dan demokratis untuk menggelembungkan jumlah kursi partai. Besar kecilnya sebuah partai tidak ditentukan oleh seberapa banyak anggota partai, atau seberapa lama pengurus intinya sudah bergabung dengan partai. Besar kecilnya sebuah partai hanya diukur dari kursi yang diraihinya di DPRD atau DPR. Semakin besar kursi DPR yang diraih, semakin partai itu berpengaruh.

Membuka peluang warga terbaik bangsa menjadi caleg PPP, dengan sendirinya memperbesar kemungkinan penambahan jumlah kursi yang dapat diraih di DPR dan di DPRD. Apalagi jika calon itu tidak hanya membawa ambisi. Ia juga membawa gagasan, popularitas dan dana. Keterbukaan PPP bagi caleg seperti membuka gerbang besar bagi rombongan terbaik yang selama ini tidak berpartai.

Namun, tentu saja inovasi PPP harus jangan tanggung-tanggung. Platform partai harus pula direnovasi untuk membuat PPP menjadi sebuah tenda yang besar. Jika tidak, platform PPP itu tetap menjadi penghalang untuk merubah PPP menjadi rumah mini Indonesia.

Saatnya secara inovatif, pimpinan sekarang juga mempertimbangkan PPP menjadi partai terbuka. Tentu saja komunitas utama PPP tetap Islam. Namun sebagaimana PAN dan PKB, PPP harus juga membuka diri bagi anak bangsa lain, yang plural dan beragam.

Sulit bagi purnawirawan tentara dan polisi untuk merespon PPP jika PPP masih beraspirasi Piagam Jakarta, atau politik Islam formal. Tentara dan Polisi terbiasa dengan doktrin kebangsaan dan Pancasila. Sulit bagi pengusaha besar dan menengah untuk hidup dalam aspirasi Piagam Jakarta. Para pengusaha itu sudah terbiasa dengan dunia kapitalisme dan demokrasi, yang bertentangan dengan Piagam Jakarta.

Banyak pula umat Islam yang tidak mudah menerima 'politik Islam', 'Islam Politik', atau platform Piagam Jakarta. Mayoritas umat islam adalah mereka yang berpikiran semakin plural. Demokrasi dan kapitalisme sudah tidak lagi terhindar. Semakin lama 'Islam yang plural' akan semakin banyak sejalan dengan kemajuan ekonomi dan eksposur ke dunia modern. Jumlah umat Islam terinspirasi Piagam Jakarta dan politik Islam formal hanyalah minoritas.

Mengapa PPP memilih mengembangkan platform yang hanya menarik minoritas umat islam yang 'garis keras', bukan mayoritas umat islam yang plural? Jauh lebih fundamental jika inovasi itu juga menyentuh platform PPP dan merubahnya menjadi partai terbuka. Dengan demikian PPP siap menjadi sebuah tenda besar dan bagi bangsa Indonesia yang plural.

Partai Politik pun Berguguran

MENTERI Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra harus memberikan perhatian ekstra. Sebanyak 34 partai politik yang tergabung dalam Front Persatuan Nasional, melaporkan dugaan suap verifikasi partai politik. Sebagian besar dari partai itu memang tidak lolos verifikasi.

Belum selesai dengan kasus itu, Yusril harus pula menghadapi 7 partai Islam yang mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Tujuh partai ini juga tidak lolos verifikasi. Namun bukan dugaan suap pada tim yang dipimpin Yusril yang jadi sasaran mereka, tetapi basis hukum verifikasi parpol itu yang mereka anggap bertentangan dengan konstitusi.

Seperti yang sudah banyak duga. Puluhan bahkan ratusan partai politik yang ada akan gugur satu per satu. Ada yang gugur karena alasan administratif, dan tidak kalah banyaknya, pelan-pelan partai akan pula gugur karena kehilangan pendukung. Apa daya, demokrasi yang sehat pada waktunya hanya dapat menampung paling banyak empat sampai lima partai politik saja. Menyadari daya tampung

politik demokrasi yang sangat terbatas terhadap jumlah partai politik, semestinya pemimpin parpol yang tidak lolos verifikasi rileks saja.

Di seluruh dunia, tidak ada negara demokrasi yang sehat hidup dengan ratusan partai politik. Di Amerika Serikat, bahkan hanya hidup dua partai politik. Di Eropa Barat dan di wilayah lain di mana sistem multi-partai subur, tetap saja hanya ada tiga sampai lima partai yang hidup. Bagi negara demokrasi yang stabil dan plural mempunyai enam partai politik besar saja sudah terlalu banyak.

Berbagai cara digunakan untuk memperkecil jumlah partai politik yang hadir di parlemen. Alam demokrasi tentu tidak menggunakan larangan secara langsung bagi pendirian partai politik. Pembatasan partai dilakukan dengan menerapkan berbagai prosedur sistem pemilu. Secara sah, legal dan demokratis, sistem pemilu menjadi alat rekayasa yang dapat menyeleksi dan memperkecil jumlah partai politik dalam jangka panjang.

Sistem distrik, misalnya, cenderung membuat partai politik hanya menjadi dua saja. Dalam sistem distrik, teritori sebuah negara dibagi menjadi sejumlah distrik. Banyaknya jumlah distrik itu sebanyak jumlah anggota parlemen yang akan dipilih. Setiap distrik akan dipilih satu wakil rakyat.

Dalam sistem distrik berlaku prinsip "the winner takes all". Partai minoritas tidak akan pernah mendapatkan wakilnya. Katakanlah, dalam sebuah distrik ada sepuluh partai yang ikut serta. Tokoh partai A menang 25 persen. Walau hanya memenangkan 25 persen suara, distrik itu akan direbut oleh sang tokoh. Sembilan tokoh lain, yang perolehan suaranya lebih kecil akan tersingkir.

Metode the winner takes all ini akibatnya menjadi insentif negatif bagi partai kecil. Dalam studi perbandingan, sistem distrik ini memang merangsang partai kecil untuk membubarkan diri, atau menggabungkan diri dengan partai lain, agar menjadi mayoritas. Dalam perjalanan waktu, sistem ini hanya menyisahkan dua partai

besar saja. Partai kecil lainnya terkubur dengan sendirinya.

Sistem proporsional juga memiliki mekanisme sendiri untuk mengubur partai kecil. Berbeda dengan sistem distrik, sistem proporsional memungkinkan partai kecil dan partai minoritas untuk mempunyai wakil di DPR. Di sebuah provinsi, misalnya, partai yang hanya dapat 1 persen suara sangat mungkin mendapatkan kursi jika dalam provinsi itu dibagikan lebih dari seratus kursi parlemen.

Namun sistem proporsional menghadang partai kecil dengan menerapkan electoral threshold. Ada batas minimal persentase yang harus dimiliki partai untuk dapat aktif di parlemen. Di Indonesia, misalnya, ditetapkan threshold 2 persen suara. Partai yang tidak mencapai kursi DPR sebanyak 2 persen tidak mempunyai fraksi. Itu sebabnya Partai Keadilan tidak memiliki fraksi dan bergabung dengan fraksi PAN menjadi Fraksi Reformasi. Lebih dari itu, partai yang tidak lolos threshold dilarang pula ikut pemilu selanjutnya. Melalui aturan threshold, Indonesia hanya memiliki enam partai saja: PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB.

Aturan threshold di Indonesia tergolong sangat lunak. Di Turki, misalnya, persentase threshold itu adalah 10 persen. Partai yang tidak mencapai threshold 10 persen tidak akan punya fraksi di parlemen. Lebih dari itu, threshold juga diberlakukan secara lebih keras. Partai yang tidak dapat suara 10 persen tidak diizinkan punya wakil di parlemen. Suara perolehan partai itu dinyatakan hangus, dan diambil alih oleh partai lain yang lolos. Melalui threshold ini, partai kecil kembali terkubur secara demokratis.

Melihat perbandingan dengan dunia lain, terkuburnya ratusan partai kecil dan partai baru adalah pemandangan lazim. Jika memang menginginkan demokrasi yang stabil, sebagaimana layaknya demokrasi di dunia maju, memang tidak boleh ada banyak partai politik. Dua partai cukup. Atau jika multi-partai, empat sampai lima partai sudah cukup. Seleksi dilakukan melalui sistem pemilu yang

ketat. Seleksi itu sah adanya dan demokratis.

Di masa depan, Indonesia agaknya tidak akan punya partai politik yang mampu hidup lebih dari lima partai. Hal ini didasarkan kepada analisa segmen politik Indonesia. Untuk komunitas Islam, akan dua partai.

Satu mewakili segmen NU. Satu lagi mewakili segmen Muhammadiyah dan Islam lainnya. Untuk kalangan kebangsaan, dan Sukarno, juga akan ada satu partai. Untuk kalangan yang lebih populis, akan pula ada satu partai. Dan kalangan liberal, hadir pula satu partai.

Di tahun 1955, NU diwakili oleh Partai NU. Sedangkan komunitas Islam lainnya diwakili oleh Masyumi. Komunitas kebangsaan dan Sukarno diwakili oleh PNI. Yang populis diwakili oleh PKI. Yang liberal diwakili oleh PSI. Di tahun 1999, NU diwakili oleh PKB. Sedangkan komunitas Islam lainnya diwakili oleh PAN, PPP, PBB, PK. Yang kebangsaan dan Sukarno diwakili oleh PDIP. Sebagian juga diambil juga oleh GOLKAR. Sedangkan yang populis tidak punya wakilnya karena komunisme dilarang. Yang liberal juga belum terwakili karena reinkarnasi PSI belum tampak.

Tahun 2004, 2009 apalagi 2013, lima partai yang mewakili lima segmen politik Indonesia akan lebih muncul. Di luar lima partai itu, semua akan terkubur. Memang hal yang biasa jika politik nasional menjadi kuburan ratusan partai politik. Para pemimpin partai yang tidak lolos verifikasi sebenarnya tidak perlu menjadi gundah. Bukan hanya partai mereka yang terkubur. Belasan bahkan puluhan partai yang lolos verifikasi, bahkan yang lolos untuk ikut KPU pada gilirannya juga akan terkubur.

Forum Partai Politik

MENJELANG pemilu 2004, saatnya berbagai partai politik membuat forum bersama. Tidak perlu semua partai pemilu yang ikut dalam forum itu. Sejauh didirikan dan dihadiri oleh tujuh partai terbesar, yang kini menguasai lebih dari 90 persen kursi DPR, forum partai itu sudah powerful. Tidak hanya di pusat kota Jakarta, forum partai itu juga didirikan di setiap provinsi.

Ada dua hal yang menjadi fungsi utama forum partai politik. Pertama, membuat kode etik bersama, mengawasi kode etik itu, serta memberikan teguran bagi pelanggarnya. Kampanye dan pengerahan massa tidak lagi bisa dibiarkan apa adanya. Perlu ada pengaturan dan kesepakatan di kalangan elite partai agar tidak terjadi bentrokan massal. Forum partai itu yang akan mengatur apa yang boleh dan tidak, apa yang seharusnya dan yang jangan dilakukan oleh partai politik.

Kedua, forum partai itu juga aktif membuat peta teritorial. Dalam peta itu, dipisahkan wilayah yang rawan konflik dan wilayah yang

aman. Untuk wilayah yang aman, kampanye dan pengerahan massal tidak perlu diatur terlalu ketat. Namun untuk wilayah yang rawan konflik, perlu ada pembatasan yang disepakati bersama.

Forum partai politik adalah solusi yang cepat untuk mengantisipasi kekerasan massal yang terjadi di Buleleng, Bali. Tidak terduga, masa PDIP dan Golkar bentrok. Dua warga tewas terbunuh. Puluhan terluka. Hubungan dua partai terbesar itu menjadi kaku. Dari konflik di Buleleng, prediksi sederhana dapat dibuat. PDIP dan Golkar adalah dua partai yang memiliki platform yang nyaris sama. Jika dua kakak beradik itu saja dapat bentrok, apalagi pendukung partai yang platformnya saling bertentangan. Dapat kita bayangkan besarnya probabilitas bentrok pendukung partai yang berbeda dalam sentimen agama, misalnya.

Bali juga termasuk teritori yang homogen. Penduduk setempat secara mayoritas menghayati agama dan tradisi yang sama. Namun jika di Bali saja sesama penduduk dapat bentrok, apalagi di teritori lain. Di luar Bali, terutama di Jawa dan Sumatra, keberagaman penduduk makin mencolok. Tidak hanya perbedaan agama, tetapi juga terjadi perbedaan etnis, ras, golongan, bahkan status ekonomi. Probabilitas bentrok massal di wilayah lain akan lebih besar.

Kasus Buleleng seharusnya memberi sinyal dan peringatan bahwa pemilu 2004 mungkin akan rusuh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, di tahun 2004 kita mempunyai tiga pemilu nasional sekaligus dalam setahun. Pemilu legislatif diselenggarakan terlebih dahulu.

Setelah itu pemilu presiden tahap pertama. Yang terakhir, yang paling rawan, pemilu presiden tahap kedua. Pada tahap kedua itu, polarisasi dan pengelompokan politik akan semakin tajam. Semangat kalah dan menang, berkuasa atau tersingkir berada dalam puncaknya.

Dibandingkan dengan pemilu 1999, pemilu 2004 memang akan lebih rawan ditinjau dari berbagai persepektif. Di tahun 1999, pemilu merupakan pemilu pertama setelah 32 tahun Orde Baru berkuasa. Sebagai pemilu demokratis pertama, begitu banyak pihak menaruh harapan atasnya. Tidak hanya elit politik yang untuk pertama kali merasakan kebebasan dalam persaingan. Massa akar rumput juga menaruh harapan bagi perbaikan hidup melalui pemilu 1999.

Tidak heran, suasana itu membuat pemilu 1999 sengaja dikawal oleh aneka pihak agar aman. Semangat reformasi sedang tinggi-tingginya. Eforia terhadap hidup baru sedang berada di puncaknya. Semangat ini sendiri sudah meminimalkan semua peluang konflik dan bentrokan yang ada. Walau tentu saja sejumlah bentrokan kecil di sana-sini tetap terjadi.

Namun pemilu 2004 sudah punya nuansa yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi eforia reformasi. Sebaliknya, yang kini terjadi adalah kemarahan kepada simbol reformasi. Publik makin apatis terhadap partai lama.

Namun publik juga tidak menaruh harapan pada partai baru. Pemilu tidak lagi dipandang sebagai mekanisme yang dapat mengubah hidup mereka. Sentimen publik dalam suasana ini lebih sensitif dan lebih mudah terprovokasi oleh konflik massal.

Di tahun 1999, publik belum lama merasakan krisis ekonomi. Jika tahun 1997 dianggap sebagai awal krisis, pemilu tahun 1999 terjadi dalam waktu dua tahun setelah krisis. Karena baru dua tahun krisis, toleransi atas penderitaan juga masih tinggi. Mungkin banyak keluarga masih punya tabungan untuk membiayai hidupnya.

Namun di tahun 2004, krisis ekonomi sudah berumur tujuh tahun. Batas toleransi atas penderitaan sudah terlampaui. Publik luas merasakan sendiri buruknya situasi. Pengangguran dan setengah pengangguran kini berjumlah lebih dari 40 juta. Harga barang semakin naik. Begitu banyak kasus pengusuran. Sementara koruptor kelas kakap banyak yang dilepas.

Korupsi juga ternyata semakin luas. Di tahun 2004, publik luas lebih merasa dizalimi oleh ketidakadilan dan ketidakberdayaan. Dalam situasi ini, mereka menjadi rumput kering. Sedikit saja disulut, semua rumput kering akan mudah terbakar. Tidak heran, dalam pemilu 2004. Kerawanan akan bentrokan massal kampanye pemilu menjadi sangat terbuka.

Di tahun 1999, Orde Baru baru saja tumbang. Di balik sisi buruknya, sisi baik Orde Baru juga masih terasa, seperti konflik primordial yang teredam. Berbagai perbedaan dan kemarahan dengan menggunakan sentimen agama, ras, etnis, penduduk asli, dan pendatang belum menonjol. Akibatnya kekerasan massal dalam pemilu 1999 juga tidak terekspresikan.

Namun tahun 2004 sudah berbeda. Tanpa disadari, reformasi sudah kembali membuat publik luas menjadi primordial. Otonomi daerah membuat penduduk lokal semakin fanatis dengan kedaerahannya. Perbedaan agama, etnis, ras, pendatang dan penduduk asli semakin dipolitisasi.

Tidaklah heran, setelah usai pemilu 1999, aneka konflik primordial meletup di berbagai wilayah. Tahun 2004, publik akan mudah sekali diprovokasi oleh konflik primordial.

Justru karena degradasi toleransi publik, pemilu 2004 lebih mengkhawatirkan. Konflik massa pendukung dua partai terbesar, PDIP dan Golkar, di Bali seolah memberi sinyal. Sampai saat ini, elite PDIP dan Golkar tidak bergerak untuk duduk satu meja membahas bersama masalah itu. Yang terjadi justru gerakan saling menyalahkan dan saling menuding. Forum partai politik agaknya memang segera perlu dibentuk sebelum Indonesia memasuki suasana konflik yang jauh lebih parah.

Nasib Buruk Partai Baru?

AKANKAH nasib partai baru di pemilu 2004 lebih buruk ketimbang partai baru di pemilu 1999? Pertanyaan ini seketika terlintas menimbang 24 partai lolos pemilu yang diumumkan KPU. Di antara yang lolos, hanya ada 6 partai lama. Sisanya, tiga kali lipat jumlah partai lama, adalah partai baru.

Memang tidak semua partai baru benar-benar baru. Ada yang hanya berganti nama saja, seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang lahir dari PK (Partai Keadilan). Banyak pula pemimpin dan aktivis partai lama yang memisahkan diri dan membentuk partai baru. Mereka tidak benar-benar baru karena punya jam terbang mengelola partai lama. Namun banyak pula partai yang benar-benar baru dengan pemimpinnya yang benar-benar fresh, tidak terkait dengan partai lama.

Di antara partai baru, ada partai dengan pimpinan cendekiawan dan akademisi. Partai itu diniatkan menjadi partai yang modern sebagaimana tumbuh di dunia Barat. Sang pemimpinnya juga

seorang doktor, pernah hidup di dunia Barat. Mereka memahami dengan baik apa fungsi partai dan mengapa sebuah partai didirikan. Mereka sangat unggul dalam wacana. Namun masih perlu waktu untuk menguji apakah mereka juga unggul mencari pendukung dan mendapatkan kursi DPR?

Ada pula partai yang dipimpin oleh tokoh yang sangat populer. Zainudin MZ atau Rachmawati Soekarnoputri tidak kalah terkenal dibandingkan ketua umum partai lama sekelas Megawati Soekarnoputri atau Amien Rais sekalipun. Mereka umumnya sudah dikenal oleh lebih dari 90 persen pemilih. Namun mampukah mereka membawa partainya sepopuler diri mereka sendiri?

Banyak pula partai yang dibuat sebagai pecahan partai besar. PDIP, misalnya, menelurkan beberapa partai seperti PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan). Partai Golkar juga memiliki bayangan, antara lain PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa). PPP juga punya pesaing internalnya, antara lain PBR (Partai Bintang Reformasi). Mampukah aneka partai itu mengikuti induk mereka menjadi partai yang diperhitungkan dari sisi perolehan kursi DPR?

Beranjak dari pengalaman pemilu 1999, politik Indonesia sangat kejam dengan partai baru. Di tahun 1999, publik luas hanya mengizinkan tiga partai baru yang melewati threshold 2 persen, PKB, PAN dan PBB.

Padahal pemilu 1999 seharusnya sangat menguntungkan partai baru. Saat itu, pemain lama hanya tiga partai, Golkar, PDIP, dan PPP. Ruang yang terbuka bagi partai baru untuk menjadi partai besar begitu lebar.

Saat itu, eforia atas perubahan juga sedang tinggi-tingginya. Kemuakan atas yang lama, dan harapan pada yang baru berada pada puncaknya. Aneka partai baru membawa semangat baru, menyuguhkan pemimpin alternatif, menampilkan semboyan baru.

Penyegaran politik yang dibawa partai baru sangat pas dengan zamannya.

Ternyata di tahun 1999, yang lolos 2 persen dari partai baru itu hanya segelintir saja. Itupun karena partai baru itu didukung oleh jaringan organisasi massa yang sangat luas. PKB lolos karena menggunakan jaringan NU. PAN lolos karena didukung oleh jaringan Muhammadiyah. PBB menggunakan jaringan Masyumi lama.

Tahun 2004 suasana sudah sama sekali berbeda. Kini sudah ada enam partai lama: PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB. Ruang yang tersisa bagi partai baru, dibandingkan pemilu 1999, sudah sangat sedikit. Sulit kita membayangkan ada sepuluh partai yang mampu lolos threshold. Apalagi batas threshold kini naik dari 2 persen menuju 3 persen. Yang paling mungkin hanya pergantian posisi. Misalnya, partai baru masuk enam besar dan partai lama tersingkir. Tapi apakah partai baru mampu?

Sentimen publik atas perubahan dan euforia reformasi di tahun 2004 sudah sangat berbeda. Jika dulu publik gandrung pada yang baru, perubahan, reformasi, kini mereka justru berkembang menjadi apatis bahkan sinis. Mereka kecewa dengan hasil lima tahun reformasi. Perubahan mood ini semakin tidak menguntungkan partai baru.

Nasib partai baru di tahun 2004 menjadi "semacam anak tiri". Para pemilih di seluruh Indonesia seolah menjadi orang tua yang lebih memperhatikan "anak kandungnya", partai lama. Survei yang dilaksanakan oleh LSI (Lembaga Survei Indonesia) akhir tahun 2003 menunjukkan bahwa politik saat ini masih dikuasai oleh partai lama.

Memang terjadi migrasi yang tinggi dari para pemilih. Karena kecewa dengan hasil reformasi dan prestasi partainya, mereka pergi ke partai lain. Namun partai yang dituju, umumnya adalah partai lama. Migrasi umumnya terjadi hanya di enam partai itu saja. Partai baru mendapatkan limpahan sedikit sekali, kecuali PKS.

Apa yang menyebabkan partai baru seolah dianaktirikan? Ternyata sebab musababnya sangat sederhana. Umumnya partai baru itu belum dikenal pemilih. Partai lama, seperti Golkar atau PDIP atau PPP sudah dikenal lebih oleh 90 persen pemilih. Partai lama lain seperti PKB atau PAN sudah dikenal oleh lebih 80 persen pemilih.

Namun partai baru hanya dikenal oleh kurang dari 35 persen pemilih. Jika publik tidak mengenal mereka mustahil publik memilih mereka. Yang mengenal pun tidak semua menyukai partai itu. Yang menyukai partai itu juga tidak semua memilihnya. Tidak ada gunanya kompetensi, program, dan gagasan yang bagus-bagus itu jika partai tersebut tidak dikenal. Hal itu tidak berguna dari sisi ia tidak diketahui publik yang akan memilih.

Pemilih Indonesia tahun 2004 yang berjumlah sekitar 145 juta. Mereka tersebar dari Aceh sampai Papua. Untuk menemui mereka, kita harus menjelajahi 32 provinsi, lebih 400 kabupaten dan ribuan desa serta kota. Tidak semua mereka dapat dijangkau secara mudah oleh transportasi dan televisi sekalipun. Sebagian mereka tinggal di seberang sungai atau di balik gunung. Sangat banyak dari mereka tidak terlalu mengerti bahasa Indonesia.

Kendala utama partai baru adalah bagaimana menjangkau sedemikian besar pemilih. Bahkan koran hanya mampu menjangkau 25 persen dari mereka. Jumlah itu adalah gabungan semua koran, bukan hanya koran utama kota besar saja. Televisi juga hanya menjangkau 75 persen dari pemilih. Itupun gabungan semua pemirsa televisi. Mayoritas pemilih bukan pula penonton program berita.

Nasib buruk memang melanda partai baru. Kita sangat ingin pernyataan ini salah karena sebenarnya kita menyukai darah segar dari beberapa partai baru.

**BAGIAN KEDUA
DINAMIKA PEMILU PRESIDEN**

Debat Calon Presiden

BAYANGKAN skenario berikut, hari itu masyarakat luas berkumpul di depan televisi. Tidak hanya di ruang tamu rumah pribadi, tetapi juga di kantor, di kedai kopi bahkan di berbagai sekretariat organisasi, Televisi menjadi pusat perhatian. Mereka menonton dengan cukup tegang dan bergelora.

Yang mereka tonton bukan pertarungan tinju dunia ulangan antara Lenox Lewis versus Mike Tyson. Bukan pula lompatan Michael Jordan dalam final basket NBA, atau sepakbola liga Italia. Yang mereka tonton adalah putaran final dari proses pemilihan Presiden Indonesia tahun 2004.

Dua presiden yang menang di putaran pertama, berdebat untuk pertama kalinya dan disiarkan oleh seluruh jaringan televisi. Dua calon itu mungkin Megawati versus Amien Rais. Mungkin pula Susilo Bambang Yudhoyono, atau Hamengkubuwono, atau Hamzah Haz atau Yusril dan Akbar Tandjung. Saat ini belum kita ketahui siapa yang akan menjadi dua calon terkuat presiden kita di tahun 2004.

Seorang host menjadi moderator debat yang netral. Dua calon presiden berdiri di podium. Sementara di depan kandidat, duduk sekitar 10 orang penanya dari kedua belah pihak. Dua calon presiden diberikan waktu dan pertanyaan yang sama. Mereka diminta pula untuk saling menanggapi. Tidak lupa aneka jajak pendapat disebarkan untuk mengetahui siapa yang menurut publik memenangkan debat hari itu.

Skenario di atas agaknya akan terealisasi dalam pemilihan presiden tahun 2004 kelak. Sebagai partai terbesar, PDIP menyatakan kesetujuannya untuk berdebat. Dua syarat yang diajukan. Syarat pertama, debat itu harus diatur dengan undang-undang. Kedua, perdebatan hanya dilakukan di antara dua pemenang teratas putaran pertama. Calon presiden terkuat tidak perlu membuang waktu berdebat dengan puluhan calon presiden lain, yang mungkin tidak punya pendukung.

Jika PDIP setuju, lengkap sudah kesepakatan partai besar. Sebelumnya, Golkar melalui Akbar Tandjung sudah menyatakan keharusan perdebatan calon sebagai cara publik mengetahui kualitas sang calon. PAN tentu saja sangat mendukung debat itu karena Amien Rais dikenal sebagai salah satu ahli silat lidah. PPP ataupun PBB tentu tidak mau pula ketinggalan kereta.

Bagi sistem politik kita, apa sebenarnya urgensi perdebatan calon presiden itu? Mayoritas pemilih kita memang belum pemilih yang rasional. Umumnya mereka ada di desa dan tidak terlalu tersentuh oleh wacana dan visi seorang pemimpin. Mayoritas pemilih kita masih primordial. Mereka memilih tokoh tertentu, dan bukan tokoh lainnya, lebih banyak ditentukan oleh ikatan primordial. Sentimen para pemilih kepada Bung Karno, atau Muhammadiyah atau NU, adalah sumber terkuat dari voting behavior.

Tidak heran, walaupun kinerja presiden Megawati banyak menimbulkan ketidakpuasan, pemilih dalam basis kebangsaan dan

Soekarno, tidak banyak beranjak dari Megawati. Tidak peduli apakah Megawati pendiam, ahli berdebat atau tidak, pokoknya hidup atau mati ikut Mbak Mega.

Hal sama terjadi dalam kasus Presiden Gus Dur. Pemilih fanatik di Jawa Timur juga tidak terlalu peduli apakah gaya kepemimpinan Gus Dur malah membuat politik gunjang-ganjing. Mereka juga tidak peduli apakah benar terjadi kasus Buloggate dimana Gus Dur terlibat dalam pat-gulipat dana Bulog. Pokoknya mereka ikut apa kata Gus Dur.

Pemilih rasional hanya berada di kota besar. Mereka umumnya adalah pembaca koran dan penonton serius televisi. Mereka sangat berkalkulasi. Mereka menghargai pilihan. Tokoh yang buruk tidak akan pernah mereka pilih, terlepas dari sentimen emosional jenis apapun. Kelompok inilah yang kelak paling menikmati dan paling dipengaruhi oleh debat calon presiden. Namun jumlah ini masih minoritas.

Demokrasi di masa awal, apalagi dalam kondisi mayoritas masyarakat yang belum sepenuhnya terdidik, memang punya masalahnya sendiri. Dalam situasi seperti itu, tokoh yang baik dan kompeten, belum tentu tokoh yang populer. Sementara tokoh yang populer belum tentu baik dan kompeten.

Dalam debat calon presiden, memang dapat terlihat bagi yang jeli, siapa calon yang baik dan kompeten. Ketajaman merespon pertanyaan, kematangan emosi, sopan santun, dan imajinasi ke depan yang visioner tergambar dalam debat. Namun tokoh yang kompeten itu belum tentu populer. Bahkan belum tentu publik luas mengenalnya, atau mendengar namanya. Sementara tokoh yang mengakar, sangat mungkin buruk sekali kematangan emosi dan intelektualitasnya.

Inilah keterbatasan demokrasi. Ia memang hanya bersandar kepada kuantitas bukan kualitas pemilih. Katakanlah ada seratus profesor dan doktor yang memilih calon tertentu berdasarkan

hasil riset dan perhitungan yang matang. Sementara ada sejuta masyarakat kelas bawah yang nyaris buta huruf, tidak mengerti bakal soal wacana. Namun mereka sangat mengenal tokoh tertentu karena sentimen primordial. Maka pilihan sejuta kelas bawah itu akan mengalahkan pilihan para profesor dan doktor.

Untuk konteks politik Indonesia, memang debat publik belum terlalu signifikan mempengaruhi pilihan politik pemilih secara makro. Namun tradisi itu penting untuk dimulai. Banyak kebaikan yang dihasilkan dari debat calon presiden.

Jika perlu, bahkan setiap partai juga melakukan debat publik di antara para calon presiden di partainya masing-masing. Di Amerika Serikat misalnya, sebelum terjadi grand final antara calon presiden Partai Demokrat dan Partai Republik, masing-masing partai itu sudah terlebih dahulu menyeleksi secara ketat jagonya. Tokoh yang dicalonkan Partai Demokrat, sebagaimana Partai Republik, tidak otomatis ketua umum partai.

Semua kader partai dipersilahkan untuk mencalonkan diri. Dibuat mekanisme seleksi yang sangat panjang. Masing-masing calon Partai Demokrat, misalnya, keliling negara bagian untuk menarik pemilih. Proses ini membuat calon presiden ke luar dari sarangnya, bertatap muka dengan masyarakat, mendengar keluhan publik, dan memberikan solusi.

Mekanisme seleksi dan filter yang panjang membuat pemilih akan mengenal betul calon presidennya. Memilih presiden tidak lagi seperti membeli kucing dalam karung. Sang tokoh, sebelum jadi presiden, sudah 'dicuci' dan 'ditempa' selama kurang lebih setahun dalam proses seleksi. Hanya yang terbaik yang bertahan. Debat presiden memang harus dirancang hanya sebagai satu bagian saja dari proses filter lainnya yang panjang dan keras.

Nasib Politik Wiranto

MUNGKIN ini 'kado' terburuk yang pernah diterima purnawirawan Jenderal Wiranto selama karirnya. Ia menjadi tersangka dalam kasus crimes against humanity. Di muka bumi, tidak ada lagi kejahatan yang lebih tinggi daripada kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini 'gelar' bagi mereka yang dianggap bertanggungjawab atas terbunuhnya begitu banyak manusia tidak berdosa.

Tidak tanggung-tanggung, yang 'menganugerahkan kado terburuk' itu bukanlah lembaga sembarangan. Serious Crime Unit, yang semua anggotanya karyawan PBB mengajukan rilis ke Kejaksaan Timtim. Lalu rilis itu didaftarkan ke Distrik Dili. Lembaga ini meminta bantuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Interpol untuk menangkap Wiranto, bersama 6 mantan pimpinan militer lain.

Konsekuensi dari rilis itu memang masih menimbulkan kontroversi. Sebagian ahli di Indonesia menyarankan Wiranto dan pemerintah Republik Indonesia mengabaikannya saja. Namun sebagian beranggapan sebaliknya. Indonesia adalah anggota PBB dan harus memperhatikan tuntutan itu.

Ujung dari kasus ini, sangat mungkin Wiranto akan lolos dari jeratan hukum. Apalagi Indonesia sendiri sudah melaksanakan pengadilan HAM untuk kasus Timtim. Namun nasib karir politik Wiranto, sebagai akibatnya, akan sangat berat dan terjal. Dakwaan Timtim yang di-back up oleh bantuan nasihat PBB sangat mungkin menjadi palu godam yang menutup sejarah karirnya di dunia publik.

Dunia politik sangat dipengaruhi oleh persepsi, secara faktual, Wiranto belum tentu bersalah. Namun character assassination dan opini publik terhadap Persoalan kekerasan di Timtim akan menjadi penghalang yang sangat serius bagi Wiranto. Sulit baginya untuk diterima luas di dunia publik, apalagi menjadi pemimpin baru masyarakat, jika klarifikasi atas perannya tidak memuaskan.

Padahal, baru saja Wiranto dijadikan salah satu kandidat calon presiden Golkar. Jelas ini suatu kesempatan emas bagi Wiranto. Golkar adalah partai besar yang sangat mungkin kembali menjadi partai terbesar pada pemilu 2004 setelah PDIP tampak semakin terpuruk. Siapapun yang kelak dicalonkan Golkar sebagai presiden punya peluang sangat besar untuk benar-benar memimpin negeri ini.

Wiranto juga baru saja membina karir politiknya di kalangan civil society. Namanya mulai dikait-kaitkan dengan berbagai segmen politik yang protes terhadap Megawati. Dari mantan pimpinan militer, ia sudah mulai mentransformasikan diri menjadi pemimpin masyarakat. Bahkan di kalangan yang selama ini sangat kritis, Wiranto mulai diterima sebagai elemen untuk berposisi atas pemerintahan saat ini. Namun dakwaan kejahatan kemanusiaan itu dapat melumatkan semua peluang tersebut.

Akar persoalan yang dihadapi Wiranto saat ini adalah ia memimpin militer di masa yang sangat sulit. Kesetiiaannya pada apa yang ia persepsikan sebagai kepentingan negara, serta loyalitasnya kepada presiden saat itu, memang sudah menjadi sumber persoalan sendiri.

Menjadi pimpinan militer di akhir kekuasaan Soeharto, serta di era transisi awal dalam pemerintahan Habibie, harus merespon begitu banyak kepentingan yang saling berlawanan. Siapapun yang menjadi pimpinan militer saat itu akan mengalami kesulitan dan konsekuensi politik yang kurang lebih sama dengan melingkupi Wiranto.

Soal Timtim, misalnya. Presiden Habibie sudah memutuskan untuk melakukan referendum. Sebagai bawahan, tidak ada hal lain yang dapat ia lakukan kecuali mengamankan keputusan presiden. Apalagi, di era awal reformasi, referendum bagi Timtim dianggap kebijakan yang sangat reformis dan dipuji dunia. Ada pula keyakinan pihak yang pro-Indonesia akan menang dalam referendum.

Tidak ada pula yang salah jika Wiranto dan pimpinan militer lain mendambakan Timtim tetap bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyalitas militer kepada NKRI sudah menjadi semacam 'doktrin suci'. Tidak ada pula yang salah jika militer melakukan mobilisasi agar hasil referendum memenangkan pihak yang pro-Indonesia kepada integrasi.

Namun yang disesalkan oleh semua pihak dan memang layak untuk dituduk, dan dituduh sebagai kejahatan melawan kemanusiaan adalah kekerasan. Mengikuti hasil referendum yang mengalahkan Indonesia, pembunuhan dan pembakaran massal yang sangat kejam dan keji terjadi. Begitu banyak yang mati. Tidak terhitung betapa tersiksanya penduduk setempat akibat rasa takut, cemas, sedih, marah dan kehilangan anggota keluarga.

Sampai saat ini semuanya belum sepenuhnya terang. Belum diketahui secara persis seberapa jauh keterlibatan oknum militer pada kasus kekerasan itu. Belum jelas benar pula apakah secara institusi ada kebijakan resmi militer di balik kekerasan itu. Tidak pula jelas sampai di tingkat mana pimpinan militer terlibat. Yang publik tahu, saat itu Wiranto adalah pimpinan militer tertinggi.

Tidak sekali itu Wiranto menghadapi situasi sulit. Saat ia masih menjabat, terjadi pula kekerasan yang kemudian dikenal sebagai

Tragedi Semanggi. Kala itu MPR tengah melakukan Sidang Istimewa. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen berkumpul di area Jembatan Semanggi. Mereka ingin menyerbu gedung MPR dan sekali lagi mendudukinya.

Tidak ada yang salah jika pimpinan kepolisian dan militer saat itu ingin mengamankan SI MPR. Jika MPR gagal bersidang, dan berhasil diobrak-abrik mahasiswa, kewibawaan negara akan merosot ke titik sangat rendah. Tidak ada pemerintah yang dapat efektif memerintah jika simbol dan lembaga negara dapat dengan mudah diamuk massa. Kerugian nasional akan sangat besar.

Namun sekali lagi yang tidak dapat dibela adalah kekerasan. Lima tewas dan ratusan luka-luka akibat diberondong oleh peluru secara membabi buta yang ditembakkan aparat keamanan. Kerumunan mahasiswa dan rakyat dihadapi secara brutal. Tidak pernah kita tahu apa peran Wiranto. Namun sekali lagi, saat itu Wiranto adalah pimpinan militer tertinggi. Posisi itu memang membuatnya sangat rentan menjadi korban character assassination.

Jika Wiranto memimpin militer di era yang membaik seperti sekarang, karir politiknya akan terus berlanjut. Kapabilitas leadership dan jaringannya sangat memungkinkan. Tapi, apa daya, suaratan nasib membuatnya menjadi pimpinan militer di era yang sangat sulit. Suka ataupun tidak, ia akan terkena 'cipratan' atas semua hal yang buruk di masa silam. Dakwaan Timtim yang di-back up PBB sangat mungkin menjadi gong yang mengakhiri peluangnya untuk kembali tampil di dunia publik.

Pengusaha Menjadi Presiden?

AKANKAH Indonesia berbeda jika kelak yang menjadi presiden di tahun 2004 adalah pengusaha? Kini kita lihat bursa calon presiden tidak hanya dipenuhi oleh pemimpin partai politik atau menteri. Fenomena baru, banyak pula tampil kandidat presiden dari kalangan pengusaha.

Surya Paloh, Aburizal Bakri, Yusuf Kalla mulai disebut-sebut memasuki kancah pertarungan. Tidak tertutup kemungkinan, sebelum berakhir masa pencalonan presiden di awal tahun 2004 akan banyak lagi tampil kandidat presiden dari kalangan pengusaha.

Di luar negeri, pengusaha yang menjadi pimpinan pemerintahan sudah biasa. Tidak perlu jauh-jauh, di Thailand, perdana menteri yang menjabat juga seorang pengusaha besar. Thaksin Shinawatra lima tahun lalu seorang pengusaha murni, yang tidak banyak terlibat politik. Dalam waktu singkat ia memasuki politik dan langsung menjadi perdana menteri.

Di Eropa, tepatnya di Italia, ada pula pengusaha Silvio Berlusconi. Sepanjang karirnya, ia dikenal sebagai pengusaha besar media. Ia termasuk ke dalam jajaran tokoh terkaya di bisnis itu. Kini ia menjadi perdana menteri. Di Amerika Serikat, tidak sedikit pula pengusaha yang meramaikan bursa pemilihan presiden. Ross Perot dan Steve Forbes, untuk menyebut beberapa nama, menghiasi berita surat kabar, betapa mereka ingin membawa spirit entrepreneurship swasta untuk mengelola pemerintahan.

Demokrasi memperkenalkan kompetisi bebas untuk merebut pucuk pemerintahan. Rekrutmen bursa calon presiden menjadi sedemikian terbuka. Tidak hanya sumber konvensional yang digali, seperti tokoh di pemerintahan atau militer. Dunia usaha ternyata juga mulai menjadi ladang rekrutment calon presiden.

Pencalonan Aburizal Bakrie masih terdengar sayup-sayup. Ia belum secara terbuka dan resmi menyatakan keinginannya menjadi calon presiden. Sementara Yusuf Kalla juga masih berbicara secara diplomatis. Posisinya sebagai bawahan Presiden Megawati membuatnya masih sungkan untuk menantang bosnya sendiri dalam pemilihan presiden 2004.

Namun Surya Paloh mengambil langkah berbeda. Ia adalah tokoh pertama dari kalangan pengusaha yang sudah secara resmi dan terbuka menyatakan pencalonannya. Sangat unik, ia menyatakan pencalonannya itu dihadapan pers atau didepan rapat partai. Pencalonan resmi Surya Paloh dinyatakan dihadapan karyawannya sendiri yang sengaja di kumpulkan dari berbagai kota.

Ratusan karyawan berkumpul di halaman. Dimulailah dialog calon presiden dengan karyawannya. Aneka pertanyaan dan pernyataan, mulai dari yang optimis sampai khawatir diungkapkan. Ada yang bertanya bagaimana nasib perusahaan nanti jika sang pemimpin dan pemilik menjadi presiden? Ada pula yang bertanya apakah perusahaan akan dijual untuk membiayai kampanye?

Ini jelas sebuah kultur baru yang hanya mungkin dibawa oleh gerakan reformasi. Keterbukaan tidak hanya menyentuh politik nasional secara makro, namun sudah pula masuk ke unit perusahaan. Pertemuan aneka karyawan dari berbagai anak perusahaan bukan membahas UMR atau SDM. Mereka berkumpul untuk mengantarkan dan berdoa bersama karena pemilik perusahaan akan menjadi calon presiden.

Jika mejadi presiden, akankah pengusaha memberikan gaya leadership yang berbeda? Saya teringat sebuah buku penting saya yang ditulis oleh David Osborne, judulnya sangat panjang: "Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming Public Sector. Bagi mahasiswa paska sarjana bidang public policy atau public administration, buku Osborne menjadi bacaan wajib.

Secara meyakinkan buku ini menganjurkan agar pemerintahan dikelola selayaknya pengelolaan sebuah perusahaan swasta yang sudah go public. Berbagai prinsip dan kiat yang membuat sebuah perusahaan swasta maju dan efisien harus pula menjadi platform pemerintahan modern. Apa yang ditulis Osborn kini sudah banyak diterapkan dalam pemerintahan negara modern.

Seorang pengusaha yang sukses tentu sudah sangat terbiasa dengan prinsip di atas. Mustahil pengusaha besar itu sukses jika tidak bersandar kepada asas profesionalitas yang modern. Lain halnya jika pengusaha itu hanya dikarbit melalui koneksi yang KKN. Ketika kompetisi menjadi terbuka, sang pengusaha dengan sendirinya akan hancur.

Yang mahal dari calon presiden pengusaha itu adalah kemampuan memasukan spirit entrepreneurship ke tubuh pemerintahan. Di banding calon presiden dari sektor lain, dengan sendirinya kemampuan pengusaha dalam entrepreneurship itu lebih unggul. Jika konsisten diterapkan dalam pemerintahan, pengusaha dapat membawa perubahan bentuk pemerintahan secara signifikan.

Persoalan dalam politik ada begitu banyak variable. Apalagi untuk terpilih sebagai presiden, dibutuhkan apa yang disebut political acceptability. Sang kandidat boleh saja sangat tinggi kapabilitas dan integritas pribadinya. Sang kandidat mungkin saja mempunyai konsep yang dapat merubah negara dalam sekejap. Namun jika banyak tidak mengenalnya, ia tidak akan terpilih.

Bagi calon pengusaha yang serius untuk menjadi presiden, tantangan terbesarnya adalah dikenal, kemudian disukai rakyat banyak. Mereka selama ini mungkin sering disebut dikoran atau televisi. Mereka mungkin sering pula masuk kedalam komunitas elit. Namun mayoritas pemilih ada di pedesaan. Popularitas mereka saat ini dengan sendirinya sudah ketinggalan jauh dari presiden atau wakil presiden yang kini sedang berkuasa. Ketinggalan itu hanya dapat dikejar bahkan dilampaui jika sang calon punya mesin politik yang sangat massif dan efektif.

Belum dapat kita prediksi, apakah nanti pengusaha seperti Surya Paloh, Aburizal Bakrie, atau Yusuf Kalla dapat benar-benar jadi presiden. Bahkan belum dapat kita prediksi apakah nanti Golkar akan mencalonkan salah satu dari mereka dalam konvensi partai di bulan Oktober 2003. Namun pencalonan mereka setidaknya membuat pemilihan presiden Indonesia di tahun 2004 bertambah seru.

Gus Dur Calon Presiden?

GUS Dur kembali membuat berita. Ia menyatakan bahwa izin dari empat ulama berpengaruh sudah turun. Ia pun akan melenggang mulus untuk menjadi calon presiden. Para pembantu setianya menyatakan bahwa banyak gagasan Gus Dur yang belum sempat terealisasi ketika dulu ia menjadi presiden. Kini saatnya Gus Dur maju kembali, lalu menjadi presiden untuk menuntaskan gagasan besarnya.

Sajak lama Gus Dur memang tidak setuju jika PKB mencalonkan tokoh lain diluar dirinya. Ketika ada bisik-bisik bahwa PKB mempertimbangkan Nurcholis Madjid sebagai capres, segera Gus Dur bereaksi negatif. Bahkan terhadap anggota keluarga besarnya sendiri di NU, Hasyim Muzadi, Gus Dur mengecam. Menurut Gus Dur, jika memang Hasyim Muzadi nanti maju sebagai calon presiden atau wapres, Muzadi harus mundur dari ketua umum PBNU.

Kini memang semuanya terang. Di balik penolakannya atas pencalonan tokoh lain, memang ada ambisi Gus Dur untuk kembali

menjadi presiden. Tentu saja itu hak semua warga negara dewasa untuk maju sebagai calon presiden. Namun untuk tokoh sekelas Gus Dur, dan organisasi sebesar NU dan PKB, bukan lagi kelasnya untuk berbicara soal hak politik. Mereka juga dituntut untuk berpikir dalam kerangka tanggung jawab, seperti apa konsekuensinya jika Gus Dur nanti benar-benar terpilih sebagai presiden.

Peristiwa itu belum terlalu lama ketika Gus Dur menjadi presiden. Yang unik, antara Gus Dur sebagai pribadi dan lembaga presiden sebagai institusi tidak terjadi sinergi yang saling membesarkan dan positif.

Sebagai perbandingan, antara Roosevelt atau Ronald Reagan dengan lembaga presiden Amerika Serikat terjadi sinergi positif. Lembaga presiden semakin mengharumkan pribadi Roosevelt dan Ronald Reagan. Sebaliknya, leadership Roosevelt dan Ronald Reagan semakin membuat lembaga presiden Amerika Serikat berwibawa.

Untuk kasus Gus Dur, sinergi yang terjadi justru negatif. Lembaga presiden sudah merusak citra Gus Dur. Sebaliknya, Gus Dur juga ikut merusak kewibawaan lembaga presiden Indonesia. Kombinasi buruk ini tidak bisa diinterpretasikan lain bahwa mungkin Gus Dur tokoh yang sangat bagus, tetapi bukan untuk menjadi presiden.

Sebelum menjadi presiden, Gus Dur adalah tokoh yang sangat dihormati. Pengagum dan kawan setianya datang dari kalangan yang beragam. Mereka respek kepada gagasan dan perjuangan Gus Dur. Tidak terbatas kepada para politisi, namun juga aktivis, agamawan yang beragam, intelektual, bahkan juga berbagai tokoh militer. Jarang sekali ada tokoh seperti Gus Dur, dimana publik sepakat menganugerahkan peran sebagai guru bangsa.

Namun setelah menjadi presiden, lembaga presiden merusak citra Gus Dur. Semua citra baik soal Gus Dur seolah hilang tanpa bekas. Gus Dur seolah menjadi 'orang lain' ketika menjabat presiden.

Sebelum menjadi presiden, ia dikenal sangat akrab dengan

pendekatan kultural dan humanitarian. Orientasinya bukan pada kekuasaan. Namun setelah menjadi presiden, citra yang terbentuk adalah Gus Dur sebagai pencinta kekuasaan nomor wahid. Ia bahkan dinilai cenderung melakukan apa saja agar tetap bertahan sebagai presiden. Bahkan ia tidak ragu mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membekukan MPR/DPR. Padahal MPR/DPR itu adalah lembaga yang anggotanya dipilih secara demokratis melalui pemilu.

Sebelum menjadi presiden, Gus Dur dikenal sebagai figur yang sangat sederhana. Penampilan fisiknya sangat bersahaja. Publik menilai ia sudah melewati tahap kesenangan material. Namun setelah menjadi presiden, isu 'amplop' dan 'uang' mengenai Gus Dur menjadi gunjingan dan gosip. Gus Dur pun dipecat diawali oleh dugaan kasus korupsi Bulogate.

Sebelum menjadi presiden, Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang sangat pandai membina relasi. Namun setelah menjadi presiden, kesan atas Gus Dur justru sebaliknya. Ia mudah sekali mengkhianati kesepakatan dan komitmen. Kawan-kawan dan partai yang mendukungnya menjadi presiden, satu per satu ia pecat. Tidak hanya dipecat, sang menteri pun dituduh melakukan berbagai hal miring, yang tentu saja membuat malu sang menteri dan keluarganya. Padahal tuduhan itu belum tentu benar.

Tidak hanya lembaga presiden yang merusak citra Gus Dur. Sebaliknya, Gus Dur juga merusak citra lembaga presiden. Di semua negara demokratis didunia, lembaga presiden adalah lembaga terhormat dengan kewibawaan politik tertinggi. Namun di tangan Gus Dur, lembaga presiden justru justru obyek gunjingan dan ejekan. Bagaimana mungkin, hampir setiap minggu, setelah shalat Jumat, lembaga presiden menjadi sumber gosip dan isu. Seharusnya lembaga presiden menjadi stabilisator publik. Di tangan Gus Dur, lembaga presiden justru acap kali membuat politik gunjang-ganjing.

Seharusnya lembaga presiden menjadi standar sebuah manajemen pemerintahan yang tertata dan prosedural. Kesalahan administratif,

apalagi kesalahan politik, seharusnya dibuat seminimal mungkin. Namun di bawah Gus Dur, lembaga presiden seolah menjadi sekelas organisasi OSIS anak SMA, yang begitu informal dan buruk. Peraturan dapat diganti-ganti, bolak-balik dalam hitungan hari. Ketika rapat kabinet, Gus Dur malah 'mendengkur' tidur.

Dengan mengemukakan kembali data dan fakta ketika Gus Dur menjadi presiden itu tidak berarti kita membenci Gus Dur. Sebaliknya, justru karena rasa sayang kita kepada Gus Dur secara pribadi, dan kecintaan kita kepada lembaga presiden yang berwibawa, sebaiknya Gus Dur dan lembaga presiden jangan lagi 'saling mengganggu'.

Kita tentu tidak dapat mencegah kehendak pribadi Gus Dur jika ia tetap ngotot ingin dicalonkan. Namun yang kita tidak habis mengerti, jika lembaga sebesar dan sewibawa NU dan PKB ikut saja apa maunya Gus Dur. Kemana bersembunyinya orang-orang pintar, yang teguh pendirian, yang tinggi integritasnya, bahkan banyak pula yang bergelar doktor di PKB dan NU? Jelaslah ini malapetaka buat NU atau PKB jika tidak ada orang yang mampu mengontrol dan berkata "tidak" kepada Gus Dur.

Konsep loyalitas, hormat dan sayang kepada Gus Dur di kalangan pendukung fanatiknya harus berubah. Hormat dan sayang dapat juga diekspresikan dengan berkata "tidak" kepada Gus Dur karena tahu efek buruknya kelak tidak hanya buat Gus Dur, tetapi juga buat bangsa.

Pertaruhan Nurcholish Madjid

AKHIRNYA Cak Nur (Nurcholish Madjid) secara resmi mengumumkan kesediaannya menjadi calon presiden. Ia mengemukakan platform perjuangan yang akan menjadi landasan filosofi politiknya. Partai politik dipersilahkan untuk melamar dirinya dan berjuang bersama sejauh partai yang bersangkutan juga memperjuangkan platform yang ia tawarkan. Proses pencalonan yang ditempuh Cak Nur sangat elegan. Terkesan ia berniat menjadi presiden bukan untuk ambisi pribadi, tetapi untuk memperjuangkan sebuah gagasan.

Publik yang mencintai Cak Nur juga menginginkan negara Indonesia secepatnya keluar dari krisis, menyambut pencalonan Cak Nur dengan perasaan bercampur. Disatu sisi, ada rasa gembira dan harapan baru. Namun, ada pula rasa cemas. Mereka khawatir kharismanya sebagai guru bangsa, sebagai suara moral, yang berbicara atas nama kepentingan publik, akan redup.

Pro dan kontra pencalonan Cak Nur sebagian juga terkait dari percontohan yang sudah ada dalam sejarah. Tentu bukan pertama

kali seorang guru bangsa atau cendekiawan atau intelektual yang berwibawa menjadi presiden. Yang paling dekat dengan era kita adalah Vaclav Havel dan Gus Dur.

Havel menjadi contoh yang berhasil. Keluhuran dan ketinggian intelektualnya mampu mentransformasikan politik di Republik Ceko. Dengan menjadi presiden, sumbangan Havel bagi tanah airnya semakin terasa. Tapi kita juga punya contoh Gus Dur yang gagal. Bukan citra Gus Dur yang mengubah politik Indonesia. Sebaliknya, politik Indonesia yang korup, yang penuh intrik, telah mereduksi dan memerosotkan figur Gus Dur. Dengan maju sebagai calon presiden, Cak Nur sedang bertarung dengan citranya sendiri.

Jalan Cak Nur untuk menjadi presiden di tahun 2004 memang masih panjang. Persoalan pertama yang segera ia hadapi adalah mencari partai politik sebagai kendaraan untuk bertarung. Aturannya sudah pasti, menurut UUD 45, yang berhak mencalonkan seseorang untuk jabatan presiden adalah partai politik.

Konstitusi sendiri menentukan bahwa semua partai politik yang berhak ikut pemilu, berhak pula mengajukan calon presiden. Aneka partai baru dan partai kecil, jika memang mereka lolos dalam seleksi awal untuk ikut pemilu, masing-masing dapat memasang calon presiden. Tapi aturan ini sendiri kini masih diperdebatkan dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden.

Selalu ada kemungkinan, partai besar di DPR 'mengkudeta' prinsip itu. Sehingga partai yang layak punya calon presiden hanya partai besar atau gabungan partai yang memenuhi syarat minimal 20% dari total anggota DPR tahun 2004.

Jauh lebih mudah bagi Cak Nur untuk maju sebagai calon, jika aturan konstitusi itu yang diikuti. Partai baru atau partai kecil yang ikut pemilu memang kekurangan tokoh dari partainya sendiri untuk 'dijual' sebagai calon presiden. Dengan segera Cak Nur akan dilirik.

Namun, partai baru atau partai kecil juga memiliki kendala yang serius untuk menjadi kendaraan Cak Nur yang efektif.

Yang membuat seseorang terpilih di era pemilihan langsung tidak hanya kualifikasi pribadi seseorang calon. Partai politik juga berperan sangat besar sebagai mesin efektif untuk kampanye. Partai dengan jaringan politik yang sudah mengakar, dengan dana yang besar, serta SDM yang cakap, akan jauh lebih efektif memenangkan calonnya ketimbang partai baru atau partai kecil. Jika hanya partai kecil yang mencalonkan Cak Nur, niscaya ini pertanda jalan menuju istana Merdeka akan sangat terjal dan mendaki.

Idealnya, yang mencalonkan Cak Nur adalah partai besar. Yang akan dihadapi Cak Nur nanti adalah juara bertahan Megawati dengan seluruh kekuatan jaringan dan dana. Tapi untuk dicalonkan partai besar, banyak pula rintangan. Golkar, misalnya, juga mesti mempertimbangkan kandidat lain, yang juga sama berpeluangnya dengan Cak Nur.

Di Golkar, Cak Nur tidak hanya harus bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Surya Paloh, Yusuf Kalla atau Agum Gumelar. Yang paling berat, Cak Nur mungkin harus pula bersaing dengan Akbar Tandjung sendiri, yang kakinya di Golkar masih sangat kuat. Seandainya Akbar dibebaskan oleh MA di tingkat kasasi atas tuduhan korupsi, mesin politik Akbar segera bekerja. Perjuangan mendapatkan nominasi dari Partai Golkar semakin sulit.

Seandainya pun tahapan pencalonan partai dilewati, dan Cak Nur terpilih sebagai presiden, segera ia menghadapi kendala lain yang tidak kalah besarnya. Ia mewarisi sebuah birokrasi yang sangat lihai dengan korupsi, dan kurang terlatih dengan inovasi. Ia juga mewarisi politik yang semakin terfragmentasi. Ia juga menghadapi kondisi ekonomi yang mungkin semakin parah.

Akan terjadi tarik menarik yang sangat keras antara personalitas Cak Nur dengan kendala makro yang ada. Mungkin saja personalitas Cak Nur akan mengubah watak politik dan ekonomi. Atau sebaliknya,

kendala lapangan secara perlahan tetapi pasti akan mereduksi personalitas Cak Nur, sebagaimana yang terjadi dengan Gus Dur.

Mereka yang khawatir dengan pencalonan Cak Nur sebenarnya khawatir kehilangan Cak Nur yang lama, yang selama ini sudah terlanjur dikenal sebagai guru bangsa. Pertarungan politik dengan seluruh kepentingan dan daya tariknya dikhawatirkan akan ikut mengubah wibawa dan kharisma Cak Nur.

Sebuah negeri memang membutuhkan presiden. Namun, sebuah negeri juga membutuhkan figur guru bangsa. Akan halnya presiden pasti selalu tersedia karena begitu banyak peminatnya, dan selalu ada pemilihan berkala. Namun, guru bangsa tidak dipilih melalui pemilu. Guru bangsa juga tidak bisa direkayasa dan dibangun oleh tim sukses. Guru bangsa lahir secara natural berkat track record dan jejak tindak tanduknya yang memakan waktu lama

Sebagai pribadi, Cak Nur hampir mencapai kualifikasi guru bangsa ideal. Bahkan pengaruhnya jika terus dipupuk dapat melampaui semua presiden. Gandhi di India tidak pernah menjadi presiden. Namun, perannya sebagai guru bangsa membuatnya lebih harum dibandingkan dengan semua perdana menteri India yang pernah ada. Sumbangannya kepada India, bahkan kepada dunia, juga lebih terasa ketimbang semua perdana menteri India digabung menjadi satu.

Tetapi Cak Nur sudah membuat pilihan. Kita hanya dapat berharap, agar dunia politik praktis 'tidak mencuri' Cak Nur yang sudah berperan sangat baik sebagai guru bangsa.

Kompromi Soal Calon Presiden?

PEMILIHAN presiden secara langsung masih lama. Namun, babak awal dari pertarungan ini sudah dimulai. Calon kuat presiden mungkin sudah ada yang tersingkir jauh sebelum pemilu dimulai, karena dikalahkan oleh syarat dan kriteria dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden yang kini tengah diolah

Dua partai terkuat saat ini, dengan jaringan politik, SDM dan dana para pendukungnya, adalah PDIP dan Golkar. PDIP sudah secara tegas mencalonkan ketua umumnya sendiri, Megawati Soekarnoputri. Ketua umum Golkar, Akbar Tandjung masih wait and see. Jika dibebaskan Mahkamah Agung, sangat mungkin akhirnya Akbar Tandjung dinobatkan pula sebagai calon presiden, atau setidaknya calon wakil presiden mendampingi calon presiden partai pemenang pemilu 2004, misalnya.

Namun, baik Akbar Tandjung ataupun Megawati, dua-duanya bisa saja tersingkir jauh-jauh hari. Akbar Tandjung mungkin tersingkir oleh pasal yang melarang sang terdakwa yang diancam hukuman minimal lima tahun untuk menjadi calon presiden ataupun

wakil presiden. Sedangkan Megawati mungkin tersingkir oleh syarat calon presiden minimal harus sarjana.

Cukup menarik, dua partai besar itu kini sedang berhadapan. Atas syarat minimal sarjana untuk calon presiden, Golkar sangat mendukung tetapi PDIP menentangnya. Sebaliknya, untuk larangan terdakwa menjadi calon, Golkar sangat menentangnya. Sebaliknya, PDIP mendukung.

Akankah terjadi kompromi tingkat tinggi antara PDIP dan Golkar? Misalnya, Golkar mengalah soal syarat minimal sarjana? Lalu sebagai kompensasinya, PDIP mengalah soal larangan terdakwa menjadi calon.

Suka atau tidak, semua reformasi undang-undang harus melihat dan memperhitungkan kenyataan politik. Akibatnya, di dunia nyata reformasi memang tidak dapat berjalan secepat di dunia maya dan imajinasi.

Kompromi kadang dilakukan demi selamatnya reformasi itu sendiri. Pilihan politik dalam dunia nyata kadang bukan antara baik dan buruk, tetapi antara buruk dan kurang buruk. Secara pragmatis, sering kali seorang pemimpin memilih melangkah seadanya, ketimbang mandeg sama sekali.

Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan larangan terdakwa dengan ancaman minimal lima tahun menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ini aturan yang normatif dan tanpa diskriminasi. Dalam politik yang sedang hangat dengan sentimen untuk pemerintahan yang bersih, aturan itu punya nilai jual yang tinggi.

Persoalan muncul karena kebetulan ketua umum Golkar Akbar Tandjung, sedang terjerat oleh perkara hukum. Padahal Akbar Tandjung adalah tokoh dengan kapabilitas politik yang sangat mumpuni. Jika ia tidak terjerat hukum, mungkin Akbar Tandjung

adalah tokoh politik dengan skor tertinggi untuk menjadi presiden, diukur dari berbagai kriteria kapabilitas, akseptabilitas dan pengalaman.

Para pendukung kini masih terus berupaya menyelamatkan peluang Akbar Tandjung menjadi calon presiden, atau setidaknya wakil presiden. Mereka tentu punya argumen yang kuat mengapa larangan bagi terdakwa itu harus ditolak. Alasan yang diajukan baik alasan hukum atau alasan empiris.

Alasan hukum bersandar pada prinsip keputusan hukum final. Seorang terdakwa sebelum dijatuhkan hukum secara final, masih ada kemungkinan dibebaskan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Memang benar Akbar Tandjung sudah menjadi tersangka. Terdakwa bahkan sudah divonis oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Namun karena status hukumnya masih mungkin bisa berubah, seluruh hak-haknya selaku warga negara tidak boleh dibatasi. Termasuk hak Akbar Tandjung untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Apalagi contoh empiris di negara demokrasi lainnya. Di Thailand, Thaksin akhirnya terpilih sebagai perdana menteri. Padahal ketika ia maju sebagai calon, status hukum Thaksin juga sebagai terdakwa. Saat itu bahkan pengadilan tingkat pertama sudah pula menjatuhkan vonis bersalah untuk kasus korupsi. Kasus Thaksin menyerupai kasus Akbar Tandjung.

Namun, undang-undang di Thailand membolehkan Thaksin untuk terus maju. Ia pun terpilih sebagai perdana menteri. Karena popularitasnya, rakyat Thailand tidak peduli dengan status Thaksin. Setelah menjadi perdana menteri, pengadilan tingkat tinggi juga membebaskan Thaksin.

Sambil bertahan soal syarat terdakwa, Golkar juga menyerang dengan syarat minimal sarjana bagi calon presiden. Di era normal, sebenarnya juga tidak masalah dengan syarat calon presiden minimal

sarjana. Untuk menjadi camat saja kualifikasi minimal sarjana. Untuk menjadi pegawai rendah di sebuah perusahaan, kualifikasi sarjana juga sering kali diminta. Apalagi untuk menjadi presiden Indonesia yang sedemikian kompleks dan besar.

Syarat ini menjadi masalah karena kebetulan yang menjadi ketua umum PDIP dan kini Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri, hanya tamat SMA. Ia memang pernah mengecap pendidikan di kampus, tetapi tidak tamat. Apa daya, demi menyelamatkan ketua umum partai dan peluang menjadi presiden kembali di tahun 2004, PDIP akan all out menentang persyaratan itu.

PDIP juga punya alasan yang kuat, Politisi Indonesia di masa pergerakan banyak yang belum sarjana. Namun, mereka menunjukkan tingkat intelektualitas yang tinggi dan mampu menjadi pemimpin. Sebut saja, misalnya, Sultan Sjahrir, Haji Agus Salim, dan Adam Malik. Sebaliknya, seperti Sri Bintang Pamungkas dan Deliar Noer, hanya menjadi pemimpin partai gurem.

PDIP melihat pembatasan syarat minimal sarjana bagi calon presiden sebagai manuver tingkat tinggi untuk menjegal Megawati. Karena tidak mampu mengalahkan Megawati dalam pemilihan langsung, dicari jalan pintas menjegalnya di tingkat undang-undang.

Ujung dari pertarungan PDIP dan Golkar sudah dapat diduga. Akan terjadi kompromi atau pertukaran dukungan. Atau istilah kerennya dikalangan aktivis, akan terjadi 'dagang pasal'. Langkah PDIP mencalonkan Megawati akan dimuluskan Golkar dengan menghapus syarat minimal sarjana bagi calon presiden.

Sedangkan langkah Golkar untuk membuka peluang bagi Akbar Tandjung menjadi calon presiden atau wakil presiden dimuluskan juga oleh PDIP dengan menghapus syarat larangan bagi terdakwa yang belum punya kekuatan hukum tetap untuk mencalonkan diri. Mungkinkah ini terjadi?

Fenomena SBY

“AMERIKA Serikat Puas Pada Yudhoyono.” Demikianlah headline besar yang ditulis oleh sebuah koran berbasis di Surabaya pada edisi minggu 21 September 2003. Wartawan koran itu di Amerika Serikat menuliskan laporan pandangan mata kunjungan Susilo Bambang Yudhoyono ke Amerika Serikat. Di sana, Yudhoyono berjumpa dengan aneka pimpinan tinggi, mulai dari Colin Powell sampai Paul Wolfowitz. Ia juga berpidato di hadapan akademi, aktivis LSM, dan pengusaha di USINDO.

Menurut wartawan tersebut, pidato Yudhoyono sering kali memancing tepuk tangan. Secara lugas ia menjelaskan bagaimana Indonesia menghadapi transisi demokrasi. Tidak lupa pula Yudhoyono menjelaskan komitmen Indonesia atas terorisme. Segera Paul Wolfowitz berdiri dan berseru kepada hadirin sekalian; “mari kita toast kepada Yudhoyono yang ikut menjaga transisi demokrasi buat negara Indonesia yang lebih baik.”

Antusiasme dilpomat dan pemimpin negara luar sebagian tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan politik Indonesia terkahir.

Sudah beredar luas bahwa Yudhoyono salah satu kandidat kuat untuk menjadi presiden Republik Indonesia 2004. Ia dianggap seorang heavy weigh contender untuk memimpin negara muslim terbesar di dunia, yang sekaligus oleh pemimpin dunia, dianggap surga terorisme.

Sambutan dunia luar kepada Yudhoyono sebenarnya hanyalah pantulan saja dari gegap gempita pemberitaan media dalam negeri. Bahkan majalah Tempo menjadikan Yudhoyono sebagai cover story. Berbagai lembaga survey termasuk IFES dan IRI, dan terakhir LSI, menemukan data bahwa Yudhoyono menjadi favorit pemilih untuk menjadi alternatif dari Megawati.

Berbeda dengan tokoh lain, Yudhoyono bukan ketua umum partai besar. Ia juga tidak, minimal belum menominasikan diri untuk menjadi presiden. Namun harapan publik atasnya sedemikian hangat. Apa yang membuatnya populer dan berbeda?

Banyak variabel bergabung sekaligus yang membuat Yudhoyono menjadi fenomena. Kapabilitasnya sebagai pribadi, posisi sebagai Menko Polkam, dan kelemahan Megawati. Selain itu kemampuan Yudhoyono memanfaatkan momentum, kosongnya leadership serta harapan publik kepada Yudhoyono adalah hal yang menunjang menjadikan Yudhoyono sebagai fenomena.

Posisi Yudhoyono sebagai Menko Polka memang memberikannya pentas utama. Di bawah komandonya, ia harus menghadapi aneka peristiwa hot yang tengah bergolak. Yudhoyono akhirnya selalu menjadi pusat berita. Ia menjadi sumber tempat wartawan bertanya. Komentarnya segera menjangkau jutaan pemirsa atau pembaca melalui pers nasional.

Sikapnya bahkan melayani jauh melampaui batas negara, terutama jika ia berbicara masalah terorisme yang memang ingin diketahui dunia. Di eranya, tiba-tiba bom meledak di Bali. Ini kasus luar biasa yang hanya dapat dikalahkan oleh Tragedi 11 September.

Puluhan warga asing ikut tewas. Indonesia segera menjadi pusat berita. Muncul aneka analisa sampai spekulasi bahwa Al-Qaidah memindahkan jaringan operasinya ke Asia Tenggara. Posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, dengan aparat yang belum tangguh, ikut pula mencemaskan aneka pemimpin dunia.

Yudhoyono segera menjadi perhatian. Ia ditunjuk presiden untuk menjadi komando utama memerangi terorisme. Dalam waktu yang relatif cepat, pengebom Bali beserta jaringannya diringkus. Atas kerja ekstra dari tim aparat, dibawah koordinasinya, sebuah jaringan penting terorisme di Asia Tenggara dibongkar. Pengadilan atas Bali juga sudah disidangkan.

Selesai bom Bali, muncul pula Bom Marriott. Kembali dunia menoleh. Di samping ada warga asing yang terbunuh, Hotel Marriott sendiri sudah menyimbolkan aura Amerika Serikat. Kembali Yudhoyono tampil untuk memimpin operasi pemberantasan terorisme. Yudhoyono kembali menjadi pusat berita.

Belum selesai masalah terorisme, isu Gerakan Aceh Merdeka terus bergolak. Sejak dua tahu lalu, aneka dialog damai dengan GAM dirintis. Berbagai negara Internasional, termasuk Jepang, menjadi fasilitator Indonesia menghadapi gerakan separatisme di Aceh. Kasus ini membuat Yudhoyono sering kali berinteraksi dengan dunia luar. Publik Indonesia sendiri, melalui pers, tidak pula habis-habisnya mengejar Yudhoyono untuk klarifikasi ataupun untuk mengetahui perkembangan Aceh. Yudhoyono kembali menjadi berita.

Belum selesai masalah Aceh, Papua juga bermasalah. Konflik Papua bahkan sempat pula mendapatkan perhatian Kongres Amerika Serikat akibat adanya warga Amerika Serikat yang terbunuh. Bahkan koran sebesar The New York Times akhirnya terlibat tuntutan hukum dari pejabat tentara Indonesia yang dirugikan. Sekali lagi Yudhoyono menjadi berita karena secara jabatan memang ia yang bertugas.

Memang aneka isu yang hot tidak menjamin bahwa siapapun yang menjadi Menko Polkam pasti akan sama popularnya dengan Yudhoyono. Jika isu besar tidak direspon secara memadai, Menko Polkam justru dapat menjadi sangat tidak populer. Justru banyak sekali pemimpin yang jatuh karena tidak menjawab krisis. Semua isu yang hot adalah isu krisis.

Tetapi mengapa isu krisis itu justru membuat Yudhoyono populer? Itu karena kapabilitasnya dalam komunikasi politik. Dalam setiap tampilannya, Yudhoyono mampu mengesankan sebagai seorang pemimpin yang moderat, santun dan punya solusi. Mengenai Terorisme, ia bahkan berpidato menjelaskan posisi dan rencana ke depan. Mengenai Aceh, tidak jarang Yudhoyono sendiri menulis kolom.

Popularitas Yudhoyono juga turut dibantu oleh kelemahan Megawati sendiri. Sebagai Presiden, seharusnya Megawati lebih sering tampil ke publik, menjadi spoke-person. Publik perlu tahu apa yang terjadi dengan negara ini, ketika militer turun ke Aceh, dan sebagainya. Di negara demokrasi, presiden adalah pusat emosi massa, yang harus terus menerus berdialog dengan publiknya sendiri.

Karena tidak diisi Megawati, ada ruang kosong dalam leadership untuk berdialog dengan publik. Yudhoyono akhirnya mengisi kekosongan itu. Momentum kini sedang berada di tangan Yudhoyono. Dalam posisi yang sudah sangat populer, ia mungkin dijadikan "sasaran tembak" untuk dipangkas. Apalagi menjelang pemilu presiden.

Pemilu 2004 Terancam?

PERNYATAAN yang provokatif itu tidak dibuat oleh aktivis mahasiswa. Bahkan pula pengamat yang sinis dan radikal membuatnya. Tidak tanggung-tanggung, panglima TNI sendiri mengabarkannya dalam sidang DPR yang terhormat. Menurut panglima TNI, ada upaya untuk menggagalkan pemilu 2004.

Sabotase atas pemilu, sambung Panglima Sutarto, dapat dengan cara mengulur-ngulur Undang-Undang Pemilu menjadi judicial review. Atau membentrokkan massa partai. Dapat pula berupa money politics untuk mengacaukan perhitungan suara. Ujung dari upaya itu adalah terciptanya suasana rusuh dan chaos. Dalam suasana itu, kekuasaan akan diambil alih tanpa melalui pemilu.

Segera saya membayangkan situasi itu dalam kasus konkret. Misalkan, momen itu terjadi antara bulan Juli–Oktober 2004. Saat itu dua nama pasangan presiden yang lolos di putaran pertama sudah diumumkan secara resmi. Dua pasangan itu saja yang berhak maju ke babak ke dua pemilu presiden, siapa presiden Indonesia tahun 2004 adalah satu dari dua pasangan tersebut.

Namun dua, pasangan presiden–wakil presiden itu tidak dapat berkampanye dengan mulus. Muncul aneka gugatan dari pendukung pasangan presiden yang kalah. Ditemukan berbagai fakta di lapangan adanya kecurangan dalam pemilu dan penghitungan suara. Tidak hanya satu atau dua pihak yang menggugat, tetapi banyak pihak.

Sebagian meminta penghitungan suara diulang. Sebagian meminta putaran kedua pemilihan presiden ditunda. Sebagian lagi bahkan meminta Mahkamah Konstitusi dan KPU turut tangan untuk membatalkan putaran pertama pemilihan presiden.

Namun the show must go on. Kampanye pemilihan presiden putaran kedua terus dilanjutkan agar sesuai dengan jadwal. Semakin tidak dipedulikan, aksi protes semakin meluas. Berbagai segmen publik, mulai dari mahasiswa, buruh, para pengangguran dimobilisasi. Para elite yang kalah dan pengamat yang simpati pada mereka juga meramaikan suasana.

Meletuplah kerusuhan di berbagai tempat. Terjadi gesekan di akar rumput antar berbagai pendukung calon presiden. Di beberapa tempat, kampanye dihentikan sementara. Pro dan kontra pihak elite akhirnya membuat jadwal pemilu agak tertunda. Suasana akan lebih rumit, jika penundaaan itu melampaui batas periode presiden saat itu.

Muncul pula desakan agar Presiden Megawati yang saat itu masih di tampuk kekuasaan, dan mungkin menjadi salah satu calon yang sedang maju dibacak kedua, untuk demisioner. Puncak dari keresahan itu membelotnya sebagian angkatan bersenjata. Mereka memihak pada elite yang sedang bertikai. Ada percobaan kudeta namun gagal. Muncul pula isu akan ada lagi percobaan kudeta yang lebih besar. Suasana politik nasional menjadi sangat tegang.

Gambaran di atas adalah upaya mendramatisasi ungkapan Panglima TNI Sutarto. Jika skenario buruk di atas terjadi, publik

segera teringat peringatan dini Sutarto. Namun respon yang diberikan sudah terlambat.

Namun satu hal yang pasti. Skenario buruk di atas tidak akan terjadi jika tidak dipenuhinya satu dari tiga variabel berikut. Pertama, militer Indonesia harus terpecah dan memihak kelompok yang bertikai. Jika militer solid dan mendukung pemimpin yang secara legal dan formal masih sah di puncak kekuasaan, politik relatif lebih stabil.

Dapat diingat konflik di era Presiden Gus Dur. Saat itu, kubu Gus Dur dan lawannya berhadap-hadapan. Gus Dur membekukan MPR/DPR dan partai Golkar. Sementara MPR memecat Gus Dur. Walau dipecat, Gus Dur tidak bersedia meninggalkan istana negara. Polisi Indonesia saat itu bahkan juga sudah terpecah.

Jika saja dalam momen itu militer terpecah, habislah Indonesia. Bayangkan saja apa jadinya, jika sebagian personel militer membela Gus Dur dan menangkap Amien Rais. Lalu sebagian lagi membela Amien Rais lalu menangkap Gus Dur. Karena militer Indonesia bersatu dan berpihak pada konstitusi, krisis politik di atas pelan-pelan selesai. Kini Gus Dur dan Amien Rais kembali berangkul untuk menghadang Megawati.

Kedua, ada kesalahan mencolok penyelenggara pemilu dalam perhitungan suara. Kesalahan ini lebih fatal lagi jika ia dapat mempengaruhi perimbangan suara. Katakanlah selisih suara yang diraih para calon presiden di babak pertama sangat dekat. Kesalahan penghitungan suara dapat mengubah dua pemenang teratas. Seharusnya si A dan si B yang maju ke babak kedua, karena ada kesalahan, si C dan si D yang maju.

Kesalahan ini tentu saja menjadi energi besar aneka pihak untuk melawan, karena merasa dizalimi. Jika tidak terjadi kesalahan fundamental dalam penghitungan suara, konflik politik yang tidak signifikan. Boleh jadi tetap akan ada pendukung calon presiden yang

kalah protes. Namun tanpa adanya kesalahan, ketidakjujuran dalam prosedur dan penghitungan suara, protes itu akan segera melemah.

Ketiga, ada protes yang meluas dan keras dari calon presiden yang dikalahkan di babak pertama. Mereka memobilisasi dukungan dan sumber daya. Semakin berpengaruh toko ini, semakin luas pula aksi protes yang dapat digalang. Berbagai isu dilempar oleh calon presiden yang kalah. Isu itu mungkin benar. Isu itu mungkin pula hanya manuver biasa. Maklum, elite politik belum biasa dengan kultur kekalahan.

Begitu banyak partai di Indonesia yang pecah hanya karena elitnya tidak bisa menerima kekalahan. Pihak yang kalah bersaing segera membuat partai tandingan. Partai yang tidak lolos verifikasi Depkeh juga tidak dapat menerima secara ikhlas. Aneka gugatan di buat.

Jika calon presiden kalah menerima kealahannya dengan legawa, suasana politik akan sangat terbantu. Mereka dapat mengikuti tradisi calon presiden Amerika Serikat yang kalah. Secara publik, calon yang kalah itu meminta konstituennya untuk mendukung presiden yang baru terpilih. Ia akan mengatakan, bahwa demokrasi sudah berbicara. Kepada pendukungnya yang kecewa, ia besarkan hati dan menyatakan warga Amerika Serikat perlu bersatu di belakang Presiden Amerika Serikat yang baru, agar Amerika Serika tetap dan semakin jaya.

Singkat kata, jika militer tetap solid mendukung presiden resmi, panitia pemilu netral dan kompeten, serta adanya sikap legawa menerima kekalahan, pemilu 2004 akan aman-aman saja. Memang mungkin ada gangguan di beberapa teritori. Tapi hal itu tidak akan mampu menggagalkan pemilu nasional. Hanya superman yang mampu menggagalkan pemilu nasional. Padahal di Indonesia, tidak ada superman.

Perjalanan Nurcholish Madjid

Di hadapan para hadirin, Cak Nur (Nurcholish Madjid) berbicara terus terang. Ia mengatakan bahwa peluangnya menjadi presiden semakin kecil. Jika dulu peluang itu 70 persen, ujarnya, kini sudah menurun menjadi 51 persen, bahkan peluang itu dapat berbalik dari 51 persen menjadi 49 persen. Diakuinya, banyak dukungan pimpinan partai padanya secara pribadi. Namun untuk dukungan partai secara kelembagaan masih menjadi persoalan.

Walau dengan nada yang semakin pesimis, Cak Nur tetap masih seperti dulu. Ia bicara apa adanya. Ia tetap bersahaja. Ia masih tetap menjadi figur intelektual yang dihormati. Perbedaannya, mungkin saat ini Cak Nur sepenuhnya menyadari bahwa hukum politik praktis lebih rumit daripada yang dikira. Begitu kejamnya politik praktis sehingga tokoh sekaliber Cak Nur dipaksa seperti seorang gadis yang kesepian karena “pinangan dari kekasih” yang diharap tidak kunjung tiba. Belum ada partai yang mengumumkannya sebagai calon presiden.

Kita termasuk orang yang mencintai Cak Nur, tetapi berharap sejak awal, Cak Nur seharusnya tidak tergoda untuk menjadi presiden. Godaan menjadi presiden adalah last temptation bagi Cak Nur untuk menuju kesempurnaan diri. Ini godaan yang terberat justru karena godaan itu penuh tujuan luhur.

Dibalik keinginan menjadi presiden itu, ada harapan untuk ikut menyelesaikan krisis yang dihadapi bangsa. Ada pula keinginan agar moralitas pemimpin semakin menolong bangsa ini keluar dari krisis etika bahkan krisis hukum. Ada pula banyak harapan jika Cak Nur menjadi presiden mungkin kita akan melihat Indonesia yang berbeda dan baru.

Menjadi intelektual yang baik dan menjadi presiden yang berhasil meminta persyaratan yang berbeda. Mereka yang begitu hebat sebagai intelektual belum tentu mahir menjadi presiden. Sebaliknya, mereka yang sukses menjadi presiden, belum tentu pula dapat menjadi intelektual yang dihormati.

Karakter Cak Nur dan keseluruhan kepribadiannya adalah karakter seorang intelektual. Ia selalu mengedepankan perspektif yang strategis dan jangka panjang. Komitmen yang diberikannya adalah komitmen moral. Hal ini semakin pula ditunjang oleh pengetahuan dan kedalaman wawasan Cak Nur. Maka jadilah Cak Nur seorang guru bangsa, yang imbauannya didengar sebagai pihak.

Tidak mudah menjadi guru bangsa. Mungkin jauh lebih mudah menjadi presiden. Setidaknya untuk jabatan presiden, di Indonesia setiap lima tahun akan dipilih presiden baru. Jabatan presiden itu pasti selalu akan terisi. Namun posisi guru bangsa belum tentu selalu terisi. Posisi guru bangsa itu tidak dipilih secara reguler. Kelebihan individual setelah melampaui dan dites oleh waktu yang panjang dan menentukan apakah seseorang dapat dianggap publiknya sebagai guru bangsa.

Karakter seorang presiden, politikus praktis menuntut persyaratan yang berbeda. Apalagi untuk presiden di era transisi. Kondisi politik masih berlumuran “lumpur”. Katakanlah tingkat korupsi di Indonesia berada di level 80 persen. Dalam tataran praktis, level ini tidak bisa diturunkan langsung menjadi 0 persen oleh siapapun yang kelak menjadi presiden. Terlalu banyak pihak akan mengacaukan negeri jika korupsi dibalikkan begitu mudah dan cepat.

Dibutuhkan seorang presiden dengan visi yang jauh namun bersedia berkompromi. Jelas level korupsi itu harus diturunkan, namun mungkin bertahap. Dari level 80 persen, setahap diturunkan menjadi 60 persen, lalu 40 persen, dan seterusnya. Pemimpin praktis itu harus bersedia sedikit berkotor tangan. Dunia praktis dan birokrasi buka dunia ideal. Kita ragukan apakah Cak Nur bisa berkompromi seperti itu.

Menjadi presiden di masa sulit seperti di Indonesia saat ini harus pula mereka yang punya pengalaman memimpin birokrasi. Berbeda dengan dunia intelektual, birokrasi pemerintahan punya “aturan” dan intriknya sendiri. Seorang pemimpin yang berhasil harus benar-benar dan lihai, tahu kapan harus mulai dan kapan harus berhenti. Ia tahu kapan harus menjual, dan kapan harus membeli.

Pengalaman Cak Nur di Golkar menunjukkan karakter Cak Nur yang matang sebagai intelektual, namun naif sebagai politisi. Ia matang sebagai intelektual karena Cak Nur tampil sangat elegan secara konseptual. Ia kemukakan apa yang menjadi platformnya. Umumnya ucapan Cak Nur tentang politik sangat visioner.

Namun pada saat yang sama terasa pula kenafian Cak Nur sebagai politisi. Ia misalnya selalu cepat melangkah ke Golkar. Akibatnya, bukan Golkar yang akhirnya melamar Cak Nur, tetapi Cak Nur yang melamar Golkar. Di tengah jalan, terasa pula betapa Cak Nur ragu-ragu, maju dan mundur. Padahal sebagai politisi, sejak awal ia harus mengesankan seorang yang tegas dan sadar lapangan.

Jika dalam menghadapi Golkar saja, ketidaktegasan, keraguan, ketidaksiapan Cak Nur sudah tampak, apalagi jika nantinya Cak Nur menghadapi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jauh lebih dahsyat dibandingkan di Golkar, "ular" dan "harimau" dalam belantara Indonesia jauh lebih banyak. Padahal siapapun yang ingin memimpin Indonesia di masa krisis ini harus sudah menjadi politisi yang lihai dan matang di hari pertama ia dilantik. Tidak ada waktu lagi untuk belajar.

Kita mengemukakan hal ini justru karena wujud kecintaan pada Cak Nur. Jelaslah Cak Nur adalah the right man. Namun jabatan presiden bukanlah the right place bagi Cak Nur. Bangsa ini memerlukan Cak Nur sebagai guru bangsa, sebagai bagian dari kekuatan masyarakat, sebagai perekat berbagai komunitas, serta pemberi arah dan penguatan moral.

Jabatan presiden biarlah diserahkan kepada mereka yang karakternya memang sekelas politisi praktis yang lihai. Cak Nur dan pendukungnya harus melihat bahwa ambisi menjadi presiden itu semacam godaan yang paling canggih, yang justru dapat menjatuhkan Cak Nur sendiri. Kita yang mencintai Cak Nur seharusnya ramai-ramai mengembalikan Cak Nur sebagai guru bangsa saja.

Teramat sayang jika kini Cak Nur masih menunggu pinangan partai politik. Semakin lama ia menunggu, semakin buruk efeknya bagi citra Cak Nur sendiri. Ia seolah menjadi tokoh yang antiklimaks, seperti menunggu Godot. Jauh lebih baik jika dalam waktu dekat Cak Nur membuat pengumuman yang lebih tegas dan berani, bahwa ia mundur dari calon presiden. Ia umumkan pula bahwa ia ingin kembali ke habitatnya yang asli sebagai intelektual.

Pertarungan Tiga Soekarnoputri?

DARI 24 partai yang menjadi peserta pemilu, ada yang mencolok mata. Hampir semua ketua umum partai adalah para pria. Ini semakin menandakan politik di Indonesia memang politik kaum pria. Dari 24 partai itu, hanya ada tiga partai yang ketua umumnya wanita. Lebih unik lagi ketiga wanita itu menyandang nama belakang yang sama, Soekarnoputri. Yang satu Megawati Soekarnoputri, yang lainnya Rachmawati Soekarnoputri dan Sukmawati Soekarnoputri.

Tiga srikandi itu tampak mentereng di dunia politik kaum pria. Muncul seloroh, bahwa kaum wanita jangan mencoba menjadi ketua umum partai politik dan lolos KPU, kecuali jika di belakang namanya ada tambahan "Soekarnoputri". Muncul pula pertanyaan, jika tidak menyandang Soekarnoputri, akankah ketiga wanita ini diperhitungkan dalam politik kaum pria?

Sekitar 40 tahun setelah jatuhnya Bung Karno, semakin terasa betapa mengakar tokoh itu. Tiga Soekarnoputri yang mentas dalam panggung politik nasional menandakan munculnya "darah biru"

dalam politik Indonesia. Para putra dan putri, bahkan para menantu dan cucu Bung Karno secara otomatis mempunyai bobot politik.

India punya klan Nehru. Setelah selesai periode Nehru mendominasi India, darah biru politik di India diteruskan oleh putrinya Indira Gandhi. Indira turun tahta, muncul cucu Nehru atau putra Indira, Rajiv Gandhi. Setelah Rajiv terbunuh, menantunya pun, Sonya Gandhi tampil menjadi pemimpin partai Kongres.

Perbedaannya, di India, penerus darah biru Nehru cukup tertata. Ada mekanisme kesepakatan keluarga, penilaian handai taulan, dan dukungan publik yang menentukan siapa memperoleh “berkah” darah biru itu.

Di Indonesia, penerus darah biru Bung Karno tampaknya harus diperebutkan, Tiga Seokarnoputri sekaligus memimpin partai yang berbeda dan bersaing. Keluarga besar Bung Karno, pendukungnya dan handai taulan semakin sulit menyembunyikan rivalitas, terutama antara Megawati dan Rachmawati. Berulang kali terjadi, kader yang kecewa dengan Megawati lompat pagar ke partai Rachmawati. Bahkan dengan terbuka Rachmawati tidak segan–segan mengkritik kakaknya sendiri, menganggap gagal, bahkan memintanya mundur dari jabatan publik.

Konflik Megawati dan Rachmawati membawa implikasi politik tidak hanya dalam kehidupan pribadi mereka berdua. Implikasi yang paling besar dan signifikan adalah terbelahnya segmen pendukung politik kebangsaan.

Selama ini Megawati dan PDIP diuntungkan secara politik oleh solidnya komunitas wong cilik dan nasionalis. Memang banyak tokoh lain yang juga muncul di komunitas ini. Banyak pula partai yang berdiri dengan memakai jargon wong cilik, kebangsaan, Islam abangan, Seokarnoisme ataupun Marhaenisme. Namun Megawati dan PDIP praktis mendominasi komunitas ini tanpa saingan berarti.

Tampilan Rachmawati dan Partai Pelopor di barisan oposisi dapat mengubah konstelasi politik. Sebagaimana Megawati, Rachmawati juga menyandang nama besar Soekarnoputeri. Bahkan lebih dari Megawati, Rachmawati dapat meyakinkan publik luas bahwa ia tidak hanya anak biologis Soekarno, tetapi juga anak ideologisnya. Sedangkan Megawati dianggap Rachmawati sudah mengkhianati ideologi Soekarno.

Operator politik dari kalangan yang berseberangan dengan PDIP menyambut baik kehadiran Rachmawati. Munculnya Rachmawati di kancah politik akan membagi suara kalangan politik nasionalis. Suara yang tadinya disalurkan ke PDIP, sangat mungkin sebagian hijrah ke Partai Pelopor. Jika ini terjadi, sangat mungkin PDIP tidak lagi menjadi partai besar.

Sebaliknya, operator politik dari paham nasionalis tentu sadar konsekuensi pecahnya keluarga Bung Karno dalam politik praktis. Dalam upaya memenangkan platform nasionalis, ada upaya untuk kembali mengharmoniskan Megawati dan Rachmawati. Setidaknya, keduanya berada dalam barisan yang sama, yang selanjutnya diharapkan dapat berkoalisi.

Persoalan, perbedaan keduanya cukup lebar. Ada perbedaan persepsi yang tajam dikalangan lingkaran utamanya mengenai konsep politik dan ekonomi wong cilik. Perbedaan konsep ini sulit didamaikan.

Rachmawati masih dipengaruhi oleh paham populisme yang berkembang sejak tahun tiga puluhan. Fungsi negara, pemerintah, bahkan partai politik, menurut paham ini untuk menjamin kesejahteraan rakyat banyak, terutama wong cilik.

Negara tidak boleh hanya bersikap netral dan membiarkan kompetisi berjalan apa adanya. Harus ada pemihakan dari negara untuk lebih membela wong cilik, mengingat mereka adalah mayoritas

dan mereka adalah yang terlemah. Program kesejahteraan seperti subsidi diperkenalkan. Wong cilik mendapatkan kemudahan dalam soal perumahan, makanan, obat-obatan sampai dengan pendidikan. Subsidi ini ditanggung oleh pemerintah.

Kebijakan ini di dunia Barat sendiri sudah mengalami revisi. Beban negara menjadi sangat berat. Di negara Amerika Latin bahkan sudah muncul pula revisi yang radikal atas politik ekonomi wong cilik, dengan mengenalkan istilah New Populism. Dalam New Populism, justru subsidi harus dikurangi secara bertahap. Ekonomi secara gradual harus bersandar kepada kompetisi bebas. Peran negara semakin lama hanya semakin menjadi wasit.

Megawati semakin mengarah kepada New Populism. Kelompok ekonomi dalam kabinet umumnya teknokrat yang pro kepada ekonomi pasar. Rasionalitas dari ekonomi pasar memang sangat kuat. Sekarang ini, mazhab ekonomi pasar yang menguasai dunia, terlebih lagi sejak hancurnya aneka negara komunis. Jargon subsidi untuk wong cilik justru dianggap sebagai kanker yang ganas oleh mazhab ini.

Apabolehbuat,secaraideologiagaknyaMegawatidanRachmawati memang sudah berbeda. Kini persetujuan mereka diramaikan pula oleh Soekarnoputri yang lain, Sukmawati. Sungguh pun sama-sama menyanggah nama Soekarno, sama-sama anak Biologi Bung Karno, namun lingkaran terdekat keduanya punya persepsi yang berbeda tentang apa yang harus diambil dan direvisi dari Bung Karno. Pemilu 2004 adalah ajang pembuktian guna menentukan siapa di antara tiga Soekarnoputri itu yang lebih didukung publik luas.

**BAGIAN KETIGA
KE ARAH RESOLUSI
KONFLIK ACEH**

Nyanyian Sedih di Aceh

NYANYIAN sedih yang paling panjang mungkin akan kembali terdengar di Aceh. Dengan segala upaya, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono memilih solusi damai bagi kemelut Aceh. Namun jika rintangan terlalu banyak, pilihan damai Menko Polkam akan semakin tidak populer. Penumpasan militer akan kembali diidolakan. Darah dan air mata akan pula kembali mengalir deras.

Perkembangan terakhir, ribuan massa mengamuk di Tankengon, ibukota kabupaten Aceh Tengah. Mereka merusak kantor, membakar mobil dan memukuli beberapa personil monitoring Joint Security Committee (JSC, Komite Keamanan Bersama). JSC menjadi wadah bersama pemerintah Indonesia, pihak asing dan pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Lembaga ini bertugas memonitor dan mengawal seluruh tahapan proses damai yang disepakati. Bahwa lembaga itu akan menjadi soko guru proses damai di Aceh tampaknya belum dipahami dan disosialisasikan kepada publik luas di Aceh. Sebaliknya, lembaga itu justru menjadi sasaran amuk dan kemarahan massa.

Dirusaknya kantor JSC bukanlah kerikil dan ujian pertama dalam proses damai. Sebelumnya, tujuan dari solusi damai pemerintahan Indonesia sudah pula didistorsikan dan disosialisasikan secara salah. Banyak oknum yang mengabarkan bahwa ujung dari solusi damai ini adalah kemerdekaan Aceh, bukan kembalinya Aceh dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran lembaga asing dan penarikan bertahap tentara Indonesia juga diberikan arti yang berbeda. Aksi itu tidak dikomunikasikan sebagai upaya memperluas koridor damai, sehingga secara bertahap Aceh normal kembali tanpa perlu diawasi oleh pihak bersenjata di setiap sudut jalan.

Sebaliknya, aksi itu disosialisasikan sebagai prosedur bertahap bagi keluarnya Indonesia dari Aceh. PBB dikesankan akan menggantikan posisi Indonesia sampai Aceh siap untuk berdiri sendiri dan merdeka. All inclusive dialog yang menjadi bagian sentral proses damai, juga didistorsikan sebagai referendum bagi rakyat Aceh untuk bebas memilih Aceh merdeka.

Memang tidak ada jalan cepat bagi solusi kemelut di Aceh. Ketika pemerintah menegaskan komitmen mencari solusi damai, kita tahu bahwa itu adalah pilihan yang benar, walau tidak mudah. Begitu banyak kerikil, rawa-rawa bahkan jurang yang merintang jalan damai. Berbagai upaya damai, sengaja ataupun tidak, disalah pahami dan disosialisasikan secara berbeda bahkan bertentangan dengan kesepakatan.

Pihak yang tidak sabar dengan solusi damai, yang tidak lagi toleran dengan segala bentuk distorsi dan manipulasi, akan tergiur untuk segera pindah haluan. Solusi militer segera disiapkan untuk menumpas GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Pilihan solusi militer itu kini semakin kuat setelah jalan damai dinilai semakin sulit, atau bahkan mustahil. Apalagi solusi militer juga memiliki argumen yang kuat.

Menurut argumen yang pro pendekatan militer, pemerintah jangan pernah toleran terhadap pemberontakan bersenjata. Sangat jelas, GAM adalah pelopor pemberontakan bersenjata terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan harus dihadapi secara berbeda dibandingkan dengan protes biasa. Di alam demokrasi, aksi protes dianggap lazim dan tidak boleh dihadapi secara militer sejauh aksi itu berlangsung damai. Tetapi, juga di alam demokrasi, pemberontakan boleh ditumpas secara militer. Apalagi jika pemberontakan itu sudah terbukti menumpuk senjata dan menggunakannya untuk perjuangan mereka.

Bahkan di Amerika Serikat, sekte keagamaan David Koresh juga diserbu dengan kekerasan. Padahal sekte agama itu belum mendeklarasikan pembentukan negara baru. Sekte agama itu baru dalam tahap penumpukan senjata. Mereka baru menunjukkan ketidakpedulian kepada hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Setelah diberikan beberapa kali peringatan, kawasan sekte itu diserang. Begitu banyak pihak yang mati, termasuk pimpinannya, David Koresh. Publik memahami serangan itu sebagai tindakan yang memang seharusnya.

Berdamai dengan pemberontak dianggap juga akan membuat preseden buruk. Selama ini, pemerintah Indonesia dianggap keliru menghadapi GAM. Seolah-olah GAM diperlakukan seperti layaknya sebuah negara, yang mendapat kehormatan berdiri sejajar dengan pemerintah Indonesia. Lalu pihak asing diundang menjadi mediator bagi dua belah pihak yang bertikai.

Jika upaya ini diteruskan, pemberontak di wilayah lain akan mendapat insentif yang sama. Mereka akan memberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu mereka berharap pemerintah Republik Indonesia memberlakukan mereka sebagaimana memperlakukan GAM. Sebaliknya, jika GAM ditumpas dengan cara kekerasan dan cara militer, ia juga akan menjadi percontohan bagi pemberontak lain. Penumpasan militer akan membuat jera pemberontak lainnya.

Menurut pandangan militeristik, pemerintah jangan pula pernah punya ilusi memadamkan aspirasi nasionalisme lokal. Sentimen kemerdekaan di Aceh, bagi sebagian orang adalah sentimen tertinggi. Apalagi sentimen itu didukung oleh berbagai keuntungan. Jika Aceh merdeka, mereka menduga Aceh akan sekaya Brunei Darussalam. Jika Aceh merdeka, mereka bahkan bebas pula membentuk Negara Islam. Aspirasi ini tidak dapat ditaklukan oleh solusi damai. Satu-satunya cara mengalahkan aspirasi itu adalah menaklukkannya secara militer.

Kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap harus lebih tinggi ketimbang kecintaan kepada proses damai.

Kita memahami sulitnya tugas yang kini dipikul Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono. Luas diketahui, Menko Polkam menjadi arsitek utama solusi damai buat Aceh. Segala sumber daya, leadership dan karir politik sudah ia pertaruhkan untuk menempuh jalan damai. Dalam posisi yang sekarang, Menko Polkam sudah melakukan apa yang terbaik dari apa yang mungkin. Aceh memang terlalu rumit jika hanya dipikul oleh Menko Polkam dan jajarannya saja.

Kini begitu banyak kerikil yang merintang jalan damai. Pihak sipil di Aceh, ataupun bagian lain Indonesia, mesti lebih melibatkan diri dalam solusi damai itu. Jika tidak, demi tegaknya NKRI, pendekatan militer akan kembali di atas angin. Nyanyian pilu akan kembali terdengar dari Aceh, mengalun dan sangat menyayat hati.

Pro-NKRI di Aceh?

IBARAT gadis, kini Aceh sedang menangis tersedu. Konflik tidak kunjung selesai. Presiden sudah berganti beberapa kali. Namun, air mata, darah, kekecewaan, terus berbau menjadi satu di tanah Aceh. Begitu banyak keluarga yang hidup mencekam, bahkan mengungsi. Begitu banyak ibu yang kehilangan anak; istri kehilangan suami; dan anak-anak kehilangan orang tua.

Perubahan nasib Aceh hampir saja terjadi. Atas kegigihan dan leadership Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, kesepakatan penghentian permusuhan antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sudah disepakati. Berbagai tahap menuju damai sangat rapih dan bagus secara konseptual. Entah mengapa, untuk alasan yang belum sepenuhnya jelas, proses damai itu kembali terancam gagal.

Yang penting bagi Aceh, sebenarnya, bagaimana masyarakatnya dapat tumbuh sejahtera dan aman. Apakah persoalan GAM diselesaikan secara damai, ataukah harus ada serangan militer, itu

hanya masalah metode. Sebuah metode tidak pernah diberhalakan, karena banyak metode menuju tujuan, sebagaimana seribu jalan menuju Roma. Sejauh metode itu dapat dibenarkan dalam negara demokrasi, perubahan metode dalam kasus Aceh tidak menjadi masalah.

Pemerintah Republik Indonesia dapat saja mencari metode lain demi tercapainya kesejahteraan dan keamanan Aceh, ataupun utuhnya teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalannya, metode baru yang ingin diterapkan harus benar-benar efisien dan efektif. Aceh hanya dapat diselesaikan jika GAM tidak hanya ditundukan secara militer, namun pikiran dan hati penduduk Aceh harus pula disentuh dan direbut.

Agaknya, disinilah penyebab kegagalan berbagai metode yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan konflik dan persoalan di Aceh. Yaitu absennya kelompok masyarakat yang besar dan mengakar di Aceh, yang hati dan pikirannya berjuang untuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Di manakah sembunyiya civil society di Aceh yang pro-NKRI, yang menggelorakan bendera merah putih, dan mempengaruhi penduduk Aceh lainnya untuk cinta tanah air Indonesia? Dari civil society di Aceh, yang sering terdengar hanya GAM dan SIRA. Kita tahu GAM punya agenda politik yang berbeda. Kelompok ini justru ingin mempengaruhi penduduk Aceh agar lepas dari NKRI dan terpisah menjadi negara merdeka. Sedangkan SIRA lebih moderat. Kelompok ini selalu mendengungkan referendum agar rakyat Aceh menentukan masa depannya sendiri, ingin bergabung kepada NKRI atau merdeka.

Kita tidak mendengar hadirnya civil society di Aceh yang menjadi lawan setanding untuk menghadapi GAM dan SIRA. Kita tidak merasakan munculnya kelompok masyarakat yang cukup terorganisir di Aceh, yang berkampanye sebaliknya. Kelompok ini misalnya mempropagandakan dengan sepenuh hati dan pikiran, bahwa masa

depan Aceh ada bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh tidak perlu merdeka. Bahkan Aceh tidak perlu referendum.

Jika proses damai yang dibangun Menko Polkam ingin dikoreksi, setidaknya ada satu variabel yang perlu diperhatikan. Metode baru harus ikut menumbuhkan dan memfasilitasi lahirnya kelompok masyarakat Aceh sendiri, yang dengan pikiran dan hatinya, punya agenda yang sama dengan pemerintah pusat. Aceh tidak bisa dimenangkan hanya melalui organ pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aceh hanya selesai jika ada civil society yang kuat dan mengakar, lalu bersama-sama pemerintah pusat dan pemda Aceh berjuang untuk NKRI.

Pertanyaannya, mengapa civil society pro NKRI tidak tumbuh kuat di Aceh? Ada dua kemungkinan. Pertama, pemerintah salah menduga politik GAM. Dengan ditanda-tanganinya proses damai 9 Desember 2002 oleh GAM sendiri, pemerintah menduga GAM dengan sungguh-sungguh akan patuh pada tahapan yang disepakati. Bukankah GAM adalah kelompok yang paling terorganisir di Aceh? Apalagi kelompok ini bersenjata pula.

Pemerintah mungkin merasa tidak lagi perlu memobilisasi atau memfasilitasi secara signifikan tumbuhnya civil society di Aceh yang pro-NKRI. Apalagi sudah ada pemda Aceh yang bertugas di sana. Ada pula Joint Security Committee yang punya elemen negara asing sebagai pengawas. Dengan semua ini pemerintah merasa civil society di Aceh bukanlah kebutuhan mendesak dalam konteks resolusi konflik. Dengan semua ini, tanpa civil society pemerintah tampaknya yakin bahwa pelan-pelan proses damai menuju otonomi khusus akan terjadi juga.

Kemungkinan kedua, pemerintah sendiri sudah memobilisasi dan memfasilitasi sebisanya agar lahir civil society di Aceh yang pro-NKRI. Namun, kondisi lapangan sudah sedemikian sulit. Kemarahan kepada pemerintah pusat sudah sedemikian tinggi. Bahkan pemerintah

daerah Aceh, mulai dari gubernur sampai bupati dianggap sebagai antek kolonialisme Jawa.

Secara seporadis, mungkin ada kelompok kecil yang longgar di Aceh yang mencoba berkampanye melawan GAM dan SIRA. Namun kelompok ini segera padam karena tekanan lingkungan. Kelompok itu segera bertabrakan dengan mainstream dan dianggap pengkhianat. Akibatnya civil society di Aceh yang menantang GAM ataupun SIRA tidak pernah tumbuh kuat dan terorganisir. Kondisi ini sudah di luar kemampuan pemerintah Republik Indonesia.

Kita tidak tahu, yang mana dari dua kemungkinan di atas yang benar. Atau bisa juga, gabungan dari dua kemungkinan itu. Tapi setidaknya pemerintah semakin memiliki pengalaman yang bertambah kaya. Belajar dari kesalahan dan kegagalan aneka metode sebelumnya, maka metode baru harus mulai berfikir untuk memobilisasi civil society pro-NKRI

Aceh tidak pernah dapat dimenangkan hanya dengan penaklukan militer. Namun, tentu saja penaklukan militer perlu untuk memperlemah gerakan bersenjata yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Untuk menaklukan Aceh, pemerintah perlu memenangkan the hearts and the minds dari penduduk Aceh sendiri. Namun, pemerintah pusat, pemerintah daerah apalagi militer, mustahil dapat memenangkan the hearts and the minds dari penduduk Aceh.

Siapa yang dapat memenangkannya? Tidak lain dan tidak bukan, civil society pro-NKRI yang terdiri dari orang-orang Aceh sendiri. Kelompok inilah yang akan mengkampanyekan atau membujuk penduduk Aceh lainnya, bahwa masa depan Aceh berada dalam pangkuan NKRI. Pemerintah dapat mulai mengumpulkan tokoh masyarakat Aceh yang moderat untuk mulai membangun civil society itu.

Menimbang Pemimpin Aceh

Terdorong oleh kemungkinan serangan militer ke Aceh, Ketua Umum Muhammadiyah, Syafe'i Maarif, memberikan rekomendasi yang perlu diberikan catatan kaki. Menurutnya, agar solusi damai di atas Aceh lebih terjamin, sebaiknya komando yang menangani Aceh berasal dari kalangan sipil saja, bukan militer baik yang aktif ataupun purnawirawan. Bahkan Syafe'i Maarif menyebut nama tokoh sipil itu, Yusuf Kalla. Ia menyarankan Presiden Megawati secara langsung menunjuk Yusuf Kalla. Untuk kasus konflik di Poso, ujarnya, Yusuf Kalla tergolong sukses.

Sekilas, tidak ada yang salah dengan pernyataan Syafe'i. Sipil terkesan cenderung solusi damai. Sedangkan militer, bahkan purnawirawan, dekat dengan nuansa senjata, kekerasan dan perang. Namun, jika diteliti lebih dalam, jelas Syafe'i telah memberikan diagnosa yang keliru. Akibatnya, penyakit yang kompleks itu diberikan obat yang salah. Bisa jadi, penyakitnya justru bertambah parah.

Apakah kasus Aceh diselesaikan dengan solusi damai atau harus juga dengan serangan militer, sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah komando yang menangani Aceh dipimpin oleh seorang sipil atau militer. Jelaslah ini sebuah analogi yang berbahaya dan menyesatkan jika mengasosiasikan pimpinan sipil dengan jalan damai dan pimpinan militer dengan jalan perang.

Kasus perang Amerika Serikat versus Irak masih segar dalam ingatan. Yang mempengaruhi Pentagon dan Gedung Putih untuk menyerang Irak adalah Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld dan wakilnya Paul Wolfowitz.

Empat bulan sebelum serangan, bahkan think thank, American Enterprise Institute sudah pula menyelenggarakan seminar Irak paska Saddam Hussein. Kita tahu, semua mereka adalah tokoh sipil, bahkan tokoh-tokoh intelektual pula.

Kelompok sipil Neo-Kons inilah yang mendorong Presiden George Bush untuk menyerbu Irak. Kelompok sipil ini pula yang menyusun kebijakan pre-emptive doctrine. Kelompok sipil ini pula yang menganjurkan Presiden Bush untuk mengabaikan keberatan PBB. Maka perang pun terjadi.

Sebaliknya, mantan jenderal militer dalam pemerintahan Amerika Serikat adalah Collin Powell, menteri luar negeri. Ia pernah menjadi salah satu pimpinan militer Perang Teluk di awal tahun 1990-an, di bawah komando PBB. Publik juga tahu, justru purnawirawan ini yang memilih solusi moderat. Berkali-kali ia menganjurkan Presiden Bush untuk tidak menyerang Irak secara militer. Ia berupaya mengerahkan PBB secara multi-lateral melucuti senjata pemusnah massal Irak secara damai.

Para ahli dalam menelaah kebijakan Gedung Putih melihat ada perbedaan tajam antara lingkaran terdekat Bush. Para pencinta solusi multilateral diberi nama sayap merpati. Colin Powell yang

purnawirawan justru di masukan kedalam solusi damai itu. Sebaliknya, pimpinan sipil Donald Rumsfeld dan Paul Wolfowitz dikategorikan sebagai sayap elang, pencinta jalan perang.

Solusi damai atau solusi perang tidak ada hubungannya dengan status sipil atau militer sang pemimpin. Syafe'i Maarif telah melakukan kesalahan fatal dalam logika berupa kekeliruan generalisasi.

Kedua, tidak bisa pula membandingkan konflik Poso dengan konflik Aceh. Dua konflik itu berbeda dalam karakter. Konflik di Poso hanyalah fenomena politik reformasi yang dilandasi oleh pertikaian horisontal antar agama, atau kadang antar etnis.

Sementara konflik di Aceh bukan konflik horizontal. Tidak ada perang antar pendukung agama di Aceh. Yang terjadi adalah konflik vertikal, kehendak memerdekakan diri yang sudah berusia lebih dari dua puluh tahun. Jauh sebelum politik reformasi, Gerakan Aceh Merdeka sudah tumbuh dengan subur. Bahkan sebelum lahirnya Orde Baru di tahun enam puluhan, kekecewaan kolektif Aceh atas pemerintah pusat sudah pula meluas.

Untuk satu kasus konflik Aceh, justru pimpinan militer yang purnawirawan dan moderat mungkin lebih bisa menangani faksi di tubuh militer sendiri. Diketahui luas, untuk kasus Aceh, ada faksi garis keras di tubuh militer. Karena kecintaan atas NKRI atau motivasi lain, garis keras ini memang ingin menumpas GAM secara militer secepat-cepatnya.

Dalam era transisi demokrasi yang belum sepenuhnya mapan, justru tokoh sipil lebih sulit mengatasi garis keras militer ini. Tokoh moderat dari kalangan militer sendiri, seperti SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) justru lebih berpeluang mampu mengatasinya. Di mata faksi garis keras, SBY dianggap masih bagian dari keluarga besarnya sendiri. Resistensi atas SBY tidak akan sebesar resistensi atas tokoh sipil lain yang menentang jalan perang.

Dikotomi sipil militer tidak lagi tepat digunakan untuk membaca kecenderungan perang atau watak sebuah rezim. Begitu banyak tokoh sipil yang menjadi diktator. Begitu banyak pula tokoh militer purnawirawan yang dapat menjadi pimpinan, bahkan presiden yang baik, seperti terjadi di Amerika Serikat.

Khusus soal Aceh, persoalan damai itu terletak pada longgarnya kesepakatan itu. Siapapun yang memimpin delegasi, baik ia sipil atau militer, akan menghadapi hal yang sama. Pihak yang bertikai akan menerjemahkan isi perjanjian itu sesuai dengan kepentingan dan aspirasi politiknya masing-masing. Perjanjian damai kurang dikunci dengan prinsip-prinsip tegas yang tidak lagi bisa diinterpretasikan.

Dalam waktu dekat Joint Council akan bersidang. Kita harap solusi damai masih dimungkinkan. Namun, tentu saja harus ada amandemen yang radikal atas isi perjanjian. Misalnya, harus dinyatakan bahwa ujung dari proses damai ini adalah otonomi khusus dalam naungan NKRI. Proses damai hanya diberikan wewenang untuk memodifikasi otonomi khusus itu. Sehingga, sejak awal, sudah tidak ada pilihan Aceh Merdeka atau referendum.

Dalam perjanjian itu harus pula dinyatakan dengan tegas soal hukum bagi aspirasi Aceh Merdeka. Dalam proses damai, menyebarkan sentimen Aceh Merdeka bukan bagian dari hak asasi, tetapi bagian dari kejahatan terhadap negara. Semua tindakan yang berhubungan langsung dengan konsolidasi Aceh Merdeka harus dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian, bukan interpretasi lain yang sah dari perjanjian.

Hanya dengan kunci-kunci seperti di atas, proses damai ini benar-benar efisien menggiring Aceh menuju otonomi khusus dalam pangkuan NKRI. Jika proses damai itu hanya menjadi penundaan saja dari serangan militer di kemudian hari.

Menjangkau Hasan Tiro

BAYANGKAN skenario berikut. Hari itu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan pernyataan yang sangat penting bagi Indonesia. Hasan Tiro dan kelompoknya GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dinyatakan sebagai tokoh utama dan organisasi teroris internasional. PBB kemudian menyerukan, agar semua anggotanya, termasuk Indonesia dan Swedia mengambil tindakan yang diperlukan.

Maka semua aliran dana menuju GAM, bahkan yang keluar dan masuk ke rekening Hasan Tiro dikontrol secara ketat. Tanpa dana, GAM menjadi ikan yang kehabisan air tempatnya berenang. Operasi gerakan ini akan terbatas. Semua kegiatan politiknya, terutama penumpukan senjata, tidak lagi dapat ditambah.

Pemerintah Swedia bahkan diminta untuk menindaklanjuti pegumuman PBB. Sebagai anggota yang disiplin, Swedia bahkan dilarang melindungi Hasan Tiro dan pemimpin teras GAM lainnya, yang kini berwarga negara Swedia. Indonesia dapat terus mendesak

PBB dan pemerintah Swedia untuk mengadili Hasan Tiro atas semua tuduhan kekerasan dan terorisme yang dilakukannya.

Label gerakan terorisme internasional bagi GAM dan Hasan Tiro menjadi pukulan moral yang sangat telak dan mematikan. Label itu bahkan lebih dahsyat efeknya dibandingkan serangan militer pemerintah terhadap GAM sekalipun. Spirit pimpinan dan aktivis GAM lainnya, yang punya mental pejuang, akan jatuh.

Pada saat yang sama, pemerintah juga terus membujuk pimpinan dan Aktivis GAM lainnya untuk membelot. Tengku Amri menjadi model yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pemerintah Indonesia memberikan pilihan yang sangat hitam putih kepada pimpinan GAM. Apakah mereka ingin diburu selaku teroris? Ataukah mereka ingin diampuni sebagaimana Tengku Amri, dan diberikan insentif khusus.

Langkah diplomatik untuk menjangkau Hasan Tiro saatnya dipertimbangkan secara sangat serius oleh pemerintah. Ular jauh lebih mudah dikendalikan jika kepalanya terpegang. Badan dan kaki ular akan ikut pula terkontrol. Jika Hasan Tiro mampu dijangkau dan dikendalikan, GAM dalam waktu cepat akan lumpuh.

Jangan lupa usia GAM sudah lebih dari dua puluh lima tahun. Indonesia sudah mengganti empat presiden. Namun GAM tetap tidak bisa dilumpuhkan. Aneka strategi sudah dicoba pemerintah sejak era Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi. Pemerintah pernah melakukan aksi militer sangat keras seperti DOM di era Orde Baru. Sebaliknya, pemerintah juga pernah mencoba jalan damai yang sangat konseptual, seperti kerangka CoHA, yang sekarang ini dilakukan.

Namun, selama dua puluh lima tahun itu, GAM tidak kunjung lumpuh. Sebaliknya, GAM kini semakin kuat. Dilihat dari personel dan pucuk senjata yang dikuasainya, postur GAM bertambah kekar. Pada saat yang sama, GAM masih pula menuntut Aceh Merdeka.

Semata-mata kembali meyerang GAM secara militer tidak lagi

memadai. Aneka terobosan harus dilakukan, operasi militer dan kepolisian tetap dibutuhkan. Namun, GAM tidak bisa dihadapi sebagaimana dalam perang biasa. Personil GAM menyatu dengan rakyat Aceh. Strategi perang gerilya membuat GAM sangat sulit ditumpas.

Tidak heran, walau hanya beranggotakan ratusan atau ribuan personel, GAM tidak kunjung MATI. Sebaliknya, taktik perang gerilya dapat membuat aparat militer frustrasi di lapangan. Akibatnya tindakan brutal dapat terjadi yang membumi hanguskan sebuah lokasi. Penduduk sipil menjadi korban.

Jika pemerintah pernah gagal dengan operasi militer di era DOM, tidak ada juga jaminan pemerintah tidak gagal lagi dengan operasi militer saat ini. Selama didukung oleh masyarakatnya, selama itu pula GAM sangat sulit ditumpas tanpa ikut menumpas rakyat sipil tidak berdosa di Aceh.

Dalam kontruksi politik seperti ini, pemerintah dapat mengupayakan agar GAM dibenci oleh masyarakat Aceh sendiri. Semua strategi ke arah itu mesti dicoba. Komando GAM dari tokoh Aceh di Swedia masih sangat efektif. Jalur komando itu yang pertama-tama harus dipotong.

Jika Hasan Tiro dianggap sebagai teroris oleh PBB dan GAM dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh komunitas Internasional, jalur komando itu niscaya sangat mudah terputus. Hasan Tiro dan GAM di Swedia akan diburu secara internasional. Mereka tidak lagi bisa memimpin Aceh secara nyaman. Indonesia bahkan menekan pemerintah Swedia habis-habisan untuk mengontrol Hasan Tiro. Bahkan Indonesia harus siap jika memang diperlukan untuk memutuskan jalur diplomatik dengan pemerintah Swedia.

Pemerintah Swedia akan terus berhitung berdasarkan pada kalkulasi politik rasional. Jika memang Hasan Tiro dan GAM dilabel

sebagai teroris Internasional, opini dunia kemudian menekan Swedia, dan Indonesia mengancam memutuskan semua hubungan diplomasi, terlalu besar kerugian Swedia. Demi kepentingan nasionalnya, Swedia akan mengambil tindakan terhadap Hasan Tiro.

Di samping serangan diplomatis, operasi militer di Aceh harus pula dilengkapi oleh strategi civil society. Aceh tidak dapat ditaklukkan hanya dengan serangan militer. Luka rakyat Aceh akan terlalu dalam. Yang lahir kemudian dapat saja generasi baru GAM yang jauh lebih radikal dan lebih pintar. Karenanya, hati dan pikiran rakyat Aceh harus pula direbut. Mereka harus benar-benar diyakinkan bahwa bersama Indonesia di era baru, era reformasi, rakyat Aceh akan lebih sejahtera.

Hati dan pikiran rakyat Aceh tidak dapat direbut oleh operasi militer. Strategi civil society dapat dikembangkan untuk kebutuhan itu. Misalnya, pemerintah memobilisasi ulama dari dari aneka wilayah Indonesia untuk membujuk ulama Aceh. Pemerintah juga dapat menggunakan berbagai pengusaha di luar Aceh untuk mendekati pengusaha Aceh. Tidak ketinggalan, pemerintah dapat menggunakan jasa LSM nasional untuk mendekati kelompok masyarakat di Aceh.

Tokoh Aceh di Jakarta dan wilayah lain di Indonesia yang moderat dapat dikumpulkan. Mereka secara khusus diminta bantuan untuk merebut hati dan pikiran rakyat Aceh agar pro kepada NKRI. Ini mungkin memakan waktu lama. Tapi langkah ini harus ditempuh agar publik Aceh sendiri yang akhirnya mengisolasi GAM. Peluru tidak perlu meletus terlalu banyak untuk kembali merangkul Aceh ke dalam pangkuan NKRI.

Sepuluh Hari Operasi Terpadu

SEANDAINYA saja Indonesia negara superpower dan Swedia adalah salah satu dari dunia ketiga, maka hubungan kedua negara itu dan cara kedua negara itu menjalankan hukum internasional sangat berbeda dibandingkan yang sekarang terjadi. Sebagai negara superpower, dengan gagahnya Indonesia dapat menekan Swedia agar menyerahkan Hasan Tiro, dan pimpinan teras GAM (Gerakan Aceh Merdeka) lainnya, yang sudah menjadi warga Swedia.

Aneka alasan dapat digunakan Indonesia yang superpower, untuk menekan Swedia, yang hanya mejadi negara dunia ketiga. Indonesia merasa terganggu dengan kehadiran kelompok separatis bersenjata (GAM). Dengan bebasnya Indonesia melabel Swedia sudah menyembunyikan tidak hanya tokoh separatis, tetapi sekaligus teroris dan sekaligus mafia kriminal. Tidak penting benar seberapa definisi itu memang valid menggambarkan Hasan Tiro dan kawan-kawannya.

Karena menjadi negara superpower, Indonesia juga mampu memobilisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Memang ada

hukum internasional yang potensial dilanggar Hasan Tiro. Kedaulatan nasional masing-masing negara dihormati. Semua negara terikat tidak diperbolehkan mengganggu atau mengintervensi kedaulatan negara sejauh tidak ada alasan yang memaksa. Indonesia dapat menggunakan PBB agar hukum internasional itu dihormati Swedia.

Aneka pertemuan bilateral ataupun multilateral mampu disponsori pihak Indonesia. Swedia diminta tidak hanya memproses Hasan Tiro secara hukum. Lebih jauh lagi meminta Swedia mengekstradisi Hasan Tiro ke Indonesia. Jika anjuran normatif itu gagal mempengaruhi Swedia, sebagai negara superpower, Indonesia dapat memobilisasi embargo ekonomi. Sebagian dunia diajak untuk embargo itu. Jika swedia adalah dunia ketiga, niscaya embargo itu mengancam stabilitas ekonominya.

Namun sebagai negara superpower, Indonesia dapat bertindak lebih jauh. Jika embargo ekonomi dianggap terlalu lama, maka Indonesia pun dapat menyiapkan serangan militer ke Swedia. Atas nama penegakan hukum internasional, Indonesia mencoba menggunakan pasukan koalisi PBB untuk bergerak menyerang Swedia. Seandainya PBB tidak bersedia, Indonesia dapat menyerang Swedia secara unilateral.

Indonesia bertindak persis sebagaimana Amerika Serikat atas Irak. Dengan gagah, Indonesia memberikan deadline kepada Swedia. Katankanah deadline itu dilanggar, maka serentetan bom menerpa negara Swedia. Melalui operasi militer yang cepat, Hasan Tiro dapat ditangkap dan dibawa ke Indonesia.

Sementara kekuatan GAM di dalam negeri semakin diisolasi. Jika saja Indonesia negara superpower, maka dana kemanusiaan yang dapat disediakan nyaris tidak terbatas. Dibantu oleh pekerja sosial dan pembentuk image, operasi kemanusiaan mampu mengambil hati rakyat Aceh. GAM akibatnya semakin dibenci oleh rakyat Aceh sendiri. Secara bertahap semakin banyak pimpinan dan aktivis GAM yang menyerahkan diri. Alangkah enak dan mudahnya jika Indonesia

benar-benar negara superpower dan Swedia benar-benar negara dunia ketiga.

Kenyataannya Indonesia bukanlah negara superpower, dan Swedia bukanlah negara dunia ketiga. Atas nama kenyataan politik, tidak banyak yang dapat dilakukan Indonesia untuk menekan Swedia. Apa pun yang Indonesia lakukan, termasuk mengancam memutuskan hubungan diplomatik, dapat saja diabaikan oleh Swedia. Akibatnya, Hasan Tiro dan kawan-kawanya di Swedia masih dapat “ongkang-ongkang kaki”.

Dana yang kita punya juga terbatas. Personel militer juga terbatas. Akibatnya operasi kemanusiaan yang tengah dan akan terus dilancarkan juga harus bergerak dengan asumsi dana yang terbatas. Personel militer pun tidak juga cukup untuk menjaga fasilitas umum dan vital negara. Apa daya, karena kekurangan personel, kita pun lengah. Ratusan sekolah dibakar.

Namun untuk ukuran Indonesia saat ini, dengan seluruh keterbatasannya, pencapaian sepuluh hari operasi terpadu cukup memuaskan. Panglima TNI sendiri bahkan menyatakan hasil operasi ini sudah melampaui target. Basis GAM dapat diduduki secara lebih cepat. GAM dapat pula dipisahkan dari penduduk Aceh dalam waktu yang lebih awal daripada yang direncanakan semula. GAM kini juga terancam kekurangan logistik. Sementara semakin banyak aktivis dan pimpinan lokal GAM yang menyerahkan diri.

Dalam sepuluh hari operasi terpadu, respon dunia juga cukup moderat. Memang dunia tidak memuji langkah operasi militer Indonesia, bahkan juga tidak memberikan dukungan terbuka. Namun secara eksplisit mereka mendukung utuhnya teritori Indonesia, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada satu pun negara yang secara terbuka mendukung Gerakan Aceh Merdeka.

Ini sangat berbeda dibandingkan dengan fenomena Timor-Timur tempo hari. Dengan sponsor Portugal, saat itu Indonesia acap kali menjadi kecaman dunia. Begitu banyak pihak yang meminta

Indonesia melaksanakan referendum di Timor-Timur. Karena tidak dihadapi dengan politik diplomasi yang lihai, akibatnya Timor Timur lepas dari pangkuan ibu pertiwi.

Sepuluh hari operasi militer memang terasa ada kemajuan dilihat dari sisi melemahnya basis militer Gerakan Aceh Merdeka. Sebagai warga negara yang cinta NKRI, sekaligus tidak menyukai perang, tidak bisa tidak kita menerima perang di Aceh dengan banyak catatan kritis. Kita ingin perang di Aceh secepatnya selesai dan GAM secepatnya ditaklukan.

Jika perang di Aceh terlalu lama, terlalu banyak dehumanisasi terjadi, baik disengaja ataupun sebagai efek sampingan. Karena terbatasnya dana, akan terbatas pula persediaan sembako, obat-obatan dan air bersih. Penyakit akan cepat mewabah di kalangan rakyat miskin di Aceh. Seandainya pun mereka secara fisik segar bugar, siapa yang tahun kondisi mental dan psikis mereka? Sangat mungkin akan lahir satu generasi di Aceh yang mengalami penyakit mental akibat depresi era perang.

Jika perang Aceh terlalu lama, petinggi GAM di luar negeri semakin mampu berkampanye anti-Indonesia. Isu hak asasi akan terus mereka jual. Sepuluh hari operasi terpadu terbilang sukses. Kita harap sepuluh hari berikutnya lebih sukses lagi agar GAM dapat ditaklukan secepat-cepatnya.

Sayembara Memburu Hasan Tiro

SAYA membayangkan seorang pengusaha Indonesia membuat sayembara unik memburu Hasan Tiro. Dibandingkan dengan pengusaha lain, ia memang lebih nasionalis, sekaligus sangat kontroversial. Kecintaannya terhadap NKRI, dan kemarahannya kepada pemimpin pemberontakan Hasan Tiro, mendorongnya membuat sayembara ini.

Di berbagai koran, majalah, radio dan televisi, ia mengumumkan. Barangsiapa yang dapat melumpuhkan Hasan Tiro, baik hidup atau mati, akan diberikan hadiah lima milyar rupiah. Sayembara ini terbuka kepada siapa saja, baik warga Indonesia ataupun asing, baik amatiran ataupun 'pemburu' profesional. Sang pengusaha hanya meminta bukti bahwa memang Hasan Tiro sudah dilumpuhkan.

Langkah kontroversi sang pengusaha ini bermula dari keprihatinannya atas situasi Aceh. Ratusan sekolah sudah dibakar oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Ribuan anak-anak kehilangan tempat belajar. Akibat ketidakpedulian GAM yang menolak otonomi khusus, rakyat Aceh kini hidup menderita. Sebagian dari mereka menjadi pengungsi. Tidak sedikit yang keluar masuk hutan.

Rakyat banyak kekurangan sembako, air bersih dan obat-obatan. Penyakit mewabah. Bahkan tidak sedikit yang terbunuh. Seandainya secara fisik rakyat Aceh segar, siapa yang dapat menjamin kondisi psikisnya? Begitu banyak orang yang menderita.

Sementara pemimpin tertinggi GAM, Hasan Tiro, hidup dengan nyaman di luar negeri. Ia bahkan dilindungi oleh hukum nasional Swedia. Ia pun sudah mejadi warga negara Swedia. Melalui remote control ia terus memompakan perlawanan GAM terhadap tentara sah Indonesia. Ia tidak peduli bahwa manuver politiknya membuat rakyat Aceh yang diklaim dibelanya kini menderita secara kolektif. Fantasi kekuasaan dan Aceh merdeka lebih ia utamakan.

Sang pengusaha juga melihat betapa solusi diplomatik menemui jalan buntu. Pemerintah Republik Indonesia sudah mengajukan permohonan dan bukti keterlibatan Hasan Tiro dalam aneka tindakan kriminal dan gerakan separatisme bersenjata. Sudah pula ditemukan hukum internasional yang potensial dilanggar Hasan Tiro. Namun pemerintah Swedia bersikeras bahwa tidak ada bukti bahwa hukum nasional Swedia dilanggar oleh Hasan Tiro.

Aneka ancaman pemutusan hubungan diplomatik tidak ditakutkan oleh Swedia. Ancaman boikot barang-barang Swedia di Indonesia tidak juga membuat pemerintah Swedia bergeming. Sebaliknya, Duta Besar Swedia justru mendahului aksi pemerintah dengan menutup kantornya sementara.

Sang pengusaha itu teramat tahu, penyebab ketidakpedulian Swedia hanya karena Indonesia dunia ketiga. Seandainya Indonesia super power seperti Amerika Serikat, mungkin Swedia akan bersikap berbeda. Apalagi jika ia diancam akan diserang secara militer dengan kekuatan yang jauh di atas daya tahan militer Swedia sendiri.

Karena melihat jalan buntu, sang pengusaha mengambil langkah yang tak biasa. Ia pun membuat sayembara dan diumumkan secara

resmi dan luas. Pro dan kontra tentu mengikuti manuver sang pengusaha itu. Namun, akibat sayembara itu, perburuan Hasan Tiro memasuki babak baru. Yang memburu Hasan Tiro, kini bukan lagi hanya pemerintah Indonesia. Karena tergiur oleh hadiahnya, pihak swasta, baik individu ataupun kelompok, berlomba-lomba melumpuhkan Hasan Tiro. Bahkan para profesional dari luar negeri tidak ingin ketinggalan sayembara.

Pemerintah Swedia mungkin akan protes atas sayembara itu. Namun ini sepenuhnya urusan masyarakat, inisiatif yang tumbuh di kalangan publik sendiri akibat buntunya jalan perburuan Hassan Tiro di jalur resmi.

Kita bayangkan, publik yang merespon sayembara itu akan memburu Hasan Tiro dengan aneka cara. Para ahli hukum mungkin mempelajari secara detail kemungkinan adanya aturan hukum nasional Swedia yang dilanggar oleh Hasan Tiro. Jika ada, maka ia akan menuntut Hasan Tiro melalui *clash action* mewakili publik Indonesia, di pengadilan Swedia. Jika pasal yang dilanggar Tiro dapat ditemukan, para ahli hukum ini mungkin dapat meminta pembayaran di muka kepada sang pengusaha. Jika berhasil, siapa tahun Hasan Tiro dipenjara oleh Swedia. Siapa tahu pula, Hasan Tiro bisa diekstradisi.

Sementara ada pula pihak yang memburu Hasan Tiro dengan gaya 'preman'. Mereka menyamar sebagai turis yang berkunjung ke Swedia. Selaku turis, mereka membuntuti tidak hanya Hasan Tiro tetapi juga pemimpin GAM lainnya. Pihak ini dapat saja nekad menyerang Hasan Tiro secara fisik, lalu menghilang.

Seandainya pun tertangkap, mereka tidak kuatir opini publik Indonesia. Sebagian mungkin mengecamnya sebagai pembunuh. Namun mereka yakin, sebagian lagi mungkin pula memujinya sebagai pahlawan. Bukankah pemerintah Republik Indonesia sedang berperang dengan GAM? Bukankah sudah begitu banyak masyarakat menderita akibat GAM menolak jalan damai dengan menerima NKRI?

Mereka memang tahu bahwa tidak mungkin pemerintah Republik Indonesia secara resmi memuji aksi 'preman' mereka, walau negara dalam kondisi darurat militer. Namun bagi mereka, pasti banyak pejabat pemerintahan yang berterima kasih.

Ia pribadi mungkin akan dipenjara di Swedia. Tapi keluarganya di Jakarta atau dimanapun akan memperoleh hadiah sayembara lima milyar rupiah dari pengusaha yang nyentrik itu. Disamping dana, mereka juga merasa turut menyumbang melumpuhkan gerakan separatisme GAM, yang sudah tumbuh lebih dari 25 tahun.

Jika kejadian di atas benar-benar terjadi, adakah pasal hukum Indonesia yang dilanggar sang pengusaha? Akankah pengusaha ini dapat dikenakan tindakan hukum karena ikut memprovokasi sekelompok orang untuk 'menghabisi' Hasan Tiro. Tentu para ahli hukum dapat berbeda pendapat.

Sang pengusaha dengan mudah berkelit. Bahwa ia hanya ingin Hasan Tiro dilumpuhkan, hidup atau mati. Ini tidak dengan sendirinya provokasi agar ada orang yang membunuh Hasan Tiro. Kilahnya. Hasan Tiro dapat juga dilumpuhkan dengan kematian melalui pengadilan jika pengadilan Swedia menjatuhkan hukum mati karena Hasan Tiro bersalah. Tentu sang pengusaha harus mengecek dulu apakah hukum mati berlaku di Swedia.

Disamping itu, siapa pula yang menuntut sang pengusaha? Pemerintah Indonesia tidak akan ambil pusing karena menganggap sayembara itu hanyalah inisiatif masyarakat yang, marah kepada Hasan Tiro. Jika pemerintah Swedia yang menuntutnya di Indonesia, pemerintah Indonesia juga dapat mengabaikannya, sebagaimana Swedia yang kini mengabaikan Indonesia. Jika ada pengusaha seperti itu, tentu Hasan Tiro tidak akan tidur nyenyak di Swedia sana.

Momok Gerakan Aceh Merdeka

SEJAK 25 tahun lalu, sampai saat ini, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) ternyata masih mampu merepotkan kita. Baru saja pemerintah memperpanjang darurat militer di Aceh untuk jangka waktu enam bulan. Jangka waktu ini bisa diperpendek dan bisa pula diperpanjang. Setiap bulan akan ada evaluasi atas pelaksanaan darurat militer itu. Adapun alasan yang dikemukakan, saat ini GAM sedang mempersiapkan modus perjuangan baru.

Memang agak mengherankan, bagaimana mungkin negara sebesar Indonesia, dengan tingkat nasionalisme yang sangat tinggi, masih belum mampu menaklukkan GAM. Indonesia sudah mengganti tiga presiden, tetapi GAM tidak kunjung melemah juga.

Di era Orde baru, telah digunakan pendekatan yang sangat keras melalui DOM (Daerah Operasi Militer). Aneka bentuk represi dan pemburuan dikerjakan terhadap GAM. Namun GAM tidak lumpuh. Sebaliknya semakin banyak rakyat Aceh yang marah, menjadi radikal, dan bergabung dengan GAM. Anak-anak melihat ayahnya dibunuh. Remaja menyaksikan ibunya diperkosa. Ketika dewasa

mereka segera menjadi aktivis GAM yang lebih radikal dan nekat.

Di awal reformasi, sudah pula dicoba pendekatan simpatik dialog damai. Dibawah koordinasi Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, prospek damai saat itu sangat cerah. Bahkan dunia internasional terlibat sebagai fasilitator. Henry Dunant Center menjadi mediator.

Namun kesepakatan damai tidak pula membuahkan hasil. Bahkan upaya damai itu disiasati oleh GAM untuk konsolidasi. Sejak upaya damai dilakukan, jumlah pucuk senjata GAM bertambah banyak. Aktivis dan personel militer GAM juga membesar. Ketika Indonesia sibuk membicarakan masa depan Aceh dalam kerangka otonomi khusus, GAM justru sibuk dengan upaya Aceh Merdeka dan referendum.

Publik luas akhirnya juga mendukung upaya operasi militer di Aceh melalui operasi terpadu. Karena perundingan damai tidak bisa hanya melingkar-lingkar dari satu perundingan ke perundingan lain, jalan represi kembali ditempuh. Darurat militer diterapkan di Aceh untuk masa enam bulan. Tidak hanya operasi militer, operasi terpadu juga memberdayakan pemerintah daerah, dan mobilisasi dukungan publik luas di Aceh.

Namun enam bulan setelah darurat militer diselenggarakan, belum terlihat perubahan signifikan. Lebih dari 70 persen senjata GAM masih belum ditemukan. Berbagai dedengkot GAM belum juga tertangkap. Ditambahnya masa darurat militer saat ini, itu bentuk pengakuan bahwa GAM memang masih kokoh. Apa yang salah? Apa yang membuat GAM tidak mati-mati dan terkesan punya seribu nyawa?

Berbagai analisa pun bergentayangan, sebagian analisa itu spekulasi murni. Sebagian lagi, itu bersandar pada data dan fakta. Dan sisanya merupakan analisa campuran antara fakta dan ilusi.

Analisa pertama menyatakan bahwa GAM memang tidak direncanakan untuk dihabisi. GAM dibuat untuk tidak membesar tetapi tetap dipelihara agar tetap dianggap berbahaya. Memang TNI secara lembaga punya niat menghancurkan GAM. Memang pimpinan tertinggi sipil dan militer ingin Aceh segera kembali damai dalam pangkuan NKRI.

Namun, menurut analisis ini, terjadi penyimpangan di lapangan. Begitu banyak oknum yang bermain, baik sipil dan militer. Operasi keamanan di Aceh sudah dimanipulasi oleh aneka oknum itu menjadi proyek yang menguntungkan. Mereka justru berkepentingan agar Aceh selamanya tidak aman. Selama itu pula sang oknum itu akan meneguk keuntungan. Program pemulihan keamanan dan tugas menjaga NKRI oleh oknum ini disulap menjadi "tambang uang".

Dalam kondisi Aceh yang tidak aman, mereka dapat menjual jasa keamanan lebih mahal. Harga peluru dan senjata ilegal juga akan meningkat. Justru ketika Aceh tidak aman, kebutuhan dagang senjata di bawah tanah menjadi sangat menggiurkan. Belum lagi banyak program domestik ataupun internasional yang siap untuk dikorupsi. Menurut banyak pihak yang datang ke Aceh, di era konflik, betapa permainan uang meluas tidak hanya di pemda Aceh, bahkan juga aparat keamanan dan tokoh GAM sendiri.

Jika Aceh aman, hilang pula sumber penghasilan tambahan mereka yang basah. GAM memang jangan dibuat terlalu besar. Jangan pula membuatkan GAM berkuasa untuk memisahkan Aceh dari Indonesia. Cukup GAM dipelihara untuk tidak musnah saja. Serangan militer memang harus terus dilakukan terhadap GAM. Namun serangan itu jangan terlalu mematikan karena GAM masih dapat mendatangkan uang.

Tentu saja analisa di atas mungkin benar dan mungkin pula ngawur. Tetapi sebagai opini publik, analisa itu juga diyakini oleh sebagian masyarakat dan pakar.

Analisa kedua, menyatakan bukan oknum sipil dan militer Indonesia yang sengaja memelihara GAM agar tetap hidup. GAM terus bertahan karena kapasitas GAM dan dukungan banyak penduduk sipil. Jumlah personel GAM memang jauh kalah banyak dengan personel TNI. Senjata GAM juga kalah canggih dibanding yang dimiliki TNI.

Namun GAM menguasai lapangan. Mereka mudah masuk keluar hutan. Situasi ini menyerupai personil Vietnam ketika menghadapi pasukan Amerika Serikat. Di Hutan itu, personel Vietnam dapat tiba-tiba muncul dan menghilang. Mereka terbiasa hidup di alam yang keras. Akibatnya, justru pasukan Amerika Serikat yang terbirit-birit dan keluar dari Vietnam. Nasib tentara Indonesia disamakan dengan Amerika Serikat dan Vietnam dengan GAM.

Seperti di Vietnam, personel GAM mudah sekali membaaur dengan penduduk setempat. Disatukan oleh kemarahan yang sama atas situasi ketidakadilan, perang gerilya GAM, sebagaimana Vietnam, menjadi panjang dan melelahkan. Tidak heran, GAM dapat bertahan lebih dari 25 tahun dalam sejarah konflik di aceh.

Kini sekali lagi GAM merepotkan kita dengan kasus pemilu. Karena GAM masih kokoh, pemerintah lebih memilih menerapkan darurat militer di Aceh walau ada pemilu sekalipun. Kepentingan yang lebih besar mengalahkan yang lebih kecil. Menjaga NKRI di Aceh dianggap kepentingan yang lebih besar. Tidak memberikan peluang kepada GAM untuk konsolidasi juga menjadi kepentingan yang lebih besar. Memperpanjang darurat militer adalah strateginya. Sementara pemilu di Aceh dianggap kepentingan yang lebih kecil, yang bisa dikalahkan oleh tujuan lebih besar itu.

What next? Daripada terus berdebat apakah sebaiknya darurat militer diterapkan ketika pemilu di Aceh berlangsung, lebih baik kita fokus saja. Terus saja kita pertajam solusi menghentikan GAM yang sudah lebih dari 25 tahun merepotkan kita.

**BAGIAN KEEMPAT
DINAMIKA POLITIK ERA
MEGAWATI**

Reformasi dan Gerakan Mahasiswa

GERAKAN mahasiswa memiliki caranya sendiri memperingati lima tahun bergulirnya politik reformasi. Di berbagai kota besar di Sumatra, Jawa, dan Sulawesi, aktivis mahasiswa merebak. Mereka bersatu padu dalam aksi protes dan menyatakan bahwa reformasi sudah mati. Para elit yang kini berkuasa telah membunuhnya. Mereka meminta duet Megawati-Hamzah Haz agar meninggalkan kekuasaannya.

Ditahun 1960-an, gerakan mahasiswa juga mengambil format gerakan yang sama. Mereka juga tumpah di jalan di berbagai kota. Mereka protes terhadap situasi di ujung Ore Lama. Tuntutannya pun mengerucut untuk menjatuhkan Presiden Soekarno.

Di tahun 1960-an, gerakan mahasiswa mampu menarik dukungan politik yang semakin hari semakin banyak. Pihak yang memiliki kekuasaan dan aneka segmen masyarakat yang punya hati nurani, menggabungkan diri dengan gerakan mahasiswa. Bung Karno pun jatuh.

Di tahun 1998, gerakan mahasiswa juga mengembangkan pola gerakan yang mirip. Sejak krisis ekonomi melanda rezim Orde Baru, aksi protes mahasiswa meluas pula diberbagai kota besar. Barometer gerakan terjadi di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Gerakan kembali mengerucut, meminta pengantian kekuasaan. Soeharto pun jatuh.

Akankah gerakan mahasiswa di tahun 2003 ini mengulangi kisah sukses para seniornya? Akankah berhasilkkan mereka menjatuhkan duet Megawati–Hamza Haz dan mengawal reformasi?

Persoalannya, Indonesia di tahun 2003 berbeda dengan Indonesia di tahun 1998 atau 1966. Memang terjadi krisis ekonomi, namun tidak setajam di tahun 1997, ataupun di tahun 1965. Jika suatu kondisi awal baik, lalu secara cepat menjadi buruk, ia menciptakan social breakdown yang dapat memobilisasi ketidakpuasan segmen masyarakat lain. Social breadown yang berupa perubahan kesejahteraan sering kali menjadi bahan bakar yang kuat bagi sukses atau tidaknya aksi protes mahasiswa tetapi kali ni publik luas tidak sepenuhnya setuju dengan mahasiswa.

Terlalu eskترم jika gerakan mahasiswa mengklaim bahwa reformasi sudah mati. Disamping sisi buruknya, gerakan reformasi juga banyak membuat social achivement. Bahkan perubahan yang dibawa reformasi banyak juga yang dikatagorikan success story dan menjadi fundamen politik penting bagi Indonesia baru. Kebebasan politik, misalnya, tidak dapat diabaikan. Adalah gerakan reformasi yang menelurkannya. Pers kini sangat bebas. Mereka tidak hanya dibolehkan menginvestigasi kehidupan presiden. Lebih jauh, mereka juga boleh mempublikasikannya.

Publik juga bebas berorganisasi. Muncul ratusan partai politik dengan aneka atribut dan kepentingannya. Lahir pula aneka lembaga swadaya masyarakat dengan aneka misi. Bahkan kini lembaga yang menyoroti korupsi sangat banyak. Ada lembaga yang memang serius ingin memberantas korupsi. Namun banyak pula lembaga yang

menggunakan kasus korupsi untuk memeras para koruptor bagi kantong pribadi aktivisnya.

Amandemen UUD 45 adalah pencapaian lainnya. Di samping keterbatasannya, amandemen ini sudah mengubah kewenangan presiden, DPR dan lembaga yudikatif secara sangat dahsyat. Presiden sudah dibatasi dua periode. Tidak ada lagi presiden yang dapat memerintah puluhan tahun seperti Soekarno dan Soeharto. DPR juga memiliki kekuasaan legislatif yang besar. Sementara ada pula Mahkamah Konstitusi, sebagai pemegang otoritas terakhir interpretasi konstitusi.

Profesional di tubuh militer adalah keberhasilan lain dari reformasi. Polisi kini sudah dipisahkan dari tentara. Pihak militer sudah pula secara gradual dijauhkan dari politik. Militer aktif sudah dilarang mengisi jabatan publik. Militer dan polisi juga dilarang menjadi anggota DPR. Dwi Fungsi ABRI sudah dihilangkan. Yang tersisa sekarang adalah internalisasi doktrin militer profesional ke dalam pikiran dan perilaku para prajurit.

Tentu saja, banyak pula kegagalan reformasi. Korupsi termasuk yang paling sulit dikalahkan oleh gerakan reformasi. Sebaliknya, setelah era reformasi, korupsi di Indonesia semakin meluas. Dengan menggunakan metodologi yang konsisten, lembaga Transparency International mencatat bahwa indeks persepsi atau korupsi Indonesia semakin buruk. Semakin kekuasaan tersebar ke DPR dan daerah, korupsi juga mengikutinya.

Politik era reformasi juga semakin labil. Usia reformasi baru lima tahun. Namun kita sudah mengganti tiga presiden. Koalisi partai politik mudah sekali pecah di tengah jalan. Gerakan separatisme muncul di Aceh, Papua dan Maluku. Partai terancam terfragmentasi dan semakin kecil prolehannya.

Dengan neraca seperti di atas, reformasi tidak terlalu buruk. Banyak pula yang sudah menikmati buahnya. Kinerja reformasi tidak

akan menjadi alasan social breakdown di tahun 2003, sebagaimana di tahun 1997 dan 1965. Tidak ada alasan pula bagi kekuatan politik utama, ataupun gerakan yang bersandar pada hati nurani, untuk bergabung menjatuhkan Megawati.

Parapemimpinpartai besarmelindungiMegawati bertahansampai tahun 2004. Berbeda dengan gerakan mahasiswa, mereka tidak ingin Megawati dan Hamzah Haz dijatuhkan saat ini. Perlindungan partai besar itu diberikan bukan karena mereka mencintai atau mengagumi Megawati. Sebaliknya, mereka justru ingin merebut kekuasaan presiden dari tangan Megawati.

Namun mekanisme mengambil alih kekuasaan yang paling elegan dan legal, mau tidak mau, harus lewat pemilihan umum. Hanya menang melalui pemilu, seorang tokoh baru dapat mengklaim didukung mayoritas rakyat Indonesia. Pemimpin dan elit partai ini senang-senang saja ada gerakan mahasiswa yang dapat membusukkan citra Megawati. Namun menurunkan Megawati-Hamzah Haz di tengah jalan justru memotong rejeki mereka sendiri, yang siapa tahu, mampu mengalahkan Megawati, melalui pemilu.

Berbeda dengan tahun 1965 dan 1997, kondisi Indonesia saat ini tidak matang untuk menjatuhkan presiden di tengah jalan. Gerakan mahasiswa seorang diri tidak akan mampu menjatuhkan pemerintahan. Jika gerakan mahasiswa masih 'ngotot' menjatuhkan presiden, maka akhirnya bukan gerakan mahasiswa yang mengawal reformasi. Sebaliknya, reformasi yang harus mengawal gerakan mahasiswa agar tidak menjadi ekstrem yang justru merusak tradisi pergantian kekuasaan melalui pemilu.

Sukhoi-Gate Mencari Mangsa

Di kalangan elit pemerintahan, Bulog kini dikenal sebagai daerah angker. Istilah populernya, Bulog adalah kuburan bagi politisi. Kasus atau skandal yang menimpa Bulog banyak berhasil menjatuhkan politisi kelas kakap.

Kini di sebagian politisi mulai yang punya obsesi menciptakan sensasi baru. Bahan mentah yang diolah sudah ada, yaitu kontroversi pembelian pesawat Rusia Sukhoi, oleh Bulog. Komisi I DPR baru saja membentuk Panja (Panitia Kerja) untuk meneliti kasus ini. Sebagian kecil politisi mulai mengimpikan, siapa tahun kasus ini dapat menjelma menjadi Bulogate jilid tiga yang menjatuhkan sekali lagi seorang politisi tingkat tinggi.

Bulogate jilid satu sudah memangsa Gus Dur, seorang presiden sekaligus patron paling berpengaruh dari PKB. Kasus Bulogate I itu sendiri awalnya cukup sederhana, melibatkan seorang pemijit. Ia diduga berperan sebagai broker bagi Gus Dur. Sebagai kasus politik, sebenarnya skandal itu tidak terlalu seksi untuk dieksploitasi. Namun

karena perilaku politik Gus Dur yang dianggap banyak merusak stabilitas politik, akhirnya Bulogate jilid satu itu digarap. Ujungnya sudah kita tahu bersama. Gus Dur jatuh sebagai presiden. PKB pecah menjadi dua sampai sekarang.

Bulogate jilid dua memangsa Akbar Tandjung, ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar. Sebagai mangsa, Akbar Tandjung sama tinggi dan sama bernilainya dengan Gus Dur. Pengadilan sudah digelar. Aneka gugatan politik di jalan-jalan juga sudah begitu banyak yang menekan Akbar Tandjung. Seandainya yang memimpin Golkar, ketua DPR dan sekaligus tersangkut Bulogate jilid dua saat itu bukan Akbar Tandjung, niscaya ia sudah jatuh pula. Kelihaihan Akbar Tandjung membuatnya tidak jatuh seperti Gus Dur. Namun tetap saja Akbar Tandjung menjadi cacat, dan sulit muncul sebagai calon presiden 2004 yang populer.

Bagaimana dengan kontroversi pembelian pesawat tempur Sukhoi? Politisi tingkat tinggi mana yang akan dimangsanya?

Mereka yang ingin melakukan politisasi atau kasus Sukhoi memang sekarang kesulitan dalam mencari mangsa. Idealnya, bagi mereka, Sukhoi ini berkembang menjadi Bulogate jilid tiga. Lagi-lagi, idealnya, bagi mereka, yang menjadi mangsa haruslah yang sejajar dengan Gus Dur dan Akbar Tandjung. Tokoh itu tidak lain dan tidak bukan haruslah Megawati Soekarnoputri, Presiden sekaligus ketua umum PDIP, partai terbesar.

Namun dari kasus Sukhoi itu sulit sekali mencari pertautannya dengan Megawati. Keputusan pembelian pesawat Sukhoi ditafsir sebagai kesalahan keputusan setingkat presiden yang layak kena impeachment. Mengaitkan Megawati sebagai dalang pembelian Sukhoi itu, apalagi menjadikannya sebagai korban, terkesan terlalu dicari-cari.

Jika tidak Megawati, siapa mangsa kelas kakap yang dapat dirancang? Bagaimana dengan Tuafiq Kiemas? Jika kasus ini dapat

menjatuhkan Taufiq Kiemas, mereka anggap itu akan menjadi “karya politik” yang cukup gemilang juga. Setidaknya mangsanya sama kuat dengan mangsa dalam kasus Bulogate jilid satu dan jilid dua. Persoalannya, sulit pula mencari kaitan pembelian Sukhoi dengan Taufiq Kiemas. Secara formal, Taufiq tidak menjabat pos politik apapun, baik di pemerintahan ataupun di partai. Jika taufiq ingin dijatuhkan, seandainya bisa, dijatuhkan dari mana?

Bagaimana jika korbannya Dirut Bulog sendiri, Widjanarko Puspoyo? Bukankah ia juga tokoh PDIP yang juga bernilai secara politik? Tetapi sulit pula menjadikan Widjanarko sebagai korban. Dalam kasus Sukhoi, posisinya hanyalah juru bayar pemerintah, yang tidak mengambil keputusan. Ia menandatangani akte pembelian disaksikan sendiri oleh atasannya, Menteri Perindustrian. Di samping itu korban seorang direktur BUMN, yang sekarang menjadi Perum, tidak dianggap layak dan senilai dengan Bulogate jilid satu dan dua, yang memangsa dedengkot partai nomor satu.

Jika perlu mangsa, yang paling mungkin dirancang untuk dijatuhkan adalah Menteri Perindustrian, Rini Soewandi. Mungkin dapat ditelusuri apakah keputusan pembelian ini memang berasal dari Rini, yang kemudian memerintahkan Dirut Blog. Tetapi, seandainya pun memang Rini dapat dijadikan korban, bagi para politisi, korban ini kurang bernilai secara politik. Rini adalah seorang profesional. Ia bukan pemimpin partai atau dedengkot partai. Seandainya ia jatuh, tidak ada partai yang dilukai yang dapat mempengaruhi perolehan suaranya tahun 2004.

Di samping kesulitan mencari mangsa yang sejajar dengan kasus Bulogate jilid satu dan dua, kasus Sukhoi juga belum menemukan kesalahan yang tegas, dan hitam putih. Tidak ada urusan kriminal yang dapat dibawa ke pengadilan, seperti kasus Bulogate jilid dua. Seandainya pun, kasus Sukhoi itu dipansuskan di DPR, seperti Bulogate jilid satu, apakah publik akan mendukungnya?

Tuduhan yang diberikan kepada kasus Sukhoi selama ini hanyalah masalah prosedur. Sebagian menyalahkan pembelian Sukhoi yang tidak melalui prosedur semestinya. Pihak ini mengklaim bahwa ada undang-undang yang dilanggar, seperti Undang-Undang Pertahanan dan prosedur APBN. Diklaim bahwa kesalahan terbesar pembelian Sukhoi karena tidak mengajak Menteri Pertahanan, yang sebenarnya paling berwenang soal pembelian senjata pertahanan.

Namun tuduhan ini masih berada dalam area abu-abu atau grey area. Apakah benar prosedur sudah dilanggar juga masih dapat diperdebatkan. Sebagian menganggap prosedur itu tidak atau belum dilanggar. Memang benar, pembelian Sukhoi tidak tercantum dalam APBN yang ada. Namun bukankah APBN sendiri mengenal adendum, yang dapat direvisi. Jika revisi atas APBN dilakukan oleh pemerintah bersama DPR, dan memasukan pembelian Sukhoi, toh akhirnya pembelian Sukhoi sudah masuk APBN juga.

Soal tidak dilibatkannya departemen pertahanan juga masih di wilayah abu-abu. Apakah benar Menteri Pertahanan, Matori sama sekali tidak tahu menahu soal pembelian Sukhoi itu? Dari berbagai kliping koran, ada pula pengakuan Matori bahwa ia juga terlibat dalam pembicaraan awal Sukhoi itu. Bukankah yang juga menandatangani pembelian Sukhoi Panglima TNI sendiri, selaku pemakai dan pimpinan aparat keamanan?

Karena abu-abunya kesalahan dalam kasus Sukhoi, tidak tegas, tidak hitam putih, sulit mengembangkan Sukhoi menjadi Buloggate jilid tiga. Apalagi sulit pula mencari mangsa kelas kakap yang akan dikorbankan dalam kasus ini. Kasus Sukhoi ini agaknya segera menghilang dikalahkan oleh isu besar lainnya yang lebih sensasional dan seksi.

Panja Sukhoi Kebablasan?

PENGUSAHA Setiawan Djodi dan mantan Kabulog Rizal Ramli mungkin agak bingung. Mereka secara sukarela bersedia datang memenuhi panggilan Panja Sukhoi. Bagi mereka, mungkin saatnya membeberkan apa yang mereka ketahui soal kepatutan ataupun opini mengenai pembelian senjata tempur dari Rusia. Mereka ingin sidang terbuka, jika perlu disiarkan Televisi secara langsung, agar publik mendengar sendiri pandangan mereka.

Ketika akhirnya Panja Sukhoi memutuskan rapat tertutup, sesuai dengan tatib DPR, mungkin mereka kecewa. Tetapi mereka memahami jika memang demikian aturannya. Tetapi sebagai responnya, mereka juga secara sukarela memutuskan untuk menolak memberikan keterangan. Sebagai warga yang mereka, tentu menurut mereka mungkin, mereka bebas pula untuk memberikan keterangan ataupun menolak memberikan keterangan.

Namun tiba-tiba, pimpinan Komisi I membuat klaim yang sangat besar. Setiawan Djodi dan Rizal Ramli dituduhkan melecehkan

parlemen. Lebih dari itu, mereka diancam hukuman satu tahun penjara karena menolak memberikan keterangan. Pimpinan komisi I, tidak lupa mengutip Undang-Undang Susduk MPR, DPR, dan DPRD tahun 1999, yang menyatakan bahwa, pihak yang menolak memberikan keterangan di DPR, dapat diancam pidana.

Mungkin tidak hanya Setiawan Djodi dan Rizal Ramli yang kaget. Aneka pihak yang belajar hukum tata negara dan perbandingan konstitusi di negara lain juga kaget. Memang benar lembaga seperti DPR, memiliki hak Subpoena, yaitu hak meminta keterangan dari pihak yang relevan. Jika pihak itu menolak memberikan keterangan, ia dapat masuk penjara. Tetapi apakah Panja Sukhoi yang hanya dibentuk oleh Komisi I, bukan oleh sidang paripurna DPR, dapat menggunakan hak itu?

Panja Sukhoi memang telah memberikan hikmah. Publik luas sekarang menjadi terbuka, betapa masih compang-camping dan tidak detailnya tata tertib DPR. Untuk lembaga sepeenting dan terhormat seperti DPR, aturan yang tidak detail tentu berbahaya. Di samping akan muncul persoalan konflik kewenangan, akan muncul pula kemungkinan sebuah organ menyalahgunakan atau melampaui wewenangnya.

Dalam tata tertib itu memang tidak ada aturan rinci mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh panja yang dibentuk oleh komisi. Tidak tegasnya pula apa beda kewenangan panja itu dengan pansus, misalnya yang dibentuk melalui sidang paripurna. Dari sisi asal usul terbentuknya sebuah organ, sangat nyata pansus mempunyai legitimasi yang jauh lebih tinggi dari panja. Namun apa gunanya pembedaan itu, jika, misalnya, seluruh kewenangan pansus dapat juga digunakan oleh panja.

Jika panja seperti Panja Sukhoi, yang dibentuk oleh Komisi I dapat memanggil semua tokoh di luar mitra kerja komisi I, apalagi

bedanya panja dengan pansus? Jika Panja Sukhoi saja dapat pula menggunakan hak subpoena itu, lalu apa gunanya dibuat pembedaan panja dan pansus? Yang akan terjadi, semua komisi tidak lagi merasa perlu membuat pansus jika segala kewenangan pansus dapat dikerjakan oleh panja.

Untuk perbaikan di kemudian hari, sangat penting bagi DPR membuat pembedaan kewenangan. Legalitas DPR dengan seluruh hak khususnya tidak boleh terlalu mudah di atasnamakan. Jelaslah kumpulan anggota DPR tidak boleh, misalnya mengatasnamakan DPR, dan menggunakan semua hak lembaga DPR. Komisi dan organ yang dibentuk oleh komisi, termasuk Panja Sukhoi, seharusnya juga tidak boleh mengatasnamakan DPR, dan menggunakan hak Subpoena yang hanya dimiliki oleh DPR sebagai lembaga.

Yang boleh mengatasnamakan DPR, dan menggunakan hak khusus DPR, hanyalah organ yang pembentukannya melalui sidang paripurna. Organ itu berarti harus disetujui dulu oleh mayoritas anggota DPR, lintas fraksi dan lintas komisi. Setelah pembentukannya disetujui oleh sidang paripurna DPR, organ itu secara prosedural dibolehkan menggunakan hak subpoena, misalnya.

Tata tertib DPR mesti direvisi dan membedakan secara tegas sekali kewenangan panja dan pansus. Misalnya, pembedaan itu dibuat seperti ini. Panja yang dibentuk oleh sebuah komisi hanya diizinkan memanggil mitra kerja yang memang relevan dengan bidang komisi itu. Untuk Panja Sukhoi, misalnya, karena dibentuk oleh Komisi I bidang pertahanan dan luar negeri, mesti dilarang memanggil mitra kerja atau tokoh di luar bidang komisi I.

Jika memang ada kebutuhan memanggil tokoh yang beragam karena kasus yang diselidiki itu multidimensi, maka yang harus dibentuk buka panja, tetapi pansus. Karena pansus dibuat oleh sidang paripurna yang lintas komisi, pansus memang berwenang memanggil siapa saja yang relevan dengan kasus.

Dibedakan pula, karena panja hanya mewakili komisi saja, panja tidak dapat mengatasnamakan DPR. Hak DPR seperti hak subpoena tidak boleh digunakan oleh panja, termasuk oleh Panja Sukhoi. Jika memang hak Subpoena ingin digunakan, yang harus dibentuk adalah pansus. Karena pansus dilahirkan melalui sidang paripurna DPR, pansus dapat menggunakan seluruh hak khusus DPR, seperti hak subpoena itu.

Di pandang dari sisi ini, kerja Panja Sukhoi menjadi abau-abu. Di satu sisi ia dapat dituduh telah melampau wewenangnya. Bentuknya hanya panja tetapi sudah mengerjakan kewenangan pansus. Bisa saja pengusaha Setiawan Djodi atau Rizal Ramli kembali menolak untuk datang. Mereka dapat menggunakan intepretasi bahwa tidak relevan panja komisi I mengundangnya. Mereka bukan dari bidang pertahanan atau luar negeri. Mereka hanya ingin datang jika yang mengundang adalah pansus.

Menteri Perindustrian dapat pula bersikap serupa. Ia menolak untuk memberikan keterangan dihadapan panja Sukhoi. Rini dapat pula mengklaim bahwa panja Sukhoi tidak dapat menggunakan hak subpoena untuk mengirimkan Rini ke penjara. Panja Sukhoi hanyalah organ di bawah Komisi I dan tidak dapat bertindak mewakili DPR, ataupun menggunakan kewenangan DPR. Atau dengan kata lain, Rini misalnya menyatakan, Panja Sukhoi kebablasan.

Atas nama tertib bernegara, memang akhirnya tata tertib DPR itu harus diperbaharui dan dibuat lebih detail. Jika tidak Panja Sukhoi akan dituduh hanya main akrobat, mengugat Bulog untuk tidak melampaui wewenangnya, sementara Panja Sukhoi itu sendiri sudah melampaui wewenangnya.

DPR Melanggar Konstitusi?

HANYA karena pertimbangan praktis, Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja disahkan harus diterima. Bagaimanapun, pemilu presiden tinggal satu tahun lagi. Begitu banyak kerja yang belum digarap, mulai dari sosialisasi undang-undang itu sampai kepada pelatihan para pemilih. Waktu, tenaga, dan pikiran yang ada memang sebaiknya dicurahkan kepada persiapan pemilu danantisipasi agar pemilu itu benar-benar bersih, jujur, demokratis dan berwibawa.

Jika Undang-Undang Pemilu Presiden itu digugat saat ini, niscaya jadwal pemilu dapat terganggu. Pro dan kontra akan semakin ramai. Namun untuk preseden dan pengalaman di kemudian hari, catatan kritis atas Undang-Undang Pemilu Presiden itu harus dikemukakan. Dengan catatan ini, setidaknya, para anggota DPR dan pemerintah lebih hati-hati membuat undang-undang, apalagi sepenting Undang-Undang Pemilu Presiden. Undang-undang itu dapat diklaim telah melanggar konstitusi dan DPR juga dapat dituduh melampaui kewenangannya.

Dapat diklasifikasi dua kesalahan DPR dan pemerintah yang tergambar dalam Undang-Undang Pemilu Presiden. Pertama, lembaga itu melampaui kewenangannya. UUD 1945 sudah menggariskan bahwa siapa saja dapat menjadi presiden, asalkan memenuhi kriteria :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri;
- 3) Tidak pernah mengkhianati negara; dan
- 4) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugasnya.

Demikianlah bunyi pasal 6 ayat 1 UUD 1945. Memang di pasal yang sama ayat 2 ada perintah bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Karena undang-undang tidak boleh menentang konstitusi, maka ayat 2 itu mesti dipahami sebagai perintah agar berbagai kriteria UUD 1945 di atas, sebanyak empat prinsip itu, didetailkan. Empat kriteria calon presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 memang hanya memuat garis besarnya saja.

Undang-Undang Pemilu Presiden yang baik, seharusnya membuat operasionalisasi tentang definisi dan ukuran dari kriteria yang ditetapkan UUD. Misalnya, apa yang dimaksud dengan WNI dan apa ukurannya? Apa yang dimaksud dengan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, dan apa pembuktiannya? Lalu apa pula arti tidak pernah mengkhianati negara? Apa ukuran dan definisi pengkhianatan itu? Apa itu mampu secara rohani dan jasmani? Siapa yang akan menentukan sang calon sehat atau tidak secara jasmani dan rohani?

Undang-Undang Pemilu Presiden justru tidak mengoperasionalkan kriteria itu. Misalnya soal "mampu secara rohani dan jasmani" diulangi lagi dalam undang-undang itu tanpa definisi. Dalam Bab

Penjelasan, dikatakan bahwa ketentuan itu sudah jelas. Padahal apanya yang jelas? Apakah misalnya, mereka yang punya persoalan dengan indera mata (buta) atau indera bicara (bisu) boleh menjadi presiden? Tanpa ada kejelasan dalam aturan resmi, ini justru dapat membuat konflik yang tidak perlu.

Ketimbang mengoperasionalkan definisi dari kriteria yang ditetapkan UUD 1945, DPR dan pemerintah bahkan menambah kriteria baru. Syarat pendidikan dimasukkan kedalam kriteria baru, dan banyak kriteria lainnya yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Pemilu Presiden. Padahal yang berhak menentukan kriteria presiden hanyalah pembuat UUD. Sedangkan DPR dan Presiden hanyalah pembuat Undang-undang, yang tidak boleh membatasi apa yang sudah dibolehkan UUD 1945.

UUD 19945, misalnya tidak mencantumkan syarat pendidikan. Mereka yang hanya tamat SMP, bahkan SD, misalnya, boleh menjadi calon presiden, dan dapat menjadi presiden sejauh dipilih rakyat. Konstitusi Amerika Serikat, misalnya, juga memberikan aturan serupa. Namun oleh undang-undang, hak warga negara, yang tidak mencapai SMA, sudah dipotong dan dikebiri. Dengan pembatasan pendidikan itu, DPR dan pemerintah sudah melampaui kewenangannya.

Boleh saja sejak awal kita membuat aneka kriteria presiden yang ideal, misalnya harus minimal sarjana, atau bahkan harus profesor doktor. Namun untuk lembaga sepenting presiden, kriteria itu harus ditetapkan oleh pembuat konstitusi, di dalam konstitusi sendiri. Kriteria itu hanya boleh didetailkan, tetapi tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh undang-undang dibawahnya.

Kesalahan kedua, lembaga DPR dan pemerintah sudah pula menentang aturan konstitusi. Pasal 6A, ayat 2, UUD 1945, jelas mengatur bahwa "Pasangan calon presiden dan wakil presiden

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Pasal dan ayat ini tidak bisa ditafsir lain, bahwa semua partai politik, sejauh ia sudah disahkan sebagai peserta pemilu, dapat mengajukan paket calon presiden dan wakil presiden. Adalah hak partai itu, apakah ia ingin mengajukan calon dengan bergabung bersama partai lain, atau secara independen, mengajukannya sendirian saja. Tidak ada pembatasan persentase dalam bunyi konstitusi.

DPR (dan pemerintah) melalui Undang-Undang Pemilu Presiden sudah melanggar hak itu. Undang-undang menyatakan yang berhak mengajukan calon presiden dan wapres hanya partai politik atau gabungan partai yang memperoleh minimal 3 persen kursi DPR. Partai yang mendapat kurang dari 3 persen tidak boleh mengajukan calon, kecuali jika ia bergabung dengan partai lain, sehingga perolehan kursinya minimal 3 persen. Undang-undang ini telah mereduksi hak konstitusional partai kecil yang sudah diberikan oleh konstitusi.

Mungkin umumnya kita tidak menyadari bahwa hanya konstitusi yang boleh membiarkan pihak penguasa mengurangi hak warga negara. Diurut dari sejarah lahirnya paham konstitusionalisme, memang konstitusi dimaksudkan untuk membatasi intervensi pemerintah atas kebebasan dan hak warga. Dengan adanya konstitusi, pemerintah tidak lagi boleh sembarangan mengurangi hak dan kebebasan warga itu

UUD 1945 melindungi hak warga menjadi calon presiden, tanpa melihat level pendidikannya. Namun undang-undang membatasi hak warga negara dengan syarat minimal SMA. UUD 1945 melindungi partai kecil, yang memperoleh kursi dibawah 3 persen di DPR, untuk mengajukan calon presiden, tanpa perlu bergabung dengan partai lain. Namun undang-undang membatasi hak itu, dengan syarat minimal kursi 3 persen. Mengapa hak warga negara yang dilindungi konstitusi, justru dikurangi oleh undang-undang? Bukankah ini bertentangan dengan paham konstitusionalisme?

Ini catatan kritis yang perlu direnungkan. Sebagaimana yang dinyatakan di awal tulisan, walau ada kesalahan fundamental dalam Undang-Undang Pemilu Presiden, demi alasan praktis undang-undang itu harus diterima dulu. Setelah pemilu 2004 selesai, ia harus segera direvisi kembali.

Academic Review buat DPR

UNDANG-UNDANG Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD baru saja disahkan. Namun sekelompok advokat, OC Kaligis dan kawan-kawan, sudah meminta Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review*, memeriksa substansi undang-undang ini. Jika memang ditemukan adanya pertentangan undang-undang itu dengan konstitusi, maka undang-undang itu niscaya harus dibatalkan.

Adapun keberatan kelompok pengacara itu adalah pasal 30 terutama ayat 4. DPR, melalui pasal dan ayat itu, diberikan hak untuk menyadara penjabat atau tokoh yang menolak memberikan keterangan. Memang yang menjalankan fungsi sandera itu bukan DPR, tetapi aparat hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, DPR dianggap sudah memasuki wilayah yudikatif, yang bukan lagi wewenangnya.

Melihat buruknya kultur politik sekarang, kewenangan sandera DPR, ditakutkan semakin disalahgunakan. Di samping dianggap menentang pembagian *Trias Politica*, kewenangan sandera itu dapat

“ditunggangi” para petualang politik DPR untuk “memeras” tokoh tertentu atau pengusaha tertentu dalam rangka money politics. Bukan rahasia lagi, tanpa menggunakan kewenangan meyandera saja, para petualang di DPR dapat “berkah” yang melimpah karena menyalahgunakan fungsinya, baik fungsi pembuatan undang-undang, anggaran, ataupun pengawasan.

Di negara demokratis lain, sebenarnya badan legislatifnya juga dilengkapi dengan upaya yang sama. Dalam ilmu politik, kewenangan itu disebut dengan hak Subpoena. Istilah ini awalnya merujuk kepada hak yang dimiliki pengadilan. Demi mengungkapkan kebenaran, menghukum pembuat kriminal, dan menegakan keadilan, pengadilan diberikan hak subpoena, hak pemaksa. Seseorang saksi yang menolak memberikan keterangan dapat dikirimkan ke penjara. Akibat adanya hak subpoena, pengadilan memang lebih berwibawa dan memaksa hak asasi untuk bicara.

Lembaga legislatif mengambil oper hak subpoena itu. Tidak hanya pengadilan, wakil rakyat juga merasa penting mengumpulkan informasi untuk membongkar kemungkinan sebuah kejahatan politik. Pelanggaran sumpah jabatan seorang pejabat tinggi, misalnya, tidak harus selalu berarti pelanggaran hukum yang memiliki unsur pidana. Pelanggaran itu tetap harus diusut, namun tentu saja itu belum menjadi kewenangan pengadilan. Kewenangan pengusutan itu masih berada di wilayah politik. Lembaga legislatif yang paling tepat mengusutnya. Agar kerja pengusutan itu punya alat paksa, hak subpoena akhirnya juga dimiliki oleh lembaga legislatif.

Perbedaannya, di negara demokrasi lain yang sudah matang, back-up bagi hak subpoena itu langsung diberikan oleh konstitusi. Dalam paham konstitusionalisme, memang hanya konstitusi yang punya hak untuk “merampas” hak asasi warga negara atau kebebasan warga negara, demi tujuan lain yang lebih besar. Karena sudah diatur oleh konstitusi, undang-undang tinggal mengoperasionalkannya saja. Hak subpoena di negara itu tidak menjadi kontroversial, dan tidak dianggap menentang konstitusi.

Di Indonesia, amandemen UUD 1945 memang tidak dilakukan secara telaten. Banyak hal yang terlupa, termasuk mencantumkan kewenangan subpoena itu bagi DPR. Para politisi yang merancang amandemen mungkin mengira hal-hal yang terlupakan dalam konstitusi dapat diatur melalui undang-undang. Para politisi ini tentu tidak menyadari, bahwa khusus yang berhubungan dengan kebebasan dan hak asasi warga negara, undang-undang tidak boleh menghapuskan atau mengambil atau mereduksi hak yang “tidak dirampas” oleh konstitusi secara tertulis. Kewenangan subpoena oleh DPR itu dapat menjadi obyek yang rawan bagi judicial review.

Bukan pertama kali ini produk DPR digugat oleh para pakar yang memang ahli di bidangnya. Undang-Undang Pemilu Presiden yang sudah terlebih dahulu disahkan juga digugat secara keras, walau belum di mintakan judicial review ke Mahkamah Agung. Melalui Undang-Undang Pemilu Presiden itu, DPR (dan pemerintah) dianggap melampaui kewenangannya, dan bahkan melanggar konstitusi dengan menambah-nambah kriteria calon presiden di luar yang sudah ditetapkan konstitusi. DPR (dan pemerintah) juga sudah mengurangi hak partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dengan memberikan batas presentase minimal perolehan kursi dalam pemilu di DPR.

Bagi mereka yang mempelajari konstitusi, tidak hanya dari pasal-pasalnya, tetapi juga sejarah terbentuknya konstitusi dalam perjalanan politik dunia, dan filsafat konstitusionalisme, kesalahan yang dilakukan politisi DPR termasuk yang sangat elementer dan fundamental. Dari sisi politik praktis, kesalahan itu mungkin kecil karena tidak ada kekuatan politik besar yang menentanginya. Namun dari kacamata kehidupan negara dan prinsip demokrasi konstitusional, itu kesalahan teramat besar karena telah melanggar salah satu soko guru penting.

Hukum di negara kita akan sulit sekali dijalankan jika terlalu banyak produk DPR yang dimintakan judicial review. Jika yang

meminta itu hanyalah “anak jalanan” atau para petualangan politik, mungkin kita tidak dapat berkata lain bahwa apapun yang DPR buat mereka akan bertindak sama. Namun mengkritik produk DPR itu, dan yang meminta judicial review adalah para pakar, yang memang tahu asam garam seluk beluk ilmu dan prinsip hukum.

DPR perlu mempertimbangkan untuk memiliki sejenis ‘Devil Advocate’. Istilah ini merujuk kepada sebuah tim yang ditugaskan untuk mempelajari, mencari segala titik kelemahan dari segala sisi, terutama dari aspek hukumnya, atas semua produk hukum yang akan disahkan DPR (berserta pemerintah). Sebelum direview oleh tim ini, produk hukum itu jangan dulu disahkan. Tim ini katakanlah melakukan academic review terlebih dahulu atas produk hukum DPR itu.

Sebelum Undang-Undang Pemilu Presiden disahkan, misalnya, sejumlah pakar di bidangnya “dikarantina” selama seminggu untuk mempelajari draft RUU itu. Atau sebelum Undang-Undang Susduk DPR diketok palu, sejumlah pakar lainnya diminta total perhatiannya untuk mereview secara akademik hasil sementara RUU susduk itu. Para pakar diminta memberikan kritik sekeras-kerasnya, terutama dari aspek hukum, sisi kelemahan yang mungkin ada dari draft itu. Semakin banyak temuan para pakar yang melakukan academic review itu semakin baik.

Input dari tim ini kemudian diolah kembali oleh DPR (berserta pemerintah) untuk diperbaiki. Dengan model penyusunan undang-undang seperti di atas, politisi di DPR terhindar dari kemungkinan membuat kesalahan karena ketidaktahuannya.

Upah Mengangkat Gubernur?

“MENGANGKAT pasir saja ada upahnya. Masak mengangkat gubernur tidak ada upahnya?” Kalimat ini diulang-ulang oleh Wayan Nuastha, anggota DPRD Bali dari PDIP. Sangat unik, kini Nuastha menjadi bintang pekan ini, the newsmaker of the week. Nuastha sendiri yang memberitakan betapa ia sudah menerima “hadiah” agar mendukung calon gubernur tertentu.

Kini Nuastha melakukan roadshow. Ia sudah melakukan wawancara eksklusif dengan beberapa media. Ia sudah pula menjadi tamu dari talkshow politik. Bersama rekannya, ia mengadu ke PTUN, ke Menteri Dalam Negeri, dan terakhir ke DPR. Kembali ia ceritakan dari awal proses money politics yang ia alami. Pemberi uang, rekan separtainya sendiri, membujuk bahwa “honor” itu hal yang biasa. Jika mengangkat pasir saja ada honorinya, mengangkat gubernur wajar pula diberi honor.

Celoteh Nuastha tidak sia-sia. PTUN Bali, misalnya, meminta agar keputusan DPRD Bali mengenai penetapan gubernur dan wakil gubernur ditunda pelaksanaannya. Kini beberapa tokoh DPR,

lembaga yang sangat powerful, juga membuat pernyataan serupa. PTUN, tokoh DPR, bergabung bersama aneka civil society, seperti ICW dan BCW, semakin membuat Bali menjadi tontonan Nasional.

Dalam pidato pertanggungjawaban di depan MPR, masih terngiang ucapan presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut Megawati, KKN memang tidak tambah baik. Bahkan Megawati menyerang KKN yang terjadi di lembaga legislatif sangat memprihatinkan.

Ucapan Megawati dibuktikan oleh kadernya sendiri. Celakanya, yang menjadi tertuduh KKN atau money politics justru partai yang dipimpin oleh Megawati sendiri. Tambah celaka lagi, yang dijadikan "tertuduh" adalah orang-orang yang didukung atau mengelilingi Megawati. Ini sejenis senjata makan tuan.

Agar fair, "nyanyian" Nuastha harus diverifikasi. Aneka tuduhan money politics itu harus didudukan dulu secara objektif, dengan mendengar pandangan pihak lawannya. DPD PDIP Bali, dan tokoh DPP PDIP mungkin bersalah, keseleo, tetapi mungkin pula tidak. Waktu dan proses investigasi yang akan menentukan.

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri mungkin akan patuh kepada ketetapan PTUN Bali. Mungkin pula presiden atau Menteri Dalam Negeri memiliki pertimbangan sendiri dan tidak ingin mengikuti ketetapan PTUN itu. Namun setidaknya, Nuastha sudah menjadi whistle Blower, si pembisik yang mengabarkan "bau busuk" itu keluar, ke publik luas. Upaya Nuastha tidak akan sia-sia. Mungkin upayanya tidak mengubah keputusan mengenai Gubernur Bali. Namun sudah pasti, Nuastha sudah membuat dunia money politics di jagat politik Indonesia semakin hati-hati dan takut-takut.

Mungkin saja presiden melalui Menteri Dalam Negeri tetap melantik Gubernur Bali. Alasan yang digunakan adalah sepenuhnya pertimbangan normatif dari dunia administrasi negara. Sejauh ini

DPRD Bali tidak mengubah keputusannya, fraksi PDIP di DPRD Bali juga secara resmi membantah semua tuduhan Nuastha. Pihak yang dituduh juga sudah memberikan respons. Menurut mereka uang yang diberikan itu adalah uang konsolidasi partai. Menteri Dalam Negeri dapat mengatakan bahwa jika ada masalah hukum atau pidana silahkan terus diusut. Namun secara administratif dan prosedural, ia tetap layak melantik Gubernur Bali terpilih.

Bagaimana dengan ketetapan PTUN Bali? Menteri dalam Negeri dapat pula mengambil jalan lain. Ia dapat pula mengatakan bahwa PTUN Bali hanya boleh mereview keputusan administrasi negara yang final. Sebelum keputusan itu final, PTUN belum layak memberikan penilaian. Keputusan DPRD soal Gubernur dan wakil Gubernur terpilih belum final. Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, masih ada pengesahan presiden yang dibutuhkan agar pengangkatan Gubernur Bali yang baru itu final.

Sejak awal, Menteri Dalam Negeri dapat mengatakan bahwa ketetapan PTUN Bali itu sendiri sudah bermasalah. Memang benar ada kasus pemilihan gubernur yang dibatalkan dan diulang. Itu terjadi di Maluku Utara. Benar pula yang menjadi pemicu pemilihan ulang gubernur di Maluku Utara juga masalah money politics. Bedanya, yang membatalkan pemilihan gubernur di Maluku Utara adalah DPRD Maluku Utara Sendiri.

Jika DPRD membatalkan, memang mudah bagi Menteri Dalam Negeri atas nama presiden untuk mengangkat pejabat gubernur sementara. Setelah itu mendukung sebuah pemilihan gubernur yang diulang sejak awal. Namun untuk kasus Bali, bukankah DPRD Bali tidak bergoyang? Jika Nuastha dan kawan-kawannya ingin menggugat, Menteri Dalam Negeri dapat saja mengatakan, gugatlah DPRD Bali, jangan Menteri Dalam Negeri dan presiden.

Bisa pula Menteri Dalam Negeri menempuh jalur lain. Karena situasi Bali masih hot, digunakan strategi mengulur waktu. Menteri

Dalam Negeri atas nama presiden tidak melantik gubernur itu secepat yang dijadwalkan.

Menteri Dalam Negeri juga tidak mengangkat pejabat gubernur sementara. Semua diambangkan dan didinginkan lebih dahulu. Toh akan ada masalah lain di jagat politik yang menarik perhatian publik. Seminggu, dua minggu, sebulan, mungkin dua bulan, publik sudah disibukkan oleh hal lain. Saat dingin itu Menteri Dalam Negeri melantik Gubernur Bali. Akan ada gunjang-ganjing, namun melalui waktu, publik akan melupakannya. Politik berjalan normal seperti biasa.

Yang paling elegan, memang presiden sendiri memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menunda pelantikan. Lebih elegan lagi, jika presiden sendiri yang mendukung perlunya investigasi tuntas atas praktek money politics yang dituduhkan melibatkan orang-orang kepercayaannya.

Langkah ini terkesan heroik, dan menyenangkan hati banyak orang. Tapi jika tuduhan itu benar, risiko politiknya sangat besar. Sulit dibayangkan, presiden dan pembantunya memilih risiko besar itu di era pemilihan yang sudah dekat.

Apapun pilihan yang diambil Menteri Dalam Negeri atas nama presiden, Nuastha, anggota DPRD PDIP Bali akan tetap dikenang. Masa depan politiknya di PDIP bisa redup, tetapi bisa juga justru bersinar terang. Nuastha dapat menjadi kanalisasi dari masih banyak aktivis dan pimpinan PDIP lain yang punya keprihatinan yang sama.

Yang jelas dunia money politics akan terpengaruh oleh si whistle blower, Nuastha. Tidak ada lagi tempat yang aman untuk money politics. Melalui kasus Nuastha, bahkan teman separtai yang "diuntungkan", ternyata dapat "mencelakakan". Bagi pemerintahan yang bersih, ketakutan akan whistle blower justru sehat. KKN dan money politics tidak lagi menjadi vulgar dan telanjang.

Rehabilitasi Massal Komunisme?

SAYA membayangkan Presiden Megawati tampil di Televisi dalam siaran langsung, menyampaikan sebuah pidato yang sangat penting "Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air," ujarnya membuka pidato. "Tidak ada bangsa yang dapat melangkah ke depan dengan kokoh jika bangsa itu masih menyimpan luka yang menganga akibat trauma konflik politik di masa silam. Komunisme dan G30 S tahun 1965 telah menjadi momok dan beban politik kita selama sekitar 40 tahun."

Publik luas, dari Sabang sampai Merauke, mengikuti pidato Presiden Megawati dengan sangat seksama. Sudah lama terdengar kabar, Megawati akan membuat langkah rekonsiliasi dan rehabilitasi yang sangat historik. "Maka dengan ini, "sambun Megawati, "setelah mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung, saya selaku presiden merehabilitasi secara massal semua korban isu komunisme."

Lanjut Megawati, "Saya tidak gegabah membuat keputusan ini karena saya menyadari efek politiknya yang sangat mendasar. Sejak

lama saya sudah membentuk team yang mempelajari kasus ini. Team ini terdiri dari berbagai unsur yang beragam. Antara lain pakar hak asasi, ulama, unsur partai politik, sampai kepada purnawirawan militer dan tentara yang masih aktif. Dengan melibatkan banyak unsur itu, saya berharap rehabilitasi ini merupakan hasil kompromi kekuatan politik Indonesia dalam spektrum yang beragam.”

Setelah reformasi,” ujar Megawati lebih lanjut, “kita sebagai bangsa menempuh rekonsiliasi yang moderat. Tidak bisa kita bantah, bahwa kesepakatan politik di MPR secara aklamasi masih melarang komunisme sebagai ideologi di Indonesia. Kenyataan ini harus kita terima dengan lapang dada. Komunisme masih belum dibolehkan.”

Sambung Megawati lagi, “Namun untuk keluarga pimpinan PKI, dan tokoh lain yang tidak terlibat secara langsung dengan peristiwa G30 S tahun 1965 tidak sepatasnya ikut menanggung hukuman. Harus kita akui, kebijakan bersih lingkungan di masa lalu sudah diterapkan secara sewenang-wenang. Atas nama pemerintah secara resmi saya menyatakan rasa maaf atas semua tindakan yang telah membuat mereka yang tidak bersalah menanggung penderitaan selama ini.”

Megawati menutup pidatonya dengan konklusi bahwa rehabilitasi itu diberikan kepada semua tokoh dan tapol golongan B, C dan sejumlah list lainnya. Ujar Megawati semoga kita sebagai bangsa dapat kembali hidup bersama, melupakan konflik masa silam dan melihat ke depan.

Tidak pernah kita tahu, apakah pidato model di atas akan benar-benar terjadi. Belum juga dipastikan, apakah Presiden Megawati akan benar-benar merehabilitasi secara massal korban isu komunisme. Memang tekanan atas rehabilitasi itu cukup kuat. Tidak hanya kalangan masyarakat yang menyuarakannya, seperti Petisi 50 dan Komnas HAM, tetapi juga Mahkamah Agung.

Namun jika langkah rehabilitasi diambil Megawati, dapat dipastikan sebagai presiden, Megawati sudah meletakkan fondasi yang kokoh untuk rekonsiliasi nasional. Pada waktunya, rekonsiliasi dan rehabilitasi, bahkan amnesty akan pula diberikan kepada tokoh lain. Trauma konflik politik berskala besar di masa silam, pelan-pelan disembuhkan.

Tentu saja langkah moderat di atas akan dikritik oleh pihak yang ekstrem, baik di "kiri" ataupun "kanan". Pihak "kiri", baik mantan pemimpin PKI, aktivis hak asasi ataupun kaum liberal mungkin menganggap langkah rekonsiliasi itu kurang radikal. Mereka mungkin berharap, misalnya komunisme sebagai ideologi jangan lagi dilarang. Toh secara internasional ideologi itu sudah ompong. Namun lebih mendasar lagi, sebaiknya komunisme itu dikalahkan dalam pemilu, bukan dilarang melalui regulasi pemerintah.

Rehabilitasi tetapi masih melarang ideologi komunisme, oleh kalangan ekstrem kiri ini, dianggap langkah yang tidak tegas. Jika memang ingin membangun demokrasi sejati, ideologi harus dibiarkan bebas. Bukankah publik luas yang akan menentukan ideologi mana yang dipilih. Mengapa takut dengan pilihan publik luas secara demokratis?

Sebaliknya, pihak yang ekstrem kanan, berpendapat yang sama sekali bertentangan. Menurut mereka, rehabilitasi korban komunisme itu seperti membangunkan macan tidur. Buat apa lagi diusik-usik masalah komunisme. Pelaku, ideologi dan korban isu itu sudah terkubur dalam sejarah. Publik luas juga jangan lagi diingatkan soal itu. Masalah kita sudah terlalu banyak.

Menurut kelompok ini, sangat bahaya jika keluarga dan pelaku komunisme itu direhabilitasi walau mereka hanya dari golongan B dan C. Dendam politik mereka masih tinggi. Mereka akan menyusup membalas dendam. Memang bukan ideologi komunisme itu lagi secara murni yang diperjuangkan. Namun dendam terhadap institusi dan tokoh yang memojokan mereka itu yang akan terus membara.

Bagi mereka, isu komunisme masih menjadi variabel disintegrasi bangsa. Rehabilitasi massal atas korban isu komunisme dianggap sebagai blunder politik.

Spektrum politik Indonesia memang sangat plural dan luas. Memang tidak ada kebijakan politik apapun yang besar, yang dapat menyenangkan semua pihak dari semua spektrum. Walau kritik dari sayap kiri dan sayap kanan dapat dipahami, tetapi langkah moderat pemerintah terhadap isu komunisme sudah merupakan langkah maju. Ini hasil kompromi yang optimal.

Amerika Serikat butuh lebih dari seratus tahun untuk merekatkan kembali warga negaranya. Perang sipil di abad ke-18, antara wilayah selatan dan utara hampir saja menenggelamkan Amerika Serikat. Untung saat itu ada Abraham Lincoln, presiden yang sangat inovatif dan berani mengambil resiko. Ia melihat penghapusan budak itu perlu. Ia melihat Amerika Serikat harus tetap bersatu. Walau badai dan peluru menerjang, demi masa depan negara yang lebih baik, keputusan harus diambil.

Perpecahan di Indonesia di tahun 60-an akibat G30 S PKI memang tidak separah perang sipil di Amerika Serikat. Namun akibat peristiwa itu, jutaan warga negara merasa terpisah dan terisolasi dari mainstream.

Butuh waktu yang cukup lama untuk kembali merekatkan dua komunitas yang bertolak belakang. Rehabilitasi korban komunisme sambil tetap melarang komunisme sebagai ideologi adalah langkah moderat awal yang baik. Dipandang murni dari kaca mata hak asasi, ini memang belum ideal. Tetapi secara politik praktis, ini langkah awal yang mungkin. Kita menunggu keberanian Presiden Megawati untuk melakukan rehabilitasi massal itu.

Dua Tahun Tragedi 9/11

HARI itu, 11 September 2003, tepat pukul 08.46 pagi hari, penduduk Amerika Serikat bersatu dalam moment of silence, mengenang dua tahun tragedi tersebut. Suasana duka dan haru kembali menyelimuti seluruh negeri. Setelah dua tahun berlalu, akankah Amerika Serikat mengubah cara memerangi terorisme, dan meluruskan kebijakannya di Timur Tengah?

Dalam moment of silence, Presiden Bush sendiri berdoa bersama keluarga dan stafnya di Gedung Putih. Tragedi itu tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. George Bush berubah menjadi pemimpin dunia yang sangat agresif. Bukan hanya kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berubah, namun wajah dunia ikut pula berbeda setelah kejadian sebelas September itu.

Di New York, di jam yang sama, kereta bawah tanah menghentikan lajunya. Petugas kereta bersama dengan penumpang juga menyempatkan diri mengheningkan cipta. Tragedi sebelas September begitu menyentuh ke lubuk hati psikologis rakyat

Amerika Serikat. Dalam satu peristiwa, sebanyak lebih dari tiga ribu anggota keluarga tidak pernah lagi pulang ke rumah.

Anggota keluarga dari pihak korban merayakan peristiwa itu dengan ritus yang lebih menyentuh. Anak-anak yang masih polos, berusia 7 tahun, sampai yang sudah berangkat dewasa, mengenang ayah atau ibu mereka yang turut menjadi korban. Satu per satu mereka membacakan nama keluarga yang tidak pernah kembali. Marina Wang, 12 tahun, ikut pula dalam ritus dan menyapa ayahnya yang menjadi korban, "and our father, Wubin Wang, we love you all."

Ketika tragedi terjadi 2001, semua pimpinan agama di seluruh dunia bersatu mengutuknya. Tidak ada satu pun agama yang membolehkan membunuh mereka yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik. Begitu banyak korban yang tidak tahu menahu soal politik. Mereka menjadi korban hanya karena kebetulan mereka berada di Gedung WTC atau pesawat yang dibajak untuk menghancurkan gedung.

Dua tahun setelah peristiwa itu berlalu, Amerika Serikat seharusnya semakin mendapat simpati dunia. Apalagi Negara super power itu sudah pula mengambil leadership dan inisiatif untuk memerangi terorisme global. Namun kejutan justru terjadi. Setelah dua tahun tragedi sebelas September, Amerika Serikat justru semakin tidak populer, terutama di negara yang mayoritasnya muslim.

Sebuah lembaga penelitian internasional meneliti persepsi masyarakat terhadap Amerika Serikat. Tidak hanya di Turki atau Pakistan, tetapi di semua negara yang penduduknya muslim, Amerika Serikat semakin tidak disukai. Termasuk dalam cakupan negara itu adalah Indonesia. Tidak bisa lain harus disimpulkan, pasti ada yang salah dalam cara Amerika Serikat memerangi terorisme ataupun menjalankan kebijakan luar negrinya selama dua tahun ini.

Sehari setelah peringatan sebelas September, The New York Times, pada edisi 12 September 2003 membuat editorial tentang

Timur Tengah yang sangat mencerahkan. Mungkin editorial ini membawa spirit baru bagaimana seharusnya Amerika Serikat melihat konflik di Timur Tengah. Mungkin 80 persen kemarahan penduduk Muslim di seluruh dunia terhadap Amerika Serikat bersumber dari konflik Israel-Palestina. Selama ini Amerika Serikat secara vulgar menerapkan kebijakan yang double standard.

Kita tidak tahu berapa banyak lagi korban yang dibutuhkan untuk membuat pemimpin di Israel, Palestina dan Amerika Serikat sendiri sadar tentang kebijakan yang buruk. Mata rantai kekerasan antara Israel dan Palestina nyaris tidak berujung. Kekerasan yang satu dibalas dengan kekerasan lainnya.

Padahal selama masih ada warga Palestina dan ada warga Israel, dua kekuatan itu tidak benar-benar bisa untuk saling menghabiskan. Nuklir dapat memusnahkan sebuah wilayah dan penduduknya. Namun rasa marah, rasa dizalimi akan terus hidup dan pada suatu masa akan menuntut keadilan.

Editorial The New York Times membuat rekomendasi yang simpatik untuk didengar oleh pemerintah Israel, juga pemerintah Amerika Serikat tentunya. Editorial ini mengkritik inisiatif Israel yang berniat mengusir Yaser Arafat dari Palestina. Upaya itu hanya akan membuahakan konflik dan kekerasan yang semakin brutal.

Editorial ini lalu mengingatkan masa indah, sepuluh tahu lalu, ketika rekonsiliasi ditandatangani oleh Yitzak Rabin dan Yaser Arafat. Hubungan dua komunitas itu mulai mesra. Mereka bergabung dalam patroli bersama menjaga keamanan wilayah. Hubungan bisnis dua komunitas itu terus dijalin. Di antara sesama warga Palestina dan Israel, mereka saling mengunjungi. Saatnya menurut editorial The New York Times, Israel memberi lebih banyak. Israel tidak hanya harus membantu Palestina merdeka.

Israel tidak hanya harus menghentikan pembangunan di tanah yang didudukinya. Bahkan Israel harus meninggalkan sama sekali wilayah pendudukan di West Bank dan Gaza. Salah satu alasannya

adalah kondisi demografis. Di West Bank dan Gaza hidup Sekitar 3,2 juta orang Palestina. Pertumbuhan penduduk di wilayah ini sangat tinggi 4,2 persen per tahun, salah satu pertumbuhan yang tertinggi di dunia. Sementara di negara Israel sendiri hidup sekitar 5,4 juta orang Yahudi dan 1,3 juta orang Arab.

Seandainya pun Israel tetap mampu secara militer menduduki West Bank dan Gaza, namun demografi akan berubah cepat. Pada tahun 2020, di wilayah itu penduduk Israel segera menjadi minoritas. Dalam kondisi pecampuran dua komunitas, bagaimana cara israel yang minoritas menjaga keamanan warganya?

Jika Israel sangat ketat mendiskriminasi penduduk yang non-Israel, segera negara Israel menjadi negara apartheid yang buruk. Yaitu negara yang bersandar kepada supremasi ras atau etnik atau agama di dunia yang sudah supermodern. Itupun hanya berhasil jika supremasi itu dijaga ketat dengan pengawasan militer yang supercanggih.

Namun seberapa rela penduduk Israel sendiri mau menanggung biaya sosialnya? Keluarga mana yang bersedia menjaga wilayahnya di West Bank ata Gaza tetapi segera kehilangan anaknya karena kasus bom bunuh diri?

Semoga editorial The New York Times menggambarkan spirit baru kebijakan luar negeri Amerika Serikat sendiri. Apa gunanya negara ini manjadi adidaya jika ia semakin dibenci oleh komunitas dunia? Apa nyamannya menjadi satu-satunya superpower tetapi warga negaranya hidup tidak nyaman dibanyak negara lain.?

Salah satu sumber utama dari kemarahan atas Amerika Serikat bersumber dari kebijakannya di Timur Tengah. Awalnya hanya kasus Palestina-Israel, kini melebar lagi ke kasus Afganista dan Irak. Dua tahun tragedi sebelas September adalah waktu yang cukup buat Amerika Serikat merenung.

'Pembangkangan' di Daerah

SEMAKIN sering pemilihan gubernur dilakukan, semakin terkuak fenomena baru di era reformasi. Kader partai lokal di aneka propinsi "membangkang" terhadap kebijakan pimpinan partainya di pusat. Dewan Pimpinan Partai Pusat memutuskan dan menugaskan secara resmi kader partai tertentu untuk maju dalam pemilihan gubernur. Namun di daerah, terjadi "pembangkangan." Sejumlah kader partai yang bersangkutan mengajukan calonnya sendiri dan menantang calon resmi partai. "Pembangkangan" di daerah ini menjadi salah satu sumber yang membuat pemilihan gubernur tidak semudah dan selicin yang dibayangkan pimpinan partai pusat.

Kasus terakhir yang menimpa Sumatra Selatan. Secara resmi, dua partai besar, PDIP dan Golkar mengajukan gubernur lama, Rosihan, sebagai calonnya. Diatas kertas, dengan dukungan dua fraksi terbesar Sumatra Selatan, Rosihan akan menang sangat telak dan mudah sekali. Ternyata hasilnya mengejutkan banyak pihak. Calon underdog, Sahrial ternyata mengalahkan Rosihan, walau dengan angka yang sangat tipis. Perbedaan dua kandidat

itu hanya satu suara, 38:37. Mustahil Sahrial menang tanpa adanya “pembangkang” di daerah terhadap suara resmi partai.

Kasus Sumatra Selatan buka kasus pertama. Sebelumnya juga terjadi kasus pembangkangan serupa di Lampung, Jawa Tengah, dan Bali. Bedanya, di Jawa Tengah dan Bali, para “pembangkang” itu masih dikalahkan oleh calon resmi partai. Tapi di Lampung dan Sumatra Selatan, para “pembangkang” sukses dan membuat kecewa pemimpin partai pusat.

Kasus Sumatra Selatan menjadi heboh karena presiden tidak kunjung melantik gubernur yang terpilih. Padahal DPRD setempat sudah menganggap pemilihan itu final. Tamu Undangan sudah hadir untuk ikut merayakan kemenangan Sahrial. Bahkan ketika Sahrial diumumkan mengalahkan gubernur lama, Rosihan, dua tokoh ini berpeluk-pelukan.

Ibarat pertarungan tinju, yang kalah dan yang menang sudah menganggap pertarungan selesai, dan saatnya “berkawan” kembali. Keluarga dan pendukung Sahrial sudah pula bersiap-siap memerintah Sumatra Selatan. Namun pelantikan ditunda. Pemerintah pusat bahkan memperpanjang jabatan gubernur lama, sampai batas waktu yang ditentukan.

Yang menarik, terkesan pemerintah pusat “kehabisan” alasan, mengapa gubernur terpilih di Sumatra Selatan itu tidak dilantik. Untuk kasus Lampung, pemerintah pusat masih punya alasan pembenar yang masuk akal. Di Lampung, gubernur yang terpilih juga tidak dilantik. Bahkan “sang gubernur baru” itu “diculik” dengan helikopter dan dibawa ke Jakarta.

Kasus “penculikan” itu memang sangat kontroversial. Bagaimana mungkin seorang tokoh yang secara resmi sudah dipilih DPRD Lampung diculik oleh aparat. Toh pemerintah pusat punya alasan, bahwa sang “gubernur” baru itu terkena tindakan pidana. Sebagian

publik tentu tetap tidak puas dengan penjelasan itu dan protes. Namun setidaknya, pemerintah masih punya alasan yang masuk akal.

Hal yang sama terjadi dengan kasus pemilihan gubernur di Maluku Utara. Saat itu, Abdul Gafur memenangkan pemilihan. Pemerintah pusat juga tidak kunjung melantiknya. Muncul isu money politics. DPRD setempat berniat mengadakan pemilihan gubernur ulang. Untuk kasus Gubernur Maluku Utara, sekali lagi pemerintah pusat masih punya alasan. DPRD setempat dianggap berwenang dan meminta pemilihan ulang. Pemerintah pusat hanya mengamini saja.

Tapi alasan apa yang akan diberikan kepada gubernur baru di Sumatra Selatan? Sahrial, sang Gubernur yang terpilih, tidak terkena tindakan pidana, sebagaimana yang dituduhkan kepada Gubernur Lampung terpilih. DPRD di Sumatra Selatan juga tidak meminta pemilihan ulang, sebagaimana yang terjadi di Maluku Utara.

Memang kemudian muncul kontroversi. Pendukung gubernur lama mengajukan bukti bahwa ada cacat prosedur dalam pemilihan. Dikatakan bahwa ada surat Menteri Dalam Negeri yang tidak dibacakan, yang sebenarnya belum mengizinkan pemilihan dilaksanakan. Dikatakan juga ada satu anggota DPRD yang sudah diberhentikan. Sang anggota itu ternyata tetap menggunakan hal pilihnya. Padahal mungkin anggota “tidak sah” itu yang membuat Sahrial menang satu suara.

Pihak yang mendukung gubernur baru terpilih punya pula kontra argumen. Menurut mereka, surat Menteri Dalam Negeri itu bukanlah surat yang tidak mengizinkan pemilihan. Surat itu hanya klarifikasi calon gubernur lain, Hari Sohar, yang ternyata tidak mendapatkan suara sama sekali. Sementara anggota DPRD yang sudah diberhentikan, dianggap masih punya hak pilih karena penggantinya belum dilantik.

Namun yang penting DPRD setempat di Sumatra Selatan tidak menganulir hasil pemilihan. Hal yang sama terjadi di Bali. Walau

ada kontroversi money politics, DPRD Bali tidak menganulir hasil pemilihan. Untuk kasus Bali, toh pemerintah pusat tetap melantik gubernur terpilih sesuai dengan jadwal. Mengapa kebijakan yang sama tidak ditetapkan untuk kasus Sumatra Selatan. Apakah presiden menerapkan standar ganda, pilih kasih.

Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan presiden untuk menunda menerbitkan Keppres bagi gubernur terpilih di Sumatra Selatan. Namun presiden memang sebaiknya lebih berhati-hati. Megawati sendiri harus secermat mungkin membedakan kapan ia harus bertindak sebagai presiden, dan kapan harus bertindak sebagai ketua umum partai. Dua jabatan itu jangan dicampur baur.

Sebagai ketua umum partai, sah saja Megawati ingin menghukum “para pembangkang” di daerah. Jika Sahrial dianggap membangkang, dan anggota PDIP di Sumsel juga membangkang, boleh saja Megawati memberikan hukuman. Itu sama sekali urusan internal partai untuk menegakan disiplin. Publik luas paling jauh hanya memberikan simpati atau mencibir saja.

Tetapi sebagai presiden, Megawati harus ikut tidak hanya aturan tetapi juga akal sehat. Presiden memimpin negara dan negara adalah milik semua golongan, bukan hanya milik satu partai. Urusan partai politik jangan sampai terbawa mempengaruhi kebijakannya sebagai presiden. Adalah tugas presiden melantik gubernur yang sudah terpilih secara sah oleh DPRD. Kecuali jika DPRD setempat membatalkan pemilihan itu untuk alasan hukum. “Pembangkangan” di daerah jangan pula diikuti oleh “pembangkangan” pemerintah pusat terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh prinsip the good governance.

Ekspor Buruh ala Indonesia

TITI, bukan nama sebenarnya, masih sering melamun. Bicaranya terbata-bata, kadang dengan jeda yang panjang. Di sebelahnya, bayi berusia sekitar dua bulan, sesekali dilihatnya. Berusaha sistematis, ia menceritakan pengalamannya menjadi pembantu rumah tangga di Kuwait tahun lalu.

“Saya”, ujar Titi, “kerja di Kuwait karena ingin menambah penghasilan. Penghasilan suami kurang.” Dengan persetujuan suami, ia bersama TKW (Tenaga Kerja Wanita) lain pergi ke Timur Tengah. Mula-mula, majikannya sangat baik. “Namun suatu hari, adik majikan memperkosa saya. Saya tidak bisa melawan. Saya cerita kepada majikan saya, tetapi saya malah diancam akan dipenjarakan.”

Setelah sekian waktu, ia pun hamil. Ia pulang ke Indonesia. Kini sang bayi, hasil perkosaan itu sudah diadopsi oleh keluarga lain. Suaminya di Indonesia juga tidak bersedia lagi menerimanya seperti sedia kala. Hancurlah hidupnya.

Titi hanyalah salah satu saja dari korban TKW yang luar biasa banyaknya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kopbumi (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia), puluhan ribu TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dianiaya dan disekap. Ratusan pekerja wanita diperkosa. Ribuan di antara mereka juga pernah dipenjara. Sementara ada puluhan pula yang mati. Tidak dihitung kasus depresi, lupa ingatan, akibat penderitaan psikis yang mereka terima.

Pokok pangkal penyiksaan pekerja wanita di Indonesia di luar negeri adalah absennya perlindungan hukum. Dalam perjanjian bilateral antarnegara, misalnya antara Indonesia dan Arab Saudi atau Indonesia dan Malaysia, luput diatur mengenai pengawasan publik bagi pekerja rumah tangga wanita.

Sampai hari ini, nasib pekerja rumah tangga wanita di rumah-rumah majikan luar negeri sana, sepenuhnya diserahkan kepada good will sang majikan. Jika mujur dapat majikan terhormat dan mulia, nasib buruh migran cukup dilindungi. Namun jika bertemu majikan yang merasa buruh itu adalah “budaknya”, yang boleh diperkosa; atau ketemu keluarga di mana adik, kakak, dan ayah, yang tidak bisa mengelola “nafsu sahwatnya,” tidak ada pula yang bisa dilakukan.

Pekerja wanita itu bekerja di dalam rumah, yang tidak dapat diawasi publik. Ia dilarang keluar rumah kecuali jika diajak majikan. Banyak kasus TKI tidak boleh pula menyentuh telepon. Untuk kasus Titi, misalnya, selama berbulan-bulan ia terisolasi di dalam rumah. Ia tidak tahun kabar suaminya di Indonesia. Ketika diperkosa, tidak tahu pula ia harus mengadu kemana? Ia memang bisa kabur jika mujur, tetapi paspor ditahan di tangan majikan. Jika tidak beruntung, ia bisa ditangkap polisi dan masuk penjara karena tidak membawa dokumen identitas.

Niscaya situasi sangat berbeda jika pemerintah Indonesia sedikit memaksakan perlindungan hukum dalam perjanjian bilateral dua negara. Kontrol publik harus dimasukkan ke dalam perjanjian itu.

Misalnya, sebulan sekali, majikan harus membawa TKW itu ke KBRI berkumpul bersama TKW lainnya. Bagi majikan yang tidak melaksanakan kewajiban itu, ia terkena denda dan hukuman.

Dengan bertemu orang lain di ruang publik sebulan sekali, sang majikan juga akan berpikir seribu kali untuk "macam-macam". Paling tidak sebulan sekali, para TKW itu dapat saling cerita dan saling mengadu, jika majikannya melanggar aturan. Jika ada penyiksaan, percobaan perkosaan ataupun kekerasan, itu dapat diketahui sejak awal sekali, melalui pertemuan reguler itu.

Pemerintah harus pula lebih "ngotot" mencantumkan hak-hak tenaga kerja Indonesia. Misalnya, ada jam kerja yang standar. Pekerja tidak boleh dipaksa melakukan hal yang bertentangan dengan agama. Harus pula diizinkan, tenaga kerja Indonesia berkomunikasi dengan keluarganya, minimal, misalnya sebulan sekali. Dengan perlindungan itu, pemerintah dapat diklaim peduli dengan warganya. Pemerintah peduli dengan keselamatan wong cilik di rantau orang.

Perilaku pemerintah saat ini, justru sebaliknya. Pemerintah telah merendahkan dirinya sendiri seolah bertindak selaku negara kasta rendah. Seolah pemerintah menerima saja kehendak negara lain dalam perjanjian bilateral itu. Jika negara luar menolak mencantumkan perlindungan yang diminta, pemerintah kita kesannya oke-oke saja. Begitu lemah posisi bargaining pemerintah.

Tanpa disadari, dengan perilaku itu pemerintah sudah memberlakukan warganya sendiri sebagai komoditi yang layak di ekspor, tanpa peduli dengan perlindungan hukumnya.

Saatnya pemerintah Indonesia lebih berkeras. Misal pemerintah membuat kebijakan tidak akan mengirimkan tenaga kerja ke negara mana pun yang belum bersedia membuat perjanjian bilateral dengan jaminan hukum. Buruh Indonesia tidak hanya diperlakukan sebagai "barang" saja.

Jika sisi legal jaminan “ekspor” buruh murah Indonesai selesai, masalah berikutnya yang dihadapi pemerintah tinggal pengiriman TKI ilegal. TKI yang ilegal itu memang jauh lebih sulit dilindungi. Mereka datang ke negara lain tanpa dokumen dan kontrak kerja. Paspor dan kartu identitas mereka sering pula palsu. Pendataan kehadiran mereka di negara lain sulit dibuat. Tanpa pendataan yang akurat itu, perlindungan hukumnya semakin problematis.

Namun untuk kasus TKI ilegal, mungkin 80 persen persolannya ada di di dalam negeri. Mereka hanya mungkin “diekspor” secara ilegal karena mobilisasi berbagai agen yang sah ataupun tidak sah. Kerja agen itu yang harus dikriminalisasi. Penjara yang sangat tinggi ditetapkan kepada mereka yang terlibat dalam jaringan perdagangan TKW ilegal. Sangat masuk akal jika bandar “TKI” ilegal itu mendapat hukuman yang lebih tinggi ketimbang bandar narkoba.

Namun kriminalisasi itu hanya dapat dibuat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran. Dengan aturan setingkat undang-undang, para TKW ilegal lebih mudah diberantas. Sejak lima tahun reformasi, aneh tapi nyata, undang-undang itu tidak kunjung terbentuk sampai hari ini. Padahal dalam kampanye 1999, begitu banyak partai yang mengklaim akan memperjuangkan wong cilik. Ternyata wong cilik memang baru diperlakukan sebagai slogan saja.

SUMBER NASKAH

1. Megawati vs Rachmawati, *Republika*, 8 Februari 2003
2. Partai Paling Korup, *Republika*, 22 Februari 2003
3. Inovasi Politik PPP, *Republika*, 22 Maret 2003
4. Partai Politik pun Berguguran, *Republika*, 18 Oktober 2003
5. Forum Partai Politik, *Republika*, 1 November 2003
6. Nasib Buruk Partai Politik, *Republika*, 13 Desember 2003
7. Debat Calon Presiden, *Republika*, 15 Februari 2003
8. Nasib Politik Wiranto, *Republika*, 1 Maret 2003
9. Pengusaha Menjadi Presiden?, *Republika*, 29 Maret 2003
10. Gus Dur Calon Presiden?, *Republika*, 26 April 2003
11. Pertaruhan Nurcholish Madjid, *Republika*, 3 Mei 2003
12. Kompromi Soal Calon Presiden, *Republika*, 10 Mei 2003
13. Fenomena Susilo Bambang Yudhoyono, *Republika*,
29 September 2003
14. Pemilu 2004, Terancam?, *Republika*, 15 November 2003
15. Perjalanan Nurcholish Madjid, *Republika*, 6 Desember 2003
16. Pertarungan Tiga Soekarnoputri, *Republika*, 20 Desember 2003
17. Nyanyian Sedih di Aceh, *Republika*, 8 Maret 2003
18. Pro NKRI di Aceh, *Republika*, 12 April 2003
19. Menimbang Pemimpin Aceh, *Republika*, 19 April 2003

20. Menjangkau Hasan Tiro, *Republika*, 17 Mei 2003
21. Sepuluh Hari Operasi Terpadu, *Republika*, 31 Mei 2003
22. Sayembara Memburu Hasan Tiro, *Republika*, 7 Juni 2003
23. Momok Gerakan Aceh Merdeka, *Republika*, 8 November 2003
24. Reformasi Dan Gerakan Mahasiswa, *Republika*, 24 Mei 2003
25. Sukhoi-Gate Mancari Mangsa, *Republika*, 21 Juni 2003
26. Panja Sukhoi Kebablasan, *Republika*, 5 Juli 2003
27. DPR Melanggar Konstitusi?, *Republika*, 11 Juli 2003
28. Academic Review buat DPR, *Republika*, 19 Juli 2003
29. Upah Mengangkat Gubernur, *Republika*, 23 Agustus 2003
30. Rehabilitasi Massal Komunis?, *Republika*, 30 Agustus 2003
31. Dua Tahun Tragedi 9/11, *Republika*, 13 September 2003
32. Pembangkangan di Daerah, *Republika*, 20 September 2003
33. Ekspor Buruh ala Indonesia, *Republika*, 25 Oktober 2003

DAFTAR BUKU DENNY J.A

1. DEMOCRATIZATION FROM BELOW PROTEST EVENTS AND REGIME CHANGE IN INDONESIA Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
2. THE ROLE OF GOVERNMENT IN ECONOMY AND BUSINESS, Penerbit LKIS, 2006
3. VARIOUS TOPICS IN COMPARATIVE POLITICS, Penerbit LKIS 2006
4. DEMOKRASI INDONESIA: VISI DAN PRAKTEK (Kumpulan Tulisan di Harian Kompas), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
5. JALAN PANJANG REFORMASI (Kumpulan Tulisan di Suara Pembaruan), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
6. MELEWATI PERUBAHAN Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia (Kumpulan Tulisan di Jawa Pos dan Indopos), Penerbit LKIS, 2006
7. POLITIK YANG MENCARI BENTUK (Kumpulan Kolom di Majalah Gatra), Penerbit LKIS, 2006
8. MEMBANGUN DEMOKRASI SEHARI-HARI (Kumpulan Tulisan di Media Indonesia), Penerbit, LKIS 2006
9. PARTAI POLITIK PUN BERGUGURAN (Kumpulan Tulisan di Republika), Penerbit LKIS 2006
10. MANUVER ELIT, KONFLIK DAN KONSERVATISME POLITIK (Kumpulan Tulisan di Koran Tempo), Penerbit LKIS 2006
11. PARA POLITISI DAN LAGUNYA (Kumpulan Tulisan di Rakyat Merdeka dan Harian Seputar Indonesia), Penerbit LKIS 2006
12. MEMPERKUAT PILAR KELIMA, Pemilu 2004 Dalam Temuan Survei LSI, Penerbit LKIS 2006

13. VISI INDONESIA BARU SETELAH REFORMASI 1998, Penerbit LKIS 2006
14. CATATAN POLITIK, Penerbit LKIS 2006
15. JATUHNYA SOEHARTO DAN TRANSISI DEMOKRASI, Penerbit LKIS 2006
16. MEMBACA ISU POLITIK, Penerbit LKIS 2006
17. GERAKAN MAHASISWA DAN POLITIK KAUM MUDA ERA 80-AN, Penerbit LKIS 2006
18. ELECTION WATCH : MERETAS JALAN DEMOKRASI (Talkshow Denny J.A di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
19. PARLIAMENT WATCH: EKSPERIMEN DEMOKRASI: DILEMA INDONESIA (Talkshow Denny J.A. di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
20. NAPAK TILAS REFORMASI POLITIK INDONESIA (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006
21. JEJAK-JEJAK PEMILU 2004 (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006